



**PERATURAN
WALI KOTA SABANG**

NOMOR 17 TAHUN 2022

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA SABANG**

RKPK

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KOTA SABANG
2022**



**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah melaksanakan ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan ...



16. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kota.
8. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 2

- (1) RKPK Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026.

(2) RKPK ...

- (2) RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, yang memuat:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB VII Penutup.

Pasal 3

- (1) RKPK Tahun 2023 menjadi pedoman bagi SKPK untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPK Tahun 2023.
- (2) RKPK Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2023 mencakup Renja SKPK dan RKPK Tahun 2023.

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Kota, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian pelaksanaan RKPK Tahun 2023.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPK kepada Wali Kota.

Pasal 7

Evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2023.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2023 kepada Wali Kota.

Pasal 9

- (1) RKPK Tahun 2023 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan ...

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPK Tahun 2023 disampaikan kepada Gubernur Aceh bersamaan dengan penyampaian rancangan Qanun Kota tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Juli 2022



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,



ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG
 TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penyusunan	I-9
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SABANG	 II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Sabang	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Aspek Geografis	II-1
2.1.1.2. Aspek Demografi	II-11
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-17
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat	II-29
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-36
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-36
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	II-37
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	II-55
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-77
2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Fokus Layanan Urusan Penunjang	II-88
2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh	II-91
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-93
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-93
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-94
2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi	II-99
2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia	II-102
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sabang Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK Kota Sabang	II-104
2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2021	II-104
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJM Kota Sabang Tahun 2021	II-105

	2.3. Permasalahan Pembangunan	II-117
	2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-118
	2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-122
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	III-2
	3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-8
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-12
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-18
	3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah.....	III-22
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah	IV-1
	4.2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032	IV-7
	4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang.....	IV-7
	4.4. Sasaran Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Sabang Tahun 2022	IV-33
	4.5. Tematik Pembangunan	IV-33
	4.6. Prioritas Pembangunan Kota Sabang	IV-34
	4.7. Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Sabang Tahun 2022	IV-42
	4.8. Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Sabang.....	IV-45
	4.9. Standar Pelayanan Minimal Kota Sabang.....	IV-82
	4.10. Pokok-Pokok Pikiran DPRK Sabang	IV-84
	4.11. Inovasi Kota Sabang	IV-85
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pembagian Administrasi Wilayah Kecamatan dan Gampong di Kota Sabang	II-2
Tabel 2.2.	Kelas Kemiringan Kemiringan Lahan di Kota Sabang	II-3
Tabel 2.3.	Kondisi Klimatologi Kota Sabang Tahun 2021	II-6
Tabel 2.4.	Jenis Penggunaan Lahan	II-8
Tabel 2.5.	Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang	II-10
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Kota Sabang Per Kecamatan Tahun 2017-2021	II-11
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Kota Sabang menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio 2021	II-12
Tabel 2.8.	Kepadatan Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2017-2021	II-13
Tabel 2.9.	Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2021 ...	II-13
Tabel 2.10.	Migrasi di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-15
Tabel 2.11.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Usaha	II-16
Tabel 2.12.	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.13.	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Berlaku 2010 Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.14.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	II-19
Tabel 2.15.	PDRB ADHB Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-22
Tabel 2.16.	Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-25
Tabel 2.17.	Keadaan Tingkat Kemiskinan Kota Sabang	II-27
Tabel 2.18.	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.19.	Indikator IPM di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.20.	Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021	II-32
Tabel 2.21.	Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021	II-33
Tabel 2.22.	TPT & TPAK Nasional, Aceh dan Kota Sabang 2017-2027	II-36
Tabel 2.23.	Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.24.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2021	II-41
Tabel 2.25.	Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.26.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021	II-44
Tabel 2.27	Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.28.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2021	II-49
Tabel 2.29.	Indikator Bidang Perumahan Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.30.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Perubahan Rakyat	

	Tahun 2018-2021	II-51
Tabel 2.31.	Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021	II-52
Tabel 2.32.	Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.33.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2018-2021	II-55
Tabel 2.34.	Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021.....	II-56
Tabel 2.35.	Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.36.	Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.37.	Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.38.	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.39.	Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	II-62
Tabel 2.40.	Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.41.	Indikator Bidang Urusan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.42.	Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Gampong Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.43.	Indikator Bidang Urusan Pengendali Penduduk & Keluarga Berencana Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.44.	Indikator Pelayanan Bidang Perhubungan Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.45.	Indikator Pelayanan Bidang Komunikasi & Informatika di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.46.	Koperasi Aktif di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.47.	Realisasi Jumlah PMDN & PMA di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.48.	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2021	II-74
Tabel 2.50.	Jumlah Perpustakaan di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.51.	Jumlah Petani, Kelompok Tani di Kota Sabang	II-77
Tabel 2.52.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	II-79
Tabel 2.53.	Peruntukkan Pemanfaatan Hutan di Kota Sabang	II-80
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.55.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	II-82
Tabel 2.56.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-83
Tabel 2.57.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.....	II-84
Tabel 2.58.	Produksi Perikanan di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.59.	Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	II-86
Tabel 2.60.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-86
Tabel 2.61.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.62.	Jumlah Nelayan di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.63.	Jumlah Armada Perikanan Tangkap di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.64.	Capaian Indikator Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021	II-89
Tabel 2.65.	Realisasi IKD Kinerja Bidang Urusan Keuangan Sabang Tahun 2017-2021	II-90

Tabel 2.66.	Data Pelanggaran Syariat Islam	II-91
Tabel 2.67.	Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam Tahun 2021	II-92
Tabel 2.68.	Pertumbuhan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh.....	II-93
Tabel 2.69.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2017-2021.....	II-94
Tabel 2.70.	Ketaatan Terhadap RTRW.....	II-96
Tabel 2.71.	Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Sabang.....	II-96
Tabel 2.72.	Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Sabang	II-96
Tabel 2.73.	Persentase Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.74.	Perkembangan Pelayanan Air Bersih PDAM di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-97
Tabel 2.75.	Perkembangan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	II-99
Tabel 2.76.	Perizinan di Kota Sabang Tahun 2021	II-100
Tabel 2.77.	Jumlah Jenis Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kota Sabang Tahun 2021	II-101
Tabel 2.78.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.79.	Persentase Penduduk Kota Sabang Menurut Umur Tahun 2017–2021	II-103
Tabel 2.80.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2018-2020.....	II-104
Tabel 2.81.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Sabang Tahun 2018-2021	II-105
Tabel 3.1.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	III-3
Tabel 3.2.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	III-4
Tabel 3.3.	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sabang Tahun 2017-2021	III-5
Tabel 3.4.	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang 2017-2021 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang 2021-2022.....	III-6
Tabel 3.5.	Tingkat Inflasi Kota Sabang Tahun 2017-2021 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang Tahun 2021-2022	III-7
Tabel 3.6.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Sabang Tahun 2019-2024.....	III-16
Tabel 3.7.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Sabang Tahun 2019-2024.....	III-20
Tabel 3.8.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2019-2024.....	III-23
Tabel 4.1.	Hubungan Visi, Misi RPJPD dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023	IV-8
Tabel 4.2.	Sasaran Pembangunan Kota Sabang Nasional, Aceh dan Kota Sabang	IV-33
Tabel 4.3.	Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pasca COVID-19.....	IV-42
Tabel 4.4.	Penyandingan Prioritas Nasional, Aceh dan Kota Sabang serta Program Prioritas Tahun 2023	IV-46
Tabel 4.5.	Indikatif Belanja per Prioritas Kota Sabang Tahun 2023	IV-69

Tabel 4.6.	Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Sabang Tahun 2023.....	IV-82
Tabel 4.7.	Inovasi Kota Sabang.....	IV-85
Tabel 5.1.	Rencana Kegiatan Sumber Dana DOKA Tahun 2023.....	V-2
Tabel 5.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPK Tahun 2023	V-6
Tabel 6.1.	Penetapan Indikator Makro Kota Sabang Tahun 2023.....	VI-1
Tabel 6.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	VI-1
Tabel 6.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rangkaian Agenda Kegiatan Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2023	I-4
Gambar 1.2.	Diagram Alir Perencanaan	I-5
Gambar 1.3.	Hubungan antara Dokumen terhadap RKPK Tahun 2023.....	I-8
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Sabang.....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Geologi Kota Sabang.....	II-7
Gambar 2.3.	Grafik Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2021 (%).....	II-14
Gambar 2.4.	Grafik Migrasi Penduduk di Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	II-15
Gambar 2.5.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi kota Sabang, Aceh dan Nasional	II-20
Gambar 2.6.	Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Kota Sabang menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021	II-21
Gambar 2.7.	Laju inflasi Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (persen)	II-23
Gambar 2.8.	PDRB per Kapita Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	II-24
Gambar 2.9.	Indeks Gini Kota Sabang, Aceh, dan Nasional Tahun 2017-2021 ...	II-26
Gambar 2.10.	Prosentase Kemiskinan, Indek Kedalaman (P1) dan Indek Keparahan (P2) Kota Sabang, Aceh dan Nasional 2017-2021.....	II-28
Gambar 2.11.	Perkembangan IPM Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021	II-30
Gambar 2.12.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2017-2021.....	II-60
Gambar 2.13.	Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2017-2021 .	II-61
Gambar 2.14.	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sabang Tahun 2017-2021	II-104
Gambar 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sabang dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	III-2
Gambar 3.2.	Laju Inflasi Kota Sabang dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	III-7
Gambar 3.3.	Perbandingan Indek Gini dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	III-8
Gambar 4.1.	Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023	IV-41
Gambar 4.2.	Roadmap Kebijakan Penanganan Dampak Covid -19 Kota Sabang Tahun 2022	IV-44
Gambar 4.3.	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Aceh, dan Kota Sabang.....	IV-45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPKK disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS).

RPKK disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RPKK, penyusunan rancangan awal RPKK, penyusunan rancangan RPKK, pelaksanaan Musrenbang RPKK, perumusan rancangan akhir RPKK dan penetapan RPKK. Proses penyusunan program dan kegiatan RPKK dilakukan mulai dari proses Musrenbang RPKK di Gampong, Musrenbang RPKK di Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah, Musrenbang RPKK di Kota serta penyusunan dan penetapan RPKK. Untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RPKK, dilakukan penjangkauan saran dan masukan dari stakeholder melalui Konsultasi Publik. Selain itu, aspirasi masyarakat baik yang disalurkan melalui usulan Musrenbang Gampong atau pun dari hasil reses yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRK juga menjadi masukan dalam penyusunan RPKK yang diharmonisasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pada orientasi substansi, penyusunan RPKK menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan

dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPK dapat dilihat pada Gambar 1.1.

RKPK Sabang Tahun 2023 disusun dalam asumsi respon dan pemulihan dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak sektor strategis Kota Sabang. Selain itu, RKPK Sabang Tahun 2023 merupakan tahun transisi karena telah berakhirnya periode RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022, sehingga perencanaan tahun ini disiapkan secara baik dengan mempedomani RPJMN 2020-2024, proyeksi target indikator makro nasional, RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027, RPK Sabang Tahun 2023-2026 serta isu strategis yang berkembang di Kota Sabang.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kota Sabang sudah menunjukkan tren ke arah yang lebih baik.

- IPM Kota Sabang periode 2017-2021 terus meningkat dengan capaian sebesar 74,10 tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,11 pada tahun 2021. Angka IPM Kota Sabang secara umum lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Aceh yang sebesar 72,14 ditahun 2021 . Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 2,01 poin selama periode tersebut.
- TPT Kota Sabang periode 2017-2021 cenderung naik, namun pada tahun 2021 TPT di Kota Sabang kembali turun dengan besaran 3,56% sementara tahun 2020 sebesar 4,81%.
- LPE Kota Sabang periode 2017-2019 cenderung menurun tidak signifikan. Untuk tahun 2020 LPE Kota Sabang terjun bebas pada angka -1,15%. Pada tahun 2020, dari 17 kategori ekonomi, hanya 7 kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Sepuluh kategori lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor dan daerah, khususnya Kota Sabang.
- Kemiskinan Kota Sabang sejak tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan mulai 17,66% tahun 2017 turun menjadi 14,94% tahun 2020. Namun tahun 2021 kembali naik diangka 15,32%. Kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian di Kota Sabang, akibat tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat dan wisatawan berkunjung ke Sabang
- Indeks Gini Kota Sabang periode 2017-2021 fluktuatif, tahun 2020 kembali turun menjadi 0,271 poin (ketimpangan rendah) dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,281 poin namun di tahun 2021 indeks gini Kota Sabang kembali naik menjadi 0,293 poin

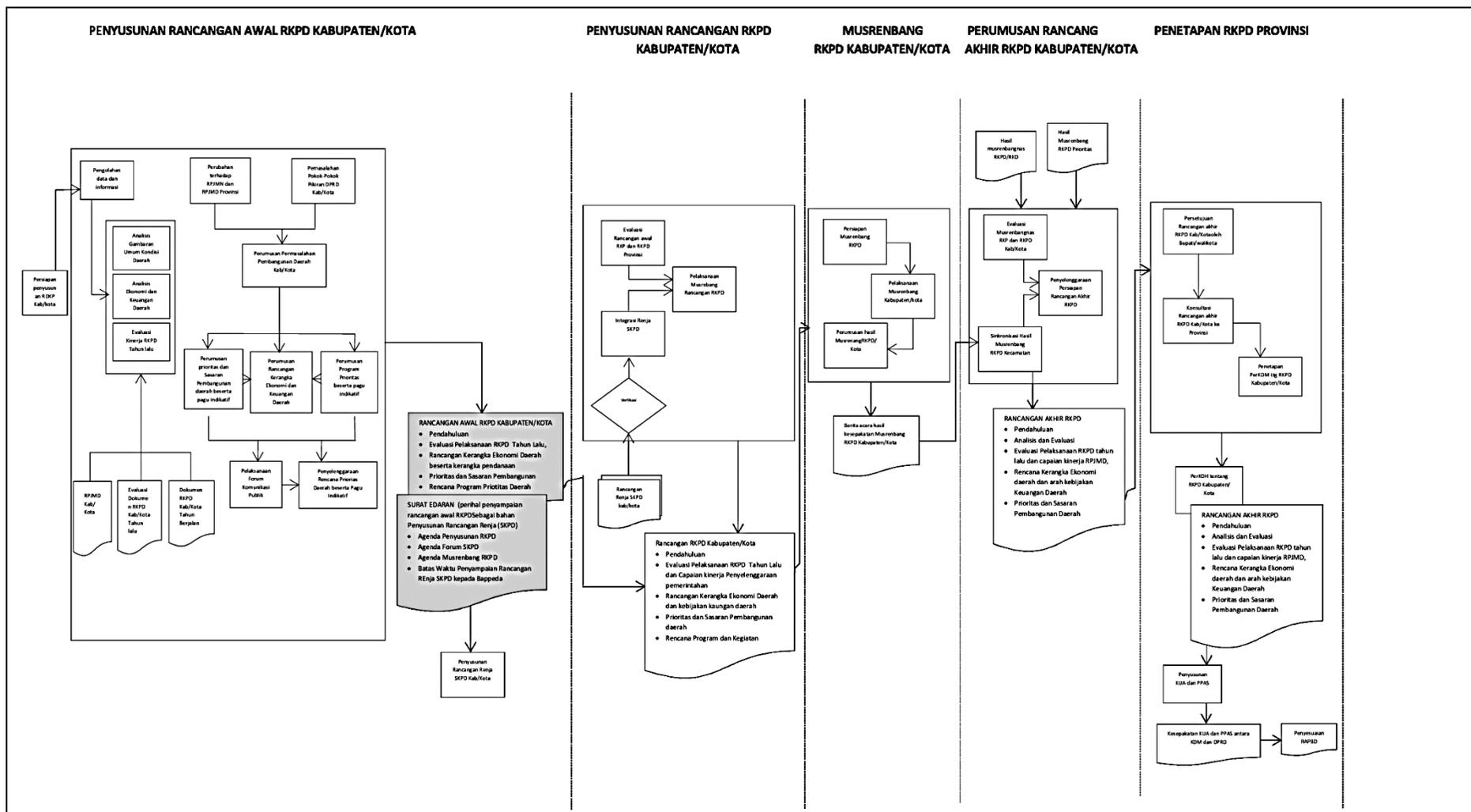
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPK Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPK Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 22 Februari 2022;
2. Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda tanggal 31 Desember 2022;
3. Penyampaian Pokok Pokok Pikiran Reses DPRK tanggal 31 Januari 2022;
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2022;
5. Penetapan Surat Edaran Walikota Sabang Tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2022;
6. Pelaksanaan Musrenbang RKPK Tahun 2023 di Kecamatan tanggal 1-8 Maret 2022;
7. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tanggal 23 Maret 2022;
8. Pelaksanaan Musrenbang RKPK Sabang Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2022;
9. Penyusunan Rancangan Akhir RKPK Sabang Tahun 2023 tanggal 31 Maret-10 Juni 2022;
10. Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir RKPK Sabang Tahun 2023 tanggal 14-27 Juni 2022;
11. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perwal tentang RKPK Sabang Tahun 2023 oleh Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh tanggal 28 Juni 2022; dan
12. Penetapan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang RKPK Sabang Tahun 2023 tanggal 8 Juli 2022.



Gambar 1.1.

Rangkaian Agenda Kegiatan Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2023



Gambar 1.2.
Diagram Alir Perencanaan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
- 14) Peraturan Menteri Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
- 17) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
- 18) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6)
- 19) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 22);
- 20) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4);
- 21) Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 17);
- 22) Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 7).

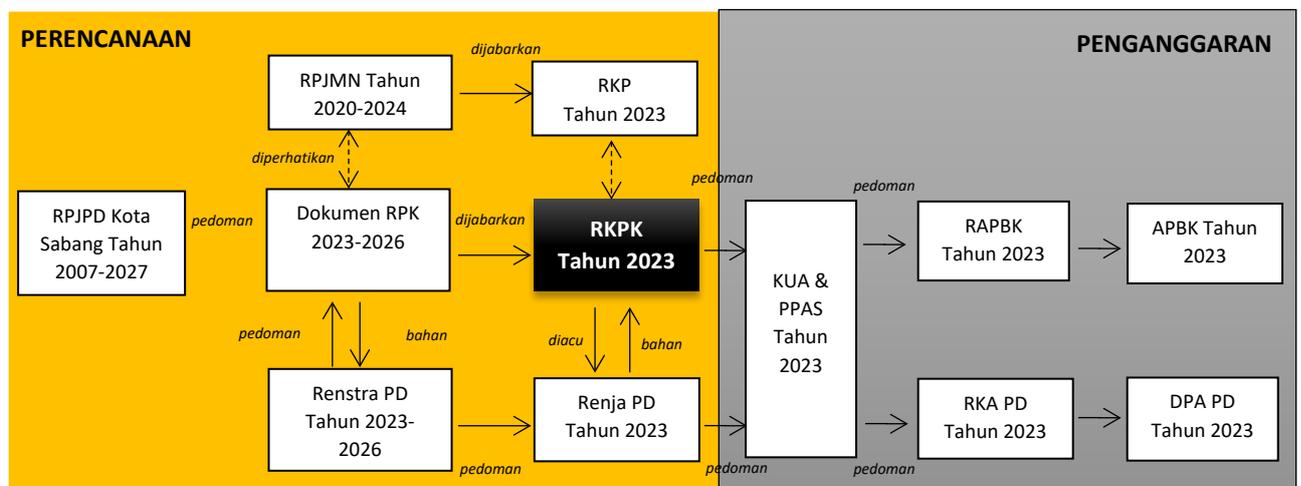
1.3. Hubungan antar Dokumen

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kota terdiri dari RPJPD, RPK, dan RKPK. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap empat tahun dalam bentuk RPK. Selanjutnya RPK dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPK sehingga konsistensi antar dokumen

perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RPKK juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RPKK menjadi acuan Renja PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRK menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Sabang.

Penyusunan RPKK Sabang Tahun 2023 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan tahun 2021. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.2.

Untuk menjamin akuntabilitas dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Sabang telah menerapkan penggunaan sistem informasi berbasis web yang saling terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, dan sistem informasi lain yang terkait yang ada di Kota Sabang.



Gambar 1.3.
Hubungan antar Dokumen terhadap RPKK Tahun 2023

Penyusunan dokumen RPKK Tahun 2023 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Sabang yang terkait dengan RPKK tahun 2023 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020-2022, Rencana Pengelolaan Danau Aneuk Laot.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPK Kota Sabang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai Pedoman arah kebijakan pembangunan kota tahun 2023 serta sebagai upaya perwujudan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan kota tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari dokumen RKPK Tahun 2023 ini adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Kota Sabang Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Sabang Tahun 2023;
4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Tahun 2023; dan
5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2023

RKPK Sabang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPK.
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SABANG Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK Tahun 2021 dan realisasi capaian RPJMK Sabang 2017-2022; serta permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi.
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2021 dan perkiraan tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat prioritas dan sasaran pembangunan kota berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun

2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

- BAB V** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam kerangka regulasi dan pendanaan. Memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, meng-akomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023.
- BAB VI** **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Memuat paparan mengenai penetapan indikator kinerja perangkat daerah dan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja perangkat daerah. Tingkat akumulasi keberhasilan akan disajikan dalam bentuk tabel Indikator Kinerja Utama yang rinci dan terukur.
- BAB VII** **PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SABANG

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Sabang

Perkembangan Kota Sabang bertumpu pada beberapa sektor, yaitu pariwisata, perdagangan dan jasa, perikanan dan kepelabuhanan yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun '*image*' Kota Sabang sebagai Kota Wisata dan Kota Jasa. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan wilayah perkotaan serta beberapa destinasi wisata baru. Gambaran umum perkembangan Kota Sabang memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

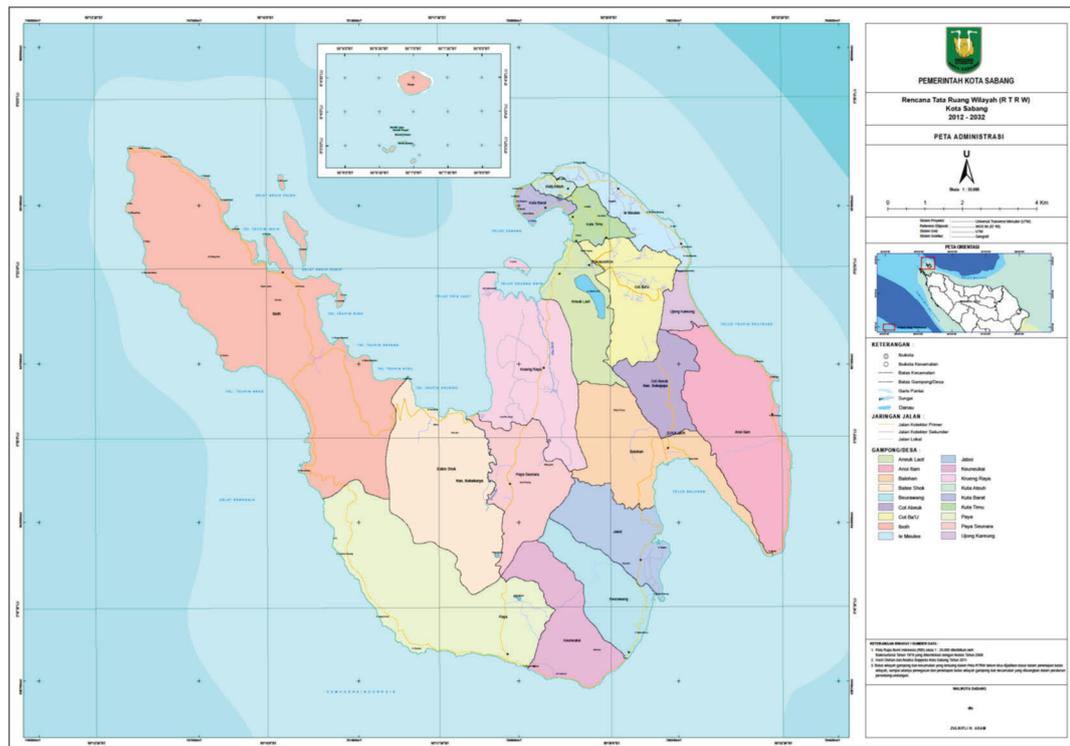
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografis

A. Luas dan Letak Wilayah

Luas wilayah Kota Sabang sebesar 12.213,97 Ha, yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo, Pulau Kembar, Pulau Batu Runcing, Pulau Batu Tengah, Pulau Batulah Selatan, Pulau Batulah Tengah, Pulau Batulah Utara, Pulau Rondo Selatan dan Pulau Ujung Ba'U yang terletak pada garis 05^o46'28" LU– 05^o54'28"LU dan 95^o13'02" BT – 95^o22'36" BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.



Sumber: RTRW Kota Sabang 2012-2032

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Sabang

Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 18 (delapan belas) gampong yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 1.706,95 Ha (13,98%) dengan jumlah gampong 5 (lima), (2) Kecamatan Sukajaya 3.599 Ha (29,47 %) dengan jumlah gampong 7 (tujuh) dan (3) Kecamatan Sukamakmue 6.907,82 Ha (56,56%) dengan jumlah 6 (enam) gampong. Berikut luas masing-masing gampong dan kecamatan di Kota Sabang terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi Wilayah Kecamatan dan Gampong di Kota Sabang

No	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
A.	Kecamatan Sukakarya	No	Nama Gampong	1706,95
		1	Gampong Kuta Ateuh	52,04
		2	Gampong Kuta Timu	157,11
		3	Gampong Kuta Barat	88,86
		4	Gampong Aneuk Laot	449,67
		5	Gampong Krueng Raya	959,27
B.	Kecamatan Sukajaya	No	Nama Gampong	3599,2
		1	Gampong le Meulee	306,89

No	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
		2	Gampong Ujoeng Kareung	122,60
		3	Gampong Anoe Itam	1018,89
		4	Gampong Cot Ba'U	531,09
		5	Gampong Cot Abeuk	357,18
		6	Gampong Balohan	772,41
		7	Gampong Jaboi	490,14
C	Kecamatan Sukamakmue	No	Nama Gampong	6907,82
		1	Gampong Paya Seunara	564,23
		2	Gampong Batee Shoek	1129,51
		3	Gampong Iboih	2731,16
		4	Gampong Beurawang	469,32
		5	Gampong Keuneukai	568,96
		6	Gampong Paya	1444,64
Total Kota Sabang		18 Gampong		12.213,97

Sumber: RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032 dan analisis

B. Kondisi Topografi

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ± 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17% dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi dataran 1,01%, Landai sampai datar 6,03%, bergelombang 31,70%, bergunung 48,17%, sangat curam 14,10 %.

Ditinjau dari kemiringan lerengnya Kota Sabang cukup bervariasi, yaitu di daerah Pulau Weh bagian Barat dan di tengah-tengah bagian Timur merupakan daerah yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lebih dari 15%. Secara rinci kemiringan lerengnya di Kota Sabang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lahan di Kota Sabang

Kelereng	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
Sangat Curam			
>40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	62.90
>40 %	Sukajaya	Balohan	108.52
>40 %	Sukamakmue	Batee Shok	172.69
>40 %	Sukamakmue	Beurawang	164.04
>40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	49.45
>40 %	Sukamakmue	Iboih	437.02
>40 %	Sukajaya	Jaboi	62.31

Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
>40 %	Sukamakmue	Keuneukai	190.78
>40 %	Sukakarya	Krueng Raya	149.48
>40 %	Sukamakmue	Paya	219.16
>40 %	Sukamakmue	Paya Seunara	105.89
Sub Jumlah			1.722,24
Bergunung			
15 - 40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	261.70
15 - 40 %	Sukajaya	Anoe Itam	167.11
15 - 40 %	Sukajaya	Balohan	410.33
15 - 40 %	Sukamakmue	Batee Shok	746.28
15 - 40 %	Sukamakmue	Beurawang	233.85
15 - 40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	227.93
15 - 40 %	Sukajaya	Cot Ba'U	160.54
15 - 40 %	Sukamakmue	Iboih	1934.00
15 - 40 %	Sukajaya	Jaboi	178.44
15 - 40 %	Sukamakmue	Keuneukai	299.44
15 - 40 %	Sukakarya	Krueng Raya	390.83
15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Barat	39.78
15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Timu	22.46
15 - 40 %	Sukamakmue	Paya	533.32
15 - 40 %	Sukamakmue	Paya Seunara	225.64
15 - 40 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	51.71
Sub Jumlah			5.883,38
Bergelombang			
5 - 15 %	Sukakarya	Aneuk Laot	124.48
5 - 15 %	Sukajaya	Anoe Itam	851.78
5 - 15 %	Sukajaya	Balohan	177.31
5 - 15 %	Sukamakmue	Batee Shok	208.98
5 - 15 %	Sukamakmue	Beurawang	51.56
5 - 15 %	Sukajaya	Cot Abeuk	78.05
5 - 15 %	Sukajaya	Cot Ba'U	204.14
5 - 15 %	Sukamakmue	Iboih	300.60
5 - 15 %	Sukajaya	Ie Meulee	232.64
5 - 15 %	Sukajaya	Jaboi	187.94
5 - 15 %	Sukamakmue	Keuneukai	66.34
5 - 15 %	Sukakarya	Krueng Raya	335.50
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	10.40
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Barat	26.89
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Timu	109.02
5 - 15 %	Sukamakmue	Paya	621.11

Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
5 - 15 %	Sukamakmue	Paya Seunara	232.46
5 - 15 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	52.54
Sub Jumlah			3.871,75
Landai			
2 - 5 %	Sukakarya	Aneuk Laot	0.60
2 - 5 %	Sukajaya	Balohan	76.25
2 - 5 %	Sukamakmue	Batee Shok	1.57
2 - 5 %	Sukamakmue	Beurawang	19.86
2 - 5 %	Sukajaya	Cot Abeuk	1.74
2 - 5 %	Sukajaya	Cot Ba'U	140.20
2 - 5 %	Sukamakmue	Iboih	29.63
2 - 5 %	Sukajaya	Ie Meulee	74.25
2 - 5 %	Sukajaya	Jaboi	61.44
2 - 5 %	Sukamakmue	Keuneukai	12.40
2 - 5 %	Sukakarya	Krueng Raya	16.51
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	41.64
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Barat	22.19
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Timu	25.63
2 - 5 %	Sukamakmue	Paya	71.05
2 - 5 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	18.35
Sub Jumlah			6.13,30
Datar			
0 - 2 %	Sukajaya	Cot Ba'U	26.21
0 - 2 %	Sukamakmue	Iboih	29.91
0 - 2 %	Sukakarya	Krueng Raya	66.94
0 - 2 %	Sukamakmue	Paya Seunara	0.23
Sub Jumlah			123,30
Jumlah			12.213,97

Sumber: RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032 dan Analisis

Kondisi daerah yang datar relatif terbatas, yaitu hanya di sekitar pantai, Bandara Maimun Saleh dan Gampong Paya Seunara. Di dalam rencana pengembangan kota harus dicarikan berbagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang berbukit, misalnya untuk pertanian atau perkebunan.

Kemiringan lereng yang dijumpai pada Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh adanya struktur geologi yang ada, akibat adanya pelurusan-pelurusan yang berarah relatif Barat Laut - Tenggara maka punggung-punggung yang dijumpai juga berarah relatif Tenggara – Barat Daya. Kemiringan lereng yang kurang dari 15 % ditemukan pada kawasan pesisir dan pada perpotongan dua kelurusan yang akhirnya membentuk suatu dataran pantai serta secara otomatis merupakan muara sungai.

Pada daerah dataran ini dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan juga sarana infrastruktur pendukung lainnya. Secara geologi daerah ini tersusun oleh endapan yang berumur Kuartar berupa endapan muara sungai dan endapan pasir pantai. Kemiringan lereng antara 15 - 30 % sebagaimana kedua pulau lainnya menempati pada daerah yang terluas yang berupa perbukitan yang secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik yang berumur sebelum Kuartar. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng lebih dari >30% menempati bagian lembah kelurusan yang ada.

C. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat didasarkan pada komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Sabang selama tahun 2021 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 355,4 mm. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 64-98 % dan terendah pada bulan Juni sebesar 52-75,7%. Tekanan udara rata-rata sebesar 997,6 Mbar dan suhu udara rata-rata 28°C.

Tabel 2.3
Kondisi Klimatologi Kota Sabang Tahun 2021

No	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (Mbar)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	21,6-31,0	64,0-98,0	991,9-999,1	251,2	19
2	Februari	19,4-31,8	59,0-97,0	992,2-1000,2	20,5	7
3	Maret	19,8-27,8	55,0-97,0	990,7-1000,4	69,0	10
4	April	22,4-33,8	56,0-98,0	992,3-1010,1	245,3	14
5	Mei	21,0-33,0	51,0-98,0	991,8-998,6	270,7	17
6	Juni	21,5-33,4	52,0-97,0	993,1-1000,1	92,6	14
7	Juli	22,2-33,1	48,0-98,0	992,2-1000,0	272,8	11
8	Agustus	22,3-33,0	56,0-98,0	992,4-1000,7	166,1	18
9	September	22,2-34,2	47,0-99,0	991,7-1000,0	214,4	11
10	Oktober	22,9-33,3	55,0-98,0	990,7-1002,4	109,0	13
11	November	21,6-32,0	63,0-99,0	991,0-1000,2	299,4	19
12	Desember	20,2-30,9	58,0-99,0	991,7-1001,9	355,4	16

Sumber: BMKG Kota Sabang, 2022

D. Kondisi Geologi

Formasi bebatuan Pulau Weh dapat dibagi menjadi 3 satuan atau formasi, yaitu (dari tua ke muda):

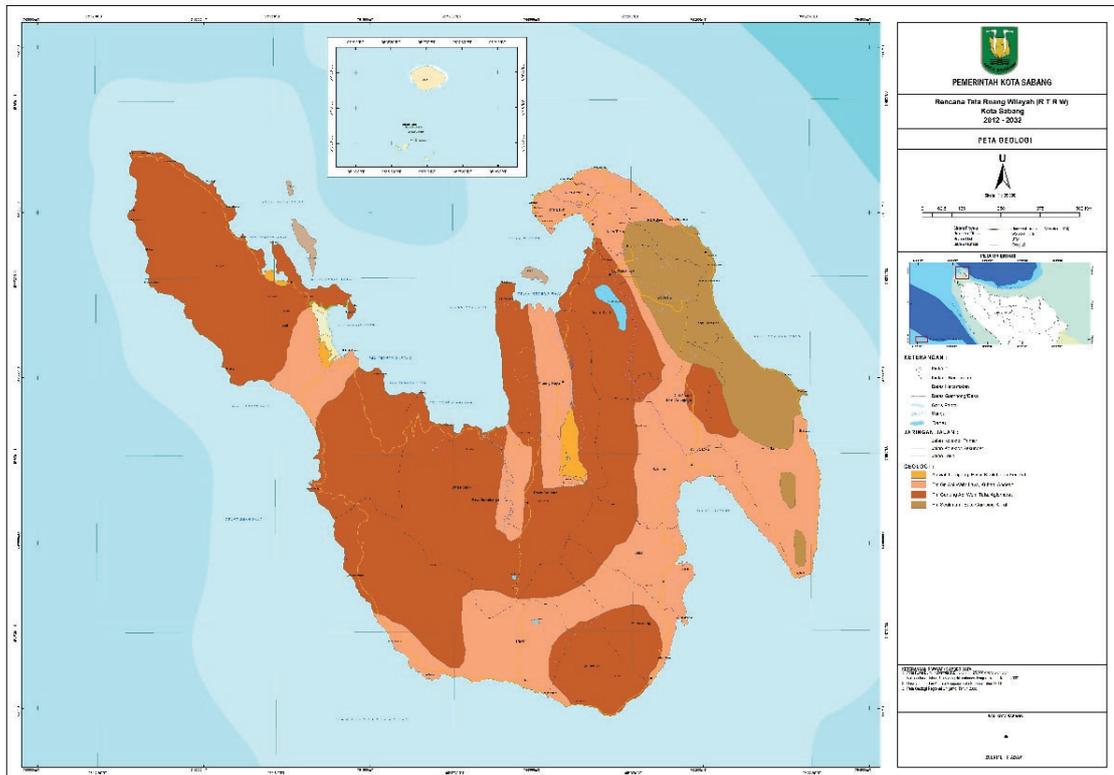
1. Formasi Gunung Api Pulau Weh, berumur Pleistosen dan tersusun atas tuf, aglomerat, lava, dan kubah andesit. Formasi ini menyebar disebagian besar Pulau Weh, yaitu Gunung Iboih, Cot Parada, Cot Lhueng Angen, Cot Pawang, Gunung Sarung Keris, Gunung Kulam, Cot Palana, Gunung Leumo Mate, Gunung Simere Guh, Cot Labu Batu, Cot Batee Dong, Sabang dan sekitarnya;

2. Formasi Seulimeum, berumur Pleistosen, tersusun atas batu gamping koral berwarna coklat muda keputihan gelap, mengandung cangkang binatang karang. Formasi ini menyebar di perbukitan bagian Timur Pulau Weh, membujur dari Utara ke Selatan didaerah Ujong Hud, Cot Ba'U, Ujong Reuteuk, Ujong Mentigu, Anoe Itam dan sekitarnya. Batuan ini diduga menumpang diatas Formasi Gunung Api Pulau Weh; dan
3. Satuan Aluvium, berumur Holosen, disusun oleh kerikil, pasir dan lempung. Dijumpai didataran pantai dan sungai di Balohan, sekitar Danau Aneuk Laot, Paya Seunara dan sekitarnya.

Kondisi bebatuan tersebut mendukung pula struktur geologi yang ada termasuk patahan dan gerakan tanah lainnya. Struktur sesar di Pulau Weh cukup berkembang yaitu berupa sesar mendatar.

Zona sesar ini merupakan kelanjutan dari sesar utama yang membelah Pulau Sumatra, yakni kelanjutan sistem sesar Sumatra/Semangko, dan sesar Lam Teuba Baro. Terbentuknya zona depresi semangko yang menerus ke arah Barat hingga Pulau Weh mengakibatkan tumbuh gunung api Pulau Weh dan mengalami depresi tektonik.

Zona sesar Lam Teuba Baro di daratan Sumatra diperkirakan menerus hingga ke Pulau Weh, dimulai dari Teluk Balohan ke arah Utara Kota Sabang. Sesar lain yang terdapat di Pulau Weh ini berada di sebelah barat, yakni sesar yang terdapat di daerah Jaboi, menerus kearah Pria Laot dengan arah relatif Tenggara-Barat Laut (Bennet, dkk). Lebih jelasnya, kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: RTRW Kota Sabang 2012-2032

Gambar 2.2
Peta Geologi Kota Sabang

E. Kondisi Hidrologi

Sumber daya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Pulau Weh Sabang adalah:

1. DAS Krueng Iboih, seluas 4.212, 26 Ha terdiri dari:
 - Sub DAS antara lain Sub DAS Aneuk Laot (418,22 Ha);
 - Sub DAS Paya Seunara (1133, 24 Ha);
 - Sub DAS Pria Laot (919, 06 Ha);
 - Sub DAS Teupin Kareung (729,94 Ha); dan
 - Sub DAS Iboih (1011,58 Ha).
2. DAS Pulau Klah seluas lebih kurang 13,18 Ha;
3. DAS Pulau Seulako seluas lebih kurang 0,96 Ha;
4. DAS Pulau Rubiah seluas lebih kurang 24,8 Ha;
5. DAS Krueng Balohan seluas lebih kurang 5.343,31 Ha, terdiri dari:
 - Sub DAS Anoe Itam (2.109,13 Ha);
 - Sub DAS Krueng Balohan (1124, 17 Ha);
 - Sub DAS Keuneukai (1141, 37 Ha); dan
 - Sub DAS Krueng Ceunohot (968, 64 Ha).
6. DAS Krueng Paya seluas lebih kurang 2.223,37 terdiri atas:

- Sub DAS Ceuhum (800,64 Ha);
- Sub DAS Guasarang (714,59 Ha); dan
- Sub DAS Ujong Ba'U (708, 15 Ha).

F. Penggunaan Lahan

Kota Sabang sebagai memiliki ciri khas wilayah kota kepulauan. Hal ini dapat dilihat dari jenis penggunaan lahan yang terdiri dari kawasan lindung dan sebagian lahan terbangun yang didukung aktifitas perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Sabang didominasi oleh kawasan lindung dengan luas 3.233,15 ha atau 18,40%, TWA Pulau Weh Sabang 1.280,47 ha, TWAL Kepulauan Weh Sabang seluas 5.244,74 ha dan Kawasan Penggunaan lain (APL) seluas 7.815,60 ha . (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2016).

Tabel 2.4
Jenis Penggunaan Lahan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	(%)
1	Kawasan Lindung	3.233,15	18,40
2	Kawasan TWA Pulau Weh Sabang	1.280,47	7,29
3	Kawasan TWAL Kepulauan Weh Sabang	5.244,74	29,84
4	Kawasan Penggunaan lain (APL)	7.815,60	44,47

Sumber: SK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2016

G. Potensi Wilayah

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata yang sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata.

Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan sarana

dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, perikanan, industri menduduki peringkat kedua terluas dengan potensi pengembangannya masih terdapat 90% peluang untuk pengembangannya kedepan.

H. Wilayah Rawan Bencana

1. Gempa Bumi

Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap guncangan gempa bumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau Weh pernah mengalami gempa bumi dengan besaran magnitude 6-7 skala *richter* dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (*Modified Mercaly Intensity*).

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 15,48 dengan Kelas Resiko Tinggi untuk Ancaman Gempa Bumi.

2. Tanah Longsor

Kondisi tanah pada beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 17,20 dengan Kelas Resiko Tinggi untuk Ancaman Tanah Longsor.

Tabel 2.5
Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang

Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi		Luas (Ha)
Kec. Sukajaya		
1.	Anoi Itam	1,62
2.	Balohan	95,69
3.	Cot Abeuk	45,33
4.	Cot Ba'U	20,90
5.	Jaboi	38,40
Kec. Sukakarya		
1.	Aneuk Laot	49,62
2.	Krueng Raya	247,20
Kec. Sukamakmue		
1.	Beurawang	83,29
2.	Keuneukai	152,52
3.	Paya	114,55

Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi		Luas (Ha)
4.	Iboih	628,65
5.	Paya Seunara	83,56
6.	Batee Shok	151,63
Jumlah		1.712,96

Sumber: Hasil analisis, 2013.

3. Abrasi

Dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Pulau Weh. Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Sabang, Pantai Iboih, Pantai Sabang *Fair*, dan Pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (*Clay*). Pantai-pantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang *Fair* dan Pantai Jaboi termasuk pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 17,20 dengan Kelas Resiko Tinggi untuk Ancaman Abrasi.

4. Cuaca Ekstrim

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu Angin Barat dan Angin Timur. Musim Angin Barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah Timur kearah Barat dan Barat Daya. Pada bulan-bulan Musim Timur rata-rata suhu udara di Kota Sabang bersekitar antara 26,40 °C sampai dengan 28,70 °C. Kelembaban nisbi rata-rata di Kota Sabang bersekitar antara 84% sampai dengan 89%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecepatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 9,75 dengan Kelas Resiko Sedang untuk Ancaman Cuaca Ekstrim

2.1.1.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Sabang pada tahun 2021 menurut data BPS mencapai 42.066 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Sabang terus meningkat. Menurut kecamatan, jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Sukajaya (22.153 jiwa atau 52,66 persen), selanjutnya yaitu Kecamatan Sukakarya (19.913 jiwa atau 47,34 persen). Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kota Sabang lebih dipengaruhi oleh pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, baik kawasan perumahan dan perdagangan jasa.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	SUKAJAYA	17.178	17.470	17.615	21.642	22.153	6,57
2	SUKAKARYA	16.800	17.101	17.259	19.573	19.913	4,34
TOTAL		33.978	34.571	34.874	41.197	42.066	5,48

Sumber: BPS, 2021

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Ukuran laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu parameter kondisi kependudukan di suatu wilayah, serta dapat bermanfaat dalam menentukan proyeksi penduduk maupun berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sabang pada 2017–2021 yaitu 5,48 persen.

Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Menurut tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Sukajaya 6,57 persen, sementara Kecamatan Sukakarya laju pertumbuhannya 4,34 persen.

2. Rasio Jenis Kelamin/*Sex Ratio*

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kota Sabang adalah sebesar 102 persen, menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Begitu pula *sex ratio* menurut kecamatan, memiliki nilai diatas dari 100 persen. *Sex ratio* Kecamatan Sukajaya lebih rendah dari Kecamatan Sukakarya. Tabel 2.7 menunjukkan *sex ratio* per kecamatan di Kota Sabang tahun 2020.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kota Sabang menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	SUKAJAYA	11.161	10.992	22.153	102
2	SUKAKARYA	10.120	9.793	19.913	103
TOTAL		21.281	20.785	42.066	102

Sumber: BPS, 2022.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kota

Sabang antara tahun 2017– 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kota Sabang yaitu 337 jiwa/Km². Rata-rata Laju Pertumbuhan kepadatan penduduk di Kota Sabang pada periode 2017–2020 yaitu 6,50%. Sementara, Kepadatan Penduduk di Kota Sabang Tahun 2021 sebesar 275 jiwa/Km² dengan laju pertumbuhan negatif dari tahun 2020 yaitu -18,40 persen.

Berdasarkan unit kecamatan, Kecamatan Sukajaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, melebihi rata-rata Kota Sabang yaitu sebesar 275 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukakarya lebih rendah yaitu sebesar 273 jiwa/Km². Jumlah penduduk yang besar di Kecamatan Sukajaya tersebut juga didukung oleh wilayah yang luas dibandingkan dengan Kecamatan Sukakarya, sehingga kepadatan penduduk cenderung tinggi. Berdasarkan lokasinya, kecamatan dengan kepadatan tinggi sebagian besar tersebar di bagian tengah Kota Sabang, di mana sebagai pusat pengembangan permukiman baru dan perekonomian.

Tabel 2.8

Kepadatan Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)					Laju Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	SUKAJAYA	283	287	289	332	277	-2,12
2	SUKAKARYA	274	274	281	363	273	-0,36
TOTAL		279	283	285	337	275	-1,43

Sumber: BPS, 2021 dan Hasil Analisis.

4. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur

Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/usia produktif/usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/tidak produktif.

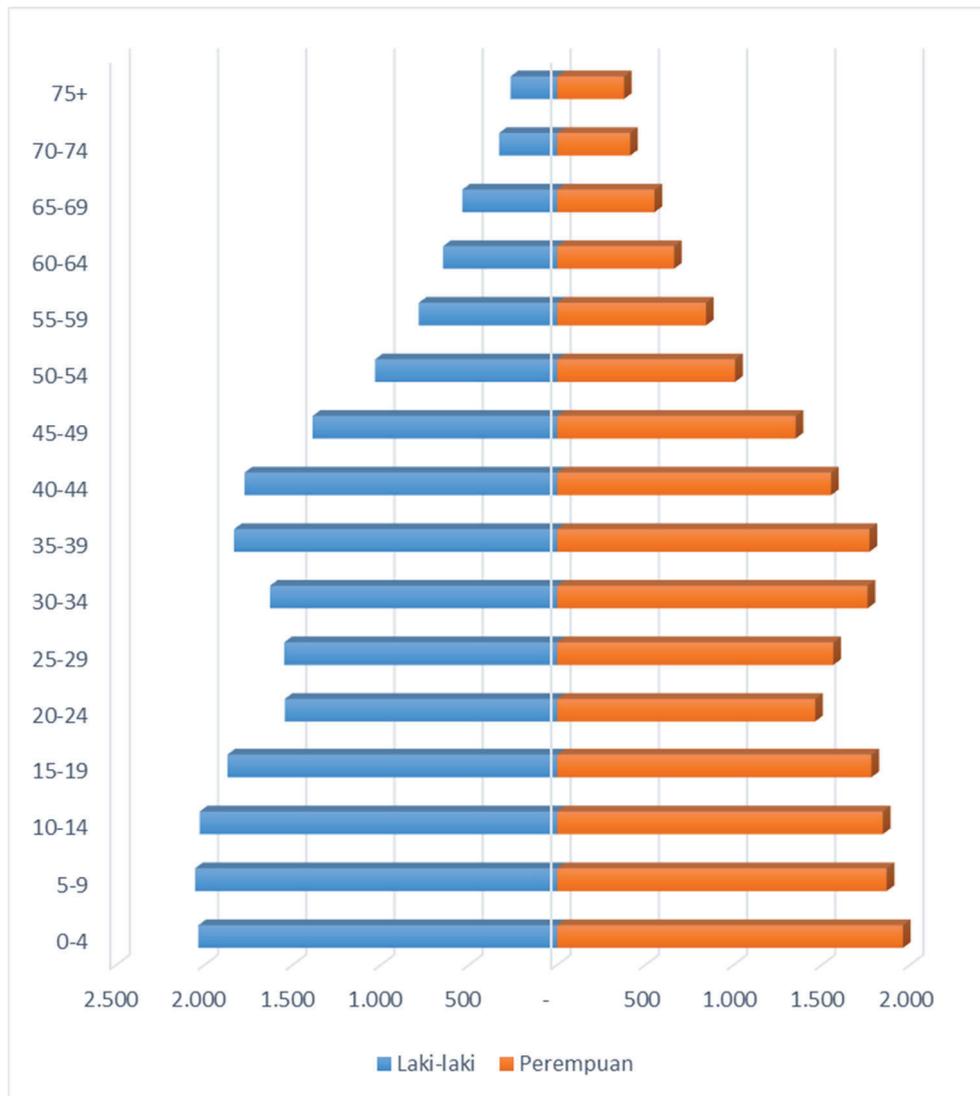
Berdasarkan data yang ada, penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2021 menunjukkan dominasi pada penduduk usia produktif. Penduduk pada kelompok umur 0–4 tahun jumlahnya paling banyak, yakni mencapai 3.995 jiwa (9,50 persen), sedangkan penduduk kelompok umur +75 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 642 jiwa (1,53 persen). Apabila dilihat dari kelompok penduduk menurut umur, maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*).

Tabel 2.9
Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Total (Jiwa)
1	0-4	2.034	1.961	3.995
2	5-9	2.053	1.869	3.922
3	10-14	2.026	1.847	3.873
4	15-19	1.869	1.782	3.651
5	20-24	1.544	1.463	3.007
6	25-29	1.547	1.566	3.113
7	30-34	1.628	1.760	3.388
8	35-39	1.832	1.771	3.603
9	40-44	1.772	1.553	3.325
10	45-49	1.386	1.352	2.738
11	50-54	1.032	1.009	2.041
12	55-59	784	844	1.628
13	60-64	646	663	1.309
14	65-69	537	552	1.089
15	70-74	328	414	742
16	75+	263	379	642
Jumlah Total		21.281	20.785	42.066

Sumber: BPS, 2022

Perbandingan kelompok penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun) di Kota Sabang pada tahun 2021 adalah 66,09 persen. Sementara sisanya 37,85% ada penduduk usia tidak produktif dimana 28,03% merupakan penduduk dengan usia muda (dibawah 15 tahun) dan 5,88% merupakan penduduk yang berada di atas usia 65 tahun.



Gambar 2.3
Grafik Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2021 (%)

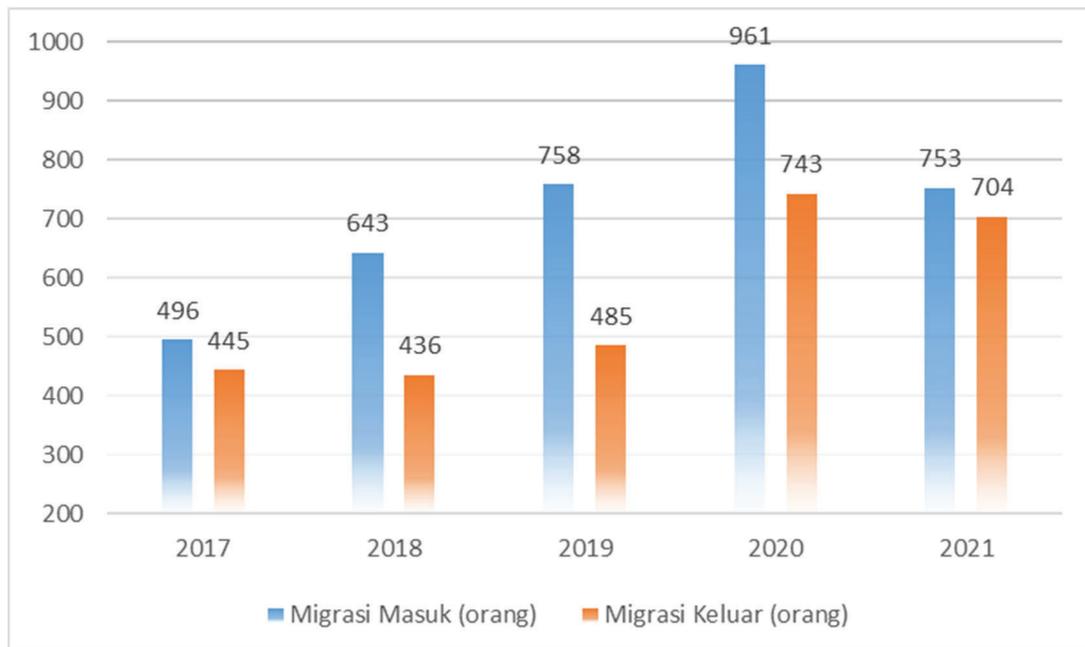
B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Sabang, secara keseluruhan jumlah migrasi keluar lebih sedikit dibandingkan dengan migrasi masuk. Tahun 2021 jumlah migrasi keluar dan migrasi masuk, cenderung naik secara signifikan.

Tabel 2.10
Migrasi di Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Jenis Migrasi	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan (%)
1	Migrasi Masuk (orang)	496	643	758	961	753	11.00
2	Migrasi Keluar (orang)	445	436	485	743	704	12.15
Jumlah Total		941	1079	1243	1704	1457	11.55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, 2021



Gambar 2.4
Grafik Migrasi Penduduk di Kota Sabang Tahun 2017-2021

C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah Kota Sabang. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;

(2) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; serta (3) Sektor tersier berupa jasa.

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lap. Usaha

No	Lapangan Pekerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	<i>Agriculture</i> (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) (Jiwa)	2.231	2.014	1.981	2.156	2.410
2	<i>Manufacture</i> (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, Air dan Bangunan/ Konstruksi) (Jiwa)	2.300	2.873	3.197	4.012	3.459
3	<i>Service</i> (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) (Jiwa)	11.553	10.404	11.893	11.026	9.835
Jumlah Total		16.084	15.291	17.071	17.194	15.704

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan data di atas, lapangan pekerjaan bidang perdagangan, jasa dan keuangan mendominasi jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk Kota Sabang dari tahun 2017 hingga 2021, yaitu sebesar 62,63% dari total penduduk bekerja pada tahun 2021. Sementara itu, penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian/perikanan) sebesar 15,35 % dan sektor sekunder (industri manufaktur) sebesar 22,03 % dari penduduk bekerja pada tahun 2021. Sementara, tren pertumbuhan penduduk yang berkerja berdasarkan lapangan usaha sejak tahun 2017-2021 lapangan usaha *agriculture* dan *manufacture* menunjukkan tran positif dengan besaran masing masing 1,95% dan 10,74%. Sektor *service* tren negatif dengan besaran pertumbuhannya -3,95%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, kemiskinan, kriminalitas); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan

indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator- indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

- PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.12
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
Kota Sabang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 x	2021 xx
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	70,53	72,65	75,81	76,58	77,52
B	Pertambangan dan Penggalian	9,98	9,23	8,99	9,03	9,06
C	Industri Pengolahan	25,04	25,95	26,66	26,25	26,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	2	2,18	2,35	2,32	2,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,44	1,53	1,88	1,77	1,81
F	Konstruksi/Construction	299,22	327,2	361,1	357,1	359,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	155,7	164,26	169,16	167,27	170,4
H	Transportasi dan Pergudangan	38,16	39,75	38	34,94	37,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,35	35,13	36,85	31,65	31,08
J	Informasi dan Komunikasi	21,7	22,73	23,82	25,82	27,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,16	24,19	25,68	26,04	25,91
L	Real Estat	39,18	40,34	41,71	41,91	43,17
M,N	Jasa Perusahaan	2,83	2,87	2,92	2,8	2,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	167,78	176,08	181,73	173,73	182,46
P	Jasa Pendidikan	41,6	44,03	48,34	49,89	51,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,88	67,98	72,09	75,59	82,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	17,83	18,93	20,46	20,21	20,44
Produk Domestik Regional Bruto		1.015,38	1.075,03	1.137,56	1.122,89	1.152,87

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Tabel 2.13
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Berlaku 2010
Kota Sabang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 x	2021 xx
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	87,08	91,17	95,81	97,55	100,62
B	Pertambangan dan Penggalian	11,17	10,49	10,52	10,76	10,96
C	Industri Pengolahan	32,51	33,88	34,75	34,09	35,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,06	2,28	2,5	2,46	2,46
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,14	2,43	3,08	2,92	2,99
F	Konstruksi	387,93	455,93	529,47	530,47	538,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	196,14	210,31	223,11	225,42	233,98
H	Transportasi dan Pergudangan	47,37	50,15	49,29	45,59	49,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,13	49,82	53,14	45,15	44,81
J	Informasi dan Komunikasi	23,3	24,38	25,66	27,66	29,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,1	33,53	36,35	37,23	38,25
L	Real Estat	46,56	48,93	52,29	52,69	54,77
M,N	Jasa Perusahaan	3,23	3,32	3,41	3,26	3,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	208,41	223,96	236,08	228,08	244,54
P	Jasa Pendidikan	49,32	53,97	63,64	66,59	70,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,91	79,65	86,64	95,14	107,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	21,1	23,59	25,84	26,34	27,5
Produk Domestik Regional Bruto		1.272,5	1.397,8	1.531,6	1.531,4	1.595,3

Sumber: BPS Kota Sabang, 2021

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Sabang tahun 2017-2021 didominasi sektor-sektor tersier. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kota Sabang yang merupakan wilayah destinasi wisata dan sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sektor primer menjadi sektor dengan kontribusi terendah di Kota Sabang disebabkan terbatasnya lahan pertanian maupun pertambangan. Laju Pertumbuhan PDRB di Kota Sabang ditunjukkan pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.5. Berdasarkan grafik pada gambar tersebut, terlihat bahwa PDRB Kota Sabang semakin meningkat.

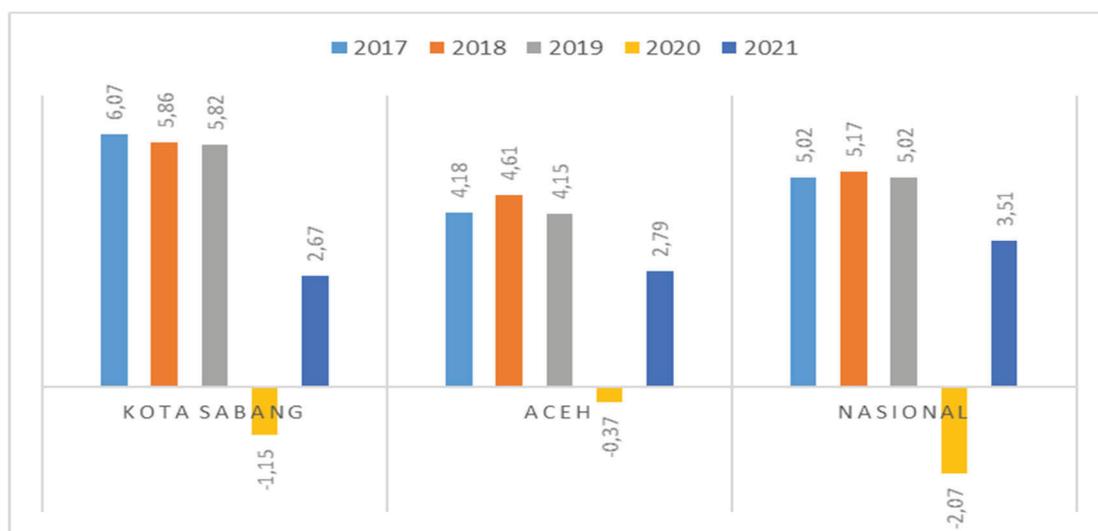
Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,22	3,01	4,36	1,01	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,06	-7,52	-2,58	0,4	0,38
C	Industri Pengolahan/	4,17	3,62	2,75	-1,56	0,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,14	8,99	7,61	-1,02	-0,49
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,14	6,12	23,41	-5,89	2,19
F	Konstruksi	7,11	9,35	10,36	-1,11	0,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,8	5,49	2,99	-1,12	1,88
H	Transportasi dan Pergudangan/	4,83	4,18	-4,4	-8,07	8,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,43	5,36	4,88	-14,11	-1,78
J	Informasi dan Komunikasi	5,6	4,72	4,82	8,4	6,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,77	4,44	6,14	1,41	-0,49
L	Real Estat	4,98	2,96	3,4	0,48	3
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	1,45	1,65	-3,94	0,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,2	4,95	3,21	-4,4	5,03
P	Jasa Pendidikan	4,86	5,84	9,78	3,21	3,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	3,19	6,05	4,85	9,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,87	6,17	8,07	-1,22	1,11
Produk Domestik Regional Bruto		6,07	5,87	5,82	-1,29	2,67

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Rata-rata laju pertumbuhan tahun 2021 sebahagian besar kembali naik, laju pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan sosial sekitar 9,25%. Sektor ini masih mendominasi akibat masih disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan upaya preventif masyarakat semakin tinggi baik dalam upaya membeli obat-obatan maupun alat pelindung. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha terendah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -1,78%. Ini diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan ke Kota Sabang selama Pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2017–2021) menunjukkan kinerja yang signifikan jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) kecuali tahun 2020. Meskipun naik, namun LPE Kota Sabang masih di bawah LPE Nasional dan Prov. Aceh dan PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.



Gambar 2.5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang, Aceh dan Nasional

Jika pada tahun 2019 LPE Kota Sabang mencapai 5,82%, maka pada tahun 2020 angka LPE menurun mencapai -1,15%. Secara keseluruhan, LPE Kota Sabang lebih tinggi daripada LPE Nasional. Rata-rata LPE Kota Sabang selama enam tahun terakhir adalah sebesar 4,29%, sedangkan rata-rata LPE Prov. Aceh dan Nasional berada pada kisaran 2,52% dan 3,82%. Seiring dengan dampak dinamika ekonomi global dan regional, dari tahun 2015 sampai 2019 LPE Kota Sabang cenderung naik dan LPE Provinsi Aceh cenderung berfluktuatif, sedangkan LPE Nasional cenderung mengalami penurunan, dan kembali membaik pada tahun 2016 dan 2018. Khusus Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan turun di semua level.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Sabang tahun 2021 kembali naik mencapai 2,67%, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 dengan pertumbuhan -1,15%. Pada

tahun 2021, dari 17 kategori ekonomi, hanya 3 kategori yang mengalami pertumbuhan negatif. Sepuluh kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif. Hal tersebut dikarenakan kondisi Kota Sabang sudah mulai membaik walaupun dalam Pandemi COVID-19 dan masih berdampak pada berbagai sektor dan daerah, khususnya Kota Sabang.

- PDRB berdasarkan Pengeluaran

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).



Gambar 2.6
Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Kota Sabang menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021

Tabel 2.15
PDRB ADHB Kota Sabang Tahun 2017-2021

Jenis Pengeluaran	2017		2018		2019		2020		2021	
	ADHB	ADHK								
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	696,20	515,56	754,87	538,83	811,08	560,33	827,77	557,73	841,49	560,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	73,58	55,54	83,08	61,05	92,89	67,56	93,81	66,09	94,38	65,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.014,94	709,78	987,60	693,59	1.013,23	699,96	933,41	629,59	969,10	646,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	982,73	755,66	1.011,98	765,04	1.048,64	783,98	1.057,34	774,32	1.080,09	780,12
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	1.272,5	1.015,38	1.397,8	1.075,03	1.531,6	1.137,56	1.531,4	1.122,89	1.595,3	1.152,87

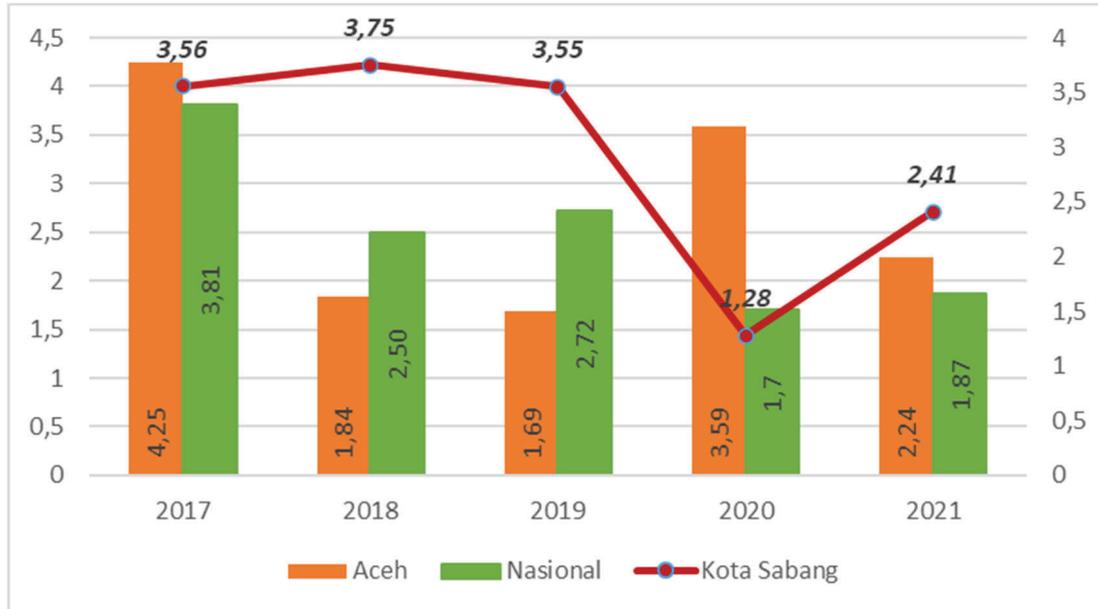
Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

2. Laju Inflasi Kota Sabang

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau; Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan dan Olahraga; serta Kelompok Transportasi dan Komunikasi. Di samping pengelompokan berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, BPS juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi yang menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi IHK dikelompokkan menjadi Inflasi Inti (komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi faktor fundamental) seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen serta Inflasi Non Inti (komponen inflasi yang cenderung tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental) yang

terdiri dari inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) dan inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*).



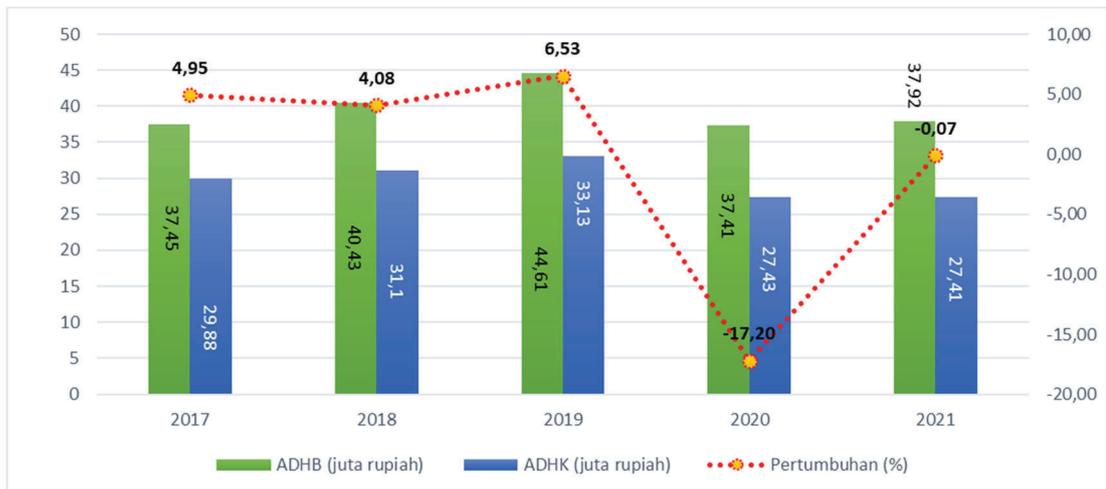
Gambar 2.7

Laju inflasi Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (persen)

Inflasi Kota Sabang pada tahun 2017-2020 cenderung naik, pada tahun 2017 dimana inflasi tahunan meningkat dari 3.56% tahun 2018 naik menjadi 3,75%. Tahun 2019 dan tahun 2020 kembali turun menjadi 3,55% dan 1,25% berlanjut tahun 2021 naik menjadi 2,41%. Selama enam tahun, kondisi inflasi di Kota Sabang disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dimana jumlah penduduk berbanding terbalik dengan jumlah PDRB per kapita, semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.



Gambar 2.8
PDRB per Kapita Kota Sabang Tahun 2017-2021

Berdasarkan data BPS tahun 2022, PDRB perkapita Kota Sabang atas dasar harga konstan sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan dan tahun 2021 naik kembali namun tidak signifikan. Kenaikan angka PDRB per Kapita dipengaruhi faktor inflasi.

PDRB Kota Sabang mengalami peningkatan cukup tinggi, namun secara riil, PDRB per kapita tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2017-2019 kecuali tahun 2020 dan 2021. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita namun peningkatan ini diimbangi naiknya harga barang dan jasa sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Sabang digunakan pendekatan teori *Gini Ratio* yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio Gini antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,35$ → pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ → pemerataan/ketimpangan sedang/moderat
- $G > 0,50$ → pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Tabel 2.16
Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Sabang Tahun 2015-2021

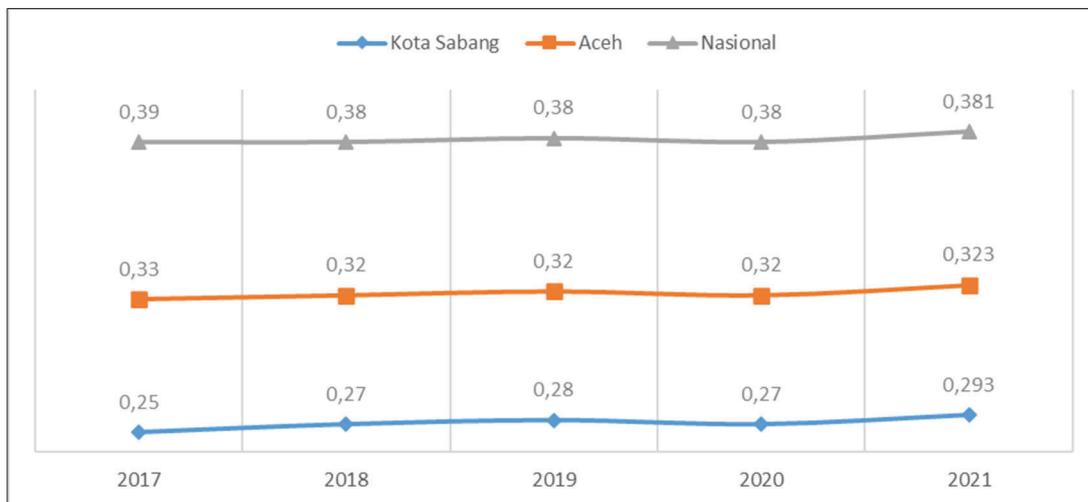
Tahun	Indeks Gini		
	Kota Sabang	Aceh	Nasional
2017	0.247	0.329	0.391
2018	0.277	0.325	0.384
2019	0.281	0.319	0.380
2020	0.271	0.323	0.381
2021	0,293	0,323	0,381

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Tiga hal yang mempengaruhi tingginya rasio gini. Pertama, *unequal opportunity*, yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit'. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.

Tren Rasio Gini di Kota Sabang sejak tahun 2017 sampai 2021 cenderung menunjukkan tren terus naik kecuali tahun 2020. Tahun 2017 Rasio Gini 0,247 dan tahun 2018 sampai 2019 kembali naik dengan nilai masing-masing 0,277 dan 0,281. Tahun 2020 Rasio Gini kembali turun menjadi 0,271 dan kembali naik menjadi 0,293 tahun 2021. Penurunan *gap*/kesenjangan yang menyempit dalam perekonomian penduduk di Kota Sabang yang harus dipertahankan atau terus diperkecil. Turunnya Rasio Gini ini terjadi sebagai dampak program penanganan covid yang langsung menyentuh masyarakat dan didukung dari tersedianya program jaring pengaman sosial lainnya, seperti adanya bantuan gas dan listrik bagi KK miskin, bantuan pendidikan, bantuan kematian, bantuan bagi balita (geunaseh), kartu sehat, kartu pintar, yang sangat mempengaruhi turunnya angka Rasio Gini di Sabang.

Tren kenaikan rasio gini di Kota Sabang lebih dipengaruhi oleh besaran pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40% terbawah dan kelompok 20% teratas menalami kenaikan, sementara penduduk kelompok 40% menengah mengalami penurunan pengeluaran perkapita per bulan.



Gambar 2.9
Indeks Gini Kota Sabang, Aceh, dan Nasional Tahun 2017-2021

5. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kilo kalori per kapita/hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Sabang yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2017, garis kemiskinan makanan Kota Sabang setara Rp 523.705/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2018 setara Rp 552.272/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 563.100/kapita/bulan tahun 2019, 599.381/kapita/bulan tahun 2020 dan Rp.620.373/kapita/orang pada tahun 2021.

Kota Sabang memiliki garis kemiskinan tertinggi setelah Kota Banda Aceh, persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Sabang kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2016, penduduk miskin sebesar 17,33 persen, meningkat menjadi 17,66 persen pada tahun 2017, menurun 16,31 persen pada tahun 2018 , 15,60 tahun 2019 dan kembali menurun tahun 2020 sebesar 14,94% dan kembali naik menjadi 15,53% tahun 2021.

Pengukuran derajat kesejahteraan rakyat dilihat dari tingkat kemiskinan mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dan aspek Garis Kemiskinan (ketimpangan pendapatan) Kota Sabang bergerak lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya anggaran belanja Kota Sabang. Artinya dalam lima tahun terakhir pembangunan Kota Sabang belum mendorong perubahan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Tabel berikut menunjukkan fakta bahwa kesenjangan sosial yang terjadi disebabkan karena ketimpangan pendapatan rakyat.

Tabel 2.17
Keadaan Tingkat Kemiskinan Kota Sabang

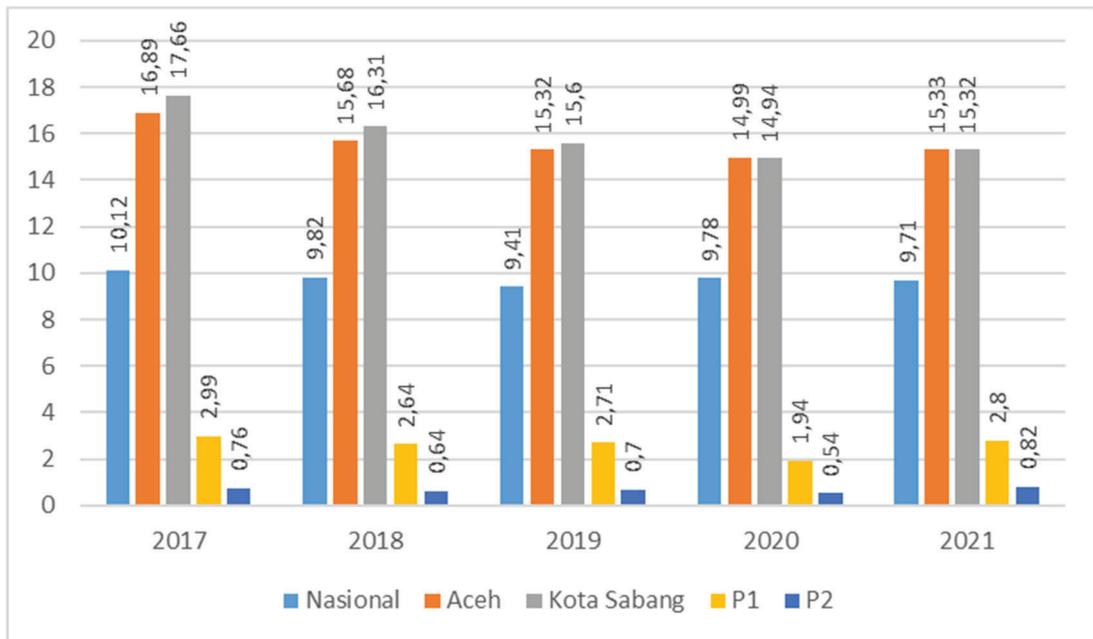
Tahun	Jlh Pend Miskin dlm 1000	Persentase Penduduk Miskin	Indeks kedalaman P1	Indeks keparahan P2	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)
2017	5,9	17,66	2,99	0,76	523.705
2018	5,6	16,31	2,64	0,64	552.272
2019	5,4	15,60	2,71	0,70	563.100
2020	5,2	14,94	1,94	0,54	559.381
2021	5,3	15,32	2,80	0,82	620.373

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Sabang pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan mencapai 2,80 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1,94. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin rendah nilai indeks ini maka semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin menurun nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin baik.

Sementara angka keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan angka menunjukkan angka 0,82 jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada angka 0,54. Angka Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Berdasarkan tingkat kemiskinan di atas, jumlah penduduk Kota Sabang di atas kemiskinan pada tahun 2021 adalah 84,68%. Perkembangan persentase penduduk Kota Sabang di atas kemiskinan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.10
 Prosentase Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kota Sabang, Aceh dan Nasional 2017-2021

6. Angka Kriminalitas

Kriminalitas sebagai variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat juga menjadi visualisasi tidak sejahteranya masyarakat. Jadi ada hubungan *reciprocal* antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Sabang. Angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut adalah angka kriminalitas Kota Sabang pada tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2.18
 Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Narkoba (kasus)	17	18	27	27	13
2.	Pembunuhan (kasus)	0	0	1	0	1
3.	Seksual (kasus)	7	3	2	5	3
4.	Penganiayaan (kasus)	8	19	7	6	12
5.	Pencurian (kasus)	12	23	11	7	9

6.	Penipuan (kasus)	13	7	6	4	9
7.	Pemalsuan uang (kasus)	3	0	0	0	0
8.	Kriminal Lainnya (kasus)	8	5	14	7	21
9.	Jumlah Tindak Kriminal (kasus)	67	75	68	56	55
10.	Jumlah Penduduk	33.978	34.571	34.874	41.197	42.066
11.	Angka Kriminalitas (9)/(10)*10.000	19,72	21,69	19,49	13,59	13,07

Sumber: Polres Kota Sabang dan Disdukcapil Tahun 2022

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (Polisi/Kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2017 sebanyak 67 kasus dengan jumlah penduduk 33.978 dan 75 kasus tahun 2018 dan 68 kasus pada tahun 2019. Sementara tahun 2020 angka kriminalitas di Kota Sabang sebesar 56 kasus. Sementara Tahun 2021 jumlah kriminal 55 kasus.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa selama kurun waktu dari tahun 2017 hingga 2021 angka kriminalitas yang tertangani di Kota Sabang fluktuatif dari rata-rata 19-20 kasus yang terjadi dari 10.000 penduduk pada tahun 2017-2019 menjadi rata-rata 13-14 kasus dari 10.000 penduduk pada tahun 2020-2021.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2021 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

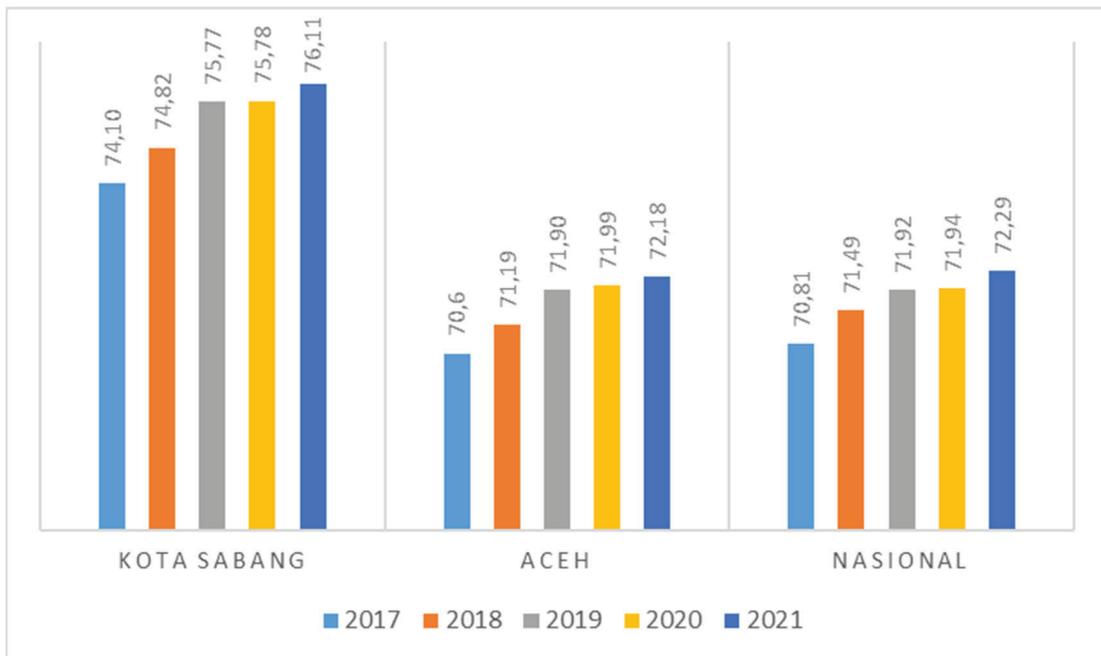
A. Indek pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2017-2021, pembangunan manusia di Kota Sabang terus mengalami peningkatan. Pada tabel dan gambar di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2017, capaian IPM Kota Sabang adalah sebesar 74,10 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,11 pada tahun 2021. Angka IPM Kota Sabang secara umum lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Aceh yang sebesar 72,18 ditahun 2021. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 2,01 poin selama periode tersebut.

Tabel 2.19
Indikator IPM di Kota Sabang Tahun 2017–2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (tahun)	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18
Pengeluaran per Kapita/bulan (Juta Rupiah)	10,610	10,899	11,444	11,273	11,780
IPM	74,10	74,82	75,77	75,78	76,11

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022



Gambar 2.11
Perkembangan IPM Kota Sabang, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah: Angka Harapan Hidup (e0) Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), kombinasi APK serta

PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni :

- Mengganti Angka Melek Huruf (AMH) dengan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita.
- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Pencapaian IPM Kota Sabang dalam 5 tahun terakhir masuk kedalam kategori Tinggi dengan angka capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Sabang, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

B. Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi manajemen pendidikan pasca perubahan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan, dimana untuk tingkat pendidikan menengah telah beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan

handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Tabel 2.20
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Melek Huruf (%)	98,03	98,16	98,46	98,76	99,08
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18
3.	Angka Partisipasi Kasar (%)					
	PAUD	49,92	63,94	66,20	68,33	75,49
	SD/MI	110,01	116,69	110,33	110,57	110,75
	SMP/MTs	100,95	105,81	106,49	104,63	103,4
4.	Angka Partisipasi Murni (%)					
	SD/MI	99,97	99,83	99,65	99,77	99,75
	SMP/MTs	95,12	92,32	93,15	91,68	91,99
5.	Angka Partisipasi Sekolah (%)					
	SD/MI	100	99,83	99,85	99,96	100
	SMP/MTs	100	100	99,42	99,32	100

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni.

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Sabang. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Dari data diatas terlihat bahwa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kota Sabang dari tahun 2017 sampai 2021 terus meningkat, dan masing-masing tahun 2021 sebesar 99,08% dan 11,18 tahun. Sementara APK, APM dan APS untuk tingkat PAUD dan SD/MI menunjukkan tren terus meningkat. Sementara untuk jenjang SMP/MTs mengalami penurunan diakibatkan adanya dominasi mencari sekolah yang berada di luar Kota Sabang.

APK PAUD semakin lama semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa kesadaran orangtua untuk memberikan pendidikan secara dini di Kota Sabang semakin baik. Sedangkan akibat penerapan pembatasan usia masuk pendidikan dasar dan sistem zonasi telah menunjukkan hasil positif pada realisasi APK dan APM pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.

C. Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu faktor kesehatan lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit serta peningkatan upaya-upaya preventif dan promotif kesehatan. Dan untuk menunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional, Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan Kesehatan di Kota Sabang telah terlayani 100 %.

Tabel 2.21
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kematian bayi (<1tahun)	3	3	8	8	8
	Jumlah kelahiran hidup	412	731	677	706	684
	Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)	7,28	4,1	11,8	6,8	5,4
2.	Jumlah kematian balita	0	1	1	0	2
	Jumlah kelahiran hidup	412	731	677	706	684
	Angka kematian balita (AKB)/1.000 kelahiran hidup	0	1,36	1,4	0	1,3
3.	Jumlah kematian ibu	0	2	0	1	3
	Jumlah kelahiran hidup	412	731	677	706	684
	AKI/10.000	0	27.35	0	14,16	43,8
4.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56

5.	Jumlah balita gizi buruk	3	4	13	8	2
	Jumlah balita yang ditimbang	2.259	2.205	2.175	3.412	3987
	Prevalensi balita gizi buruk/100	0,1	0,2	0,6	0,23	0,2
6.	Jumlah balita stunting	69	540	447	394	480
	Jumlah balita yang di ukur	300	2.037	2.781	3.417	3987
	Prevalensi balita stunting (%)	29,8	26,5	16,07	11,5	12

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Tahun 2022

Berdasarkan data sesuai tabel di atas terlihat bahwa indikator angka kematian balita fluktuatif dan cenderung naik dari tahun 2017 yang sebesar 0 menjadi 1,4 poin pada tahun 2019 dan 0 pada tahun 2020 dan kembali naik menjadi 1,3 poin pada tahun 2021. Demikian juga dengan jumlah kematian bayi, tahun 2017 dan 2018 jumlah kematian bayi 3 kasus dan tahun 2019 sampai 2021 pada angka 8 kasus. Sedangkan untuk persentase gizi buruk tahun sejak tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 0,1 poin pada tahun 2017 (sebanyak 3 balita) menjadi 0,6 poin atau sebanyak 13 balita pada tahun 2019, dan tahun 2020 sebesar 0,23 poin atau 8 balita dan terus menurun menjadi 2 balita pada tahun 2021. Hal ini bukan disebabkan permasalahan kurangnya konsumsi gizi namun lebih disebabkan karena sosial ekonomi yang kurang, pengetahuan tentang gizi yang masih minim, juga adanya penyakit infeksi karena perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi dan usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi dan balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan.

D. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai

dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Dalam lingkup Kota Sabang, TPT dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung naik dari 3% tahun 2017, 4,21% tahun 2018, 4,60% tahun 2019, 4,81% tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 3,56%. Secara umum TPT Kota Sabang lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Aceh yang sebesar 6,30% tahun 2021, dan sedikit lebih baik dibandingkan TPT nasional sebesar 6,49% tahun 2021. Artinya banyak angkatan kerja di Kota Sabang yang terserap di pasar kerja. Hal ini disebabkan karena LPE Kota Sabang yang cenderung terus meningkat, sehingga menarik minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Sabang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun diantaranya kurang berbekal dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai.

Lapangan usaha di sektor Jasa Kemasyarakatan merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kota Sabang pada tahun 2021. Sebanyak 62,63% bekerja pada sektor ini. Sektor kedua yang paling banyak diminati penduduk Kota Sabang adalah sektor *manufacture*, yang digeluti oleh penduduk sekitar 22,03%. Lapangan usaha sektor jasa dan perdagangan sangat diminati masyarakat usia angkatan kerja karena lebih mudah dan tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai usahanya.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Sabang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran diatas 65-73 %. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65-73 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. meningkatnya angka TPAK ini terjadi karena masih terbukanya lapangan usaha terutama sektor jasa dan perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk usia kerja.

Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2017 hingga 2021 secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.22
TPT dan TPAK Nasional, Aceh dan Kota Sabang Tahun 2017-2021

Tahun	TPT (%)			TPAK (%)		
	Nasional	Aceh	Sabang	Nasional	Aceh	Sabang
2017	5,50	6,57	3,00	69,02	63,74	69,52
2018	5,34	6,36	4,21	67,26	64,24	65,82
2019	5,28	6,20	4,60	67,49	63,36	72,66
2020	7,07	5,42	4,81	68,01	65,1	71,55
2021	6,49	6,30	3,56	67,80	63,78	63,71

Sumber: BPS Sabang, 2022

Beberapa faktor penyebab angka TAPK di Kota Sabang cenderung fluktuatif disebabkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Sabang cenderung fluktuatif, sehingga kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di tahun 2020, tercatat 87 grup kesenian yang dibina Pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari bidang keolahragaan terdapat 24 organisasi olahraga. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dari tahun 2017-2021 telah diupayakan secara bertahap, baik sarana dan prasarana olahraga yang berada di gampong ataupun sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Sabang, antara lain pembangunan Gelanggang Olahraga perbaikan sarana prasarana olahraga lainnya, seperti perbaikan lapangan sepakbola.

Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat serta pemanfaatan sarpras Olahraga oleh masyarakat secara swakarsa.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kota Sabang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1). Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan kewenangan ; 2). Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib sesuai kewenangan Pemerintah Kab/Kota (meskipun belum semuanya dapat disajikan karena masih dalam masa transisi penerapannya).

Ke 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah: (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun; (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; (5) Menjamin Kesetaraan Gender serta Memberdayakan Seluruh Wanita Dan Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan dan moderen bagi semua orang; (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan; (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara; (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera; (15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati; (16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan; dan (17) Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas , antara lain:

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan keutuhan pendidikan yang berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Sabang, Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 sampai dengan 2020 adalah:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung meningkat, meski menurun pada tahun 2018 dan 2019. Sementara tahun 2020 jumlah siswa TK/RA mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI tidak kurang dari 7 tahun. Sehingga orang tua cenderung menunda pendidikan PAUD, sehingga ketika melanjutkan ke jenjang SD dapat memenuhi kriteria batas usia memasuki Pendidikan dasar pada usia 7 tahun. Namun demikian APK PAUD usia 4-6 tahun pada tahun 2017 sampai 2021 meningkat yaitu sebesar 75,49 persen karena meningkatnya jumlah siswa pra TK/RA. Hal ini memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDG's yang sama pada tujuan ke-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Jumlah Pendidik PAUD relatif meningkat dari 119 guru tahun 2015 menjadi 137 guru tahun 2019, sementara tahun 2020 jumlah guru sebanyak 135 orang dan berkurang menjadi 132 orang pada tahun 2021.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar 9 tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. APK dan APM SD/MI meningkat pada tahun 2021 masing-masing menjadi sebesar 110,75% dan 99,75% dengan Angka putus sebesar 0 % untuk jenjang SD. Sedangkan APK dan APM SMP/MTs pada tahun 2021 sebesar 103,4% dan 91,99% dengan angka Putus Sekolah sebesar 0 % dan angka kelulusan pada tahun 2021 sebesar 100%. Persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 tahun 2021 sebesar 92,76% dan SMP/MTs sebesar 100%.

Pelayanan urusan pendidikan dibidang sarana bangunan gedung juga menjadi perhatian bersama. Untuk jenjang SD/MI Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2021 sebesar 72,10 %, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs realisasinya lebih baik, yaitu sebesar 68,4 %.

3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya pendidikan non formal, maka Kota Sabang sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang sekolah dasar sebanyak 6 sekolah, Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, jumlah kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi 2 lembaga secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1.	APS SD/MI/Pkt.A	100	99,83	99,85	99,96	100
2.	APS SMP/MTs/ Pkt B	100	100	99,42	99,32	100
3.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI (per 1000 penduduk)	8,61	6,42	5,97	5,67	7,5
4.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs (per 1000 penduduk)	8,67	6,16	4,96	4,91	6,2
5.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	69,91	65,07	68,40	78,10	72,1
6.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	58,4	55,06	49,48	61,18	68,4
7.	Rasio guru/murid sekolah SD/MI	122,29	99,18	107,00	101,3	99,42
8.	Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs	184,44	152,24	144,8	145,0	135,8
9.	APtS SD/MI	0	0	0,04	0	0
10.	APtS SMP/MTs	0	0	0,16	0	0
11.	AL SD/MI	100	100	100	100	100
12.	AL SMP/MTS	100	100	100	100	100
13.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
14.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100
15.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun (%)	98,03	98,16	98,46	98,76	99,08
16.	Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada SD/MI	87,59	55,32	77,8	78,3	92,76
17.	Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada SMP/MTs	99,07	90,25	98,64	98,94	100
Indikator SDG's						
1.	APM SD/MI (Tujuan 4 Target 1)	99,97	99,83	99,65	99,77	99,75
2.	APM SMP/MTs (Tujuan 4 Target 1)	95,12	92,32	93,15	91,68	91,99
3.	SD/MI terakreditasi minimal B (Tujuan 4 Target 1)	58,06	58,06	58,06	58,06	99,34

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	SMP/MTs terakreditasi minimal B (Tujuan 4 Target 1)	83,3	91,7	91,7	91,7	100,0
5.	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	110,01	116,69	110,33	110,57	110,75
6.	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	100,95	105,81	106,49	104,63	103,4
7.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18
8.	APK PAUD (Tujuan 4 Target 2)	52,83	65,44	53,96	68,33	75,49
9.	Persentase Guru SD/MI Bersertifikasi (Tujuan 4 Target C)	51,34	54,02	56,51	59,35	60
10.	Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikasi (Tujuan 4 Target C)	62,40	66,11	69,23	69,53	70

Sumber: BPS Kota Sabang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, 2022

Capaian indikator kinerja daerah (IKD) untuk bidang urusan pendidikan di Kota Sabang tahun 2021 sebesar 76,47% (13 indikator) meningkat dari tahun 2020. Sementara IKD tahun 2021 yang menurun dari tahun 2020 sebesar 23,52% (4 indikator). Indikator yang menurun yaitu kondisi bangunan baik dan rasio guru terhadap jumlah murid. Hal ini terjadi karena penambahan jumlah murid belum diimbangi dengan jumlah bangunan sekolah dan guru. Jumlah bangunan belum diperlukan adanya penambahan karena komposisi jumlah bangunan dan guru terhadap murid dianggap masih dalam kondisi ideal.

Sementara itu, capaian indikator SDGs untuk bidang urusan pendidikan di Kota Sabang tahun 2021 sebesar 90% (9 indikator) meningkat dari tahun 2020. Sementara indikator SDGs tahun 2021 yang menurun dari tahun 2020 sebesar 10% (1 indikator). Indikator yang menurun yaitu angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP/MTs. Hal ini terjadi disebabkan siswa jenjang SD/MI yang telah lulus memilih melanjutkan pendidikannya di luar dari Kota Sabang baik ke sekolah formal maupun pesantren.

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Urusan Pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2021

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam	100	100	100	100

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
	Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)				
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	284	260	246	389
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	63,94	66,20	68,33	60,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, 2022

Capaian target SPM bidang pendidikan di Kota Sabang tahun 2020 telah menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan 2019 baik partisipasi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan maupun PAUD. Berbagai program dilakukan Pemerintah Kota Sabang untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan dasar bidang pendidikan baik peningkatan sarpras pendidikan, beasiswa pendidikan, dan peningkatan SDM peserta didik.

B. Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja Kota Sabang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya: sebagai kota Bebas Malaria.

Berkaitan dengan gizi, isu global dan nasional yang muncul adalah penanganan *stunting*. Kota Sabang sebagaimana daerah lain saat ini telah melaksanakan program penanganan *stunting* (GEUNASEH), yang pelaksanaannya diantaranya dengan kolaborasi pemanfaatan dana kota dan dana gampong.

Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2017-2021, diantaranya:

Tabel 2.25
Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,1	0,2	0,6	0,4	0,2
2.	Angka usia harapan hidup (tahun)	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)(per 1000 kelahiran hidup)	7,28	4,1	11,8	6,8	0,008

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
4.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	10,03	10,55	10,87	10,84	10,87
5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,76	1,73	1,72	1,69	1,9
6.	Rasio Pustu (per 1000 penduduk)	3,53	3,47	2,29	2,28	2,5
7.	Rasio Rumah Sakit per satuan (per 1000 penduduk)	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56
8.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	1,15	1,38	1,03	1,14	1,05
9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82	83,0	75,0	80,9	100
11.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
12.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
14.	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
15.	Angka kejadian malaria tertangani	100	100	100	100	100
16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
17.	Cakupan kunjungan bayi (%)	74,2	65,44	67,81	83,11	94,32
18.	Cakupan pelayanan Rujukan masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100
Indikator SDG's						
1.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Tujuan 2.Target 1.1.(a)) (%)	ND	5	10	5,5	11,3
2.	% kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (Tujuan 2.Target 2.1*)	29,8	26,5	16,07	11,5	12
3.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi kurang)	ND	2,31	3,1	5,5	5,6

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
	dan obesitas) (Tujuan 2.target 2.1.(a)) (%)					
4.	Prevalensi Ibu hamil anemia (Tujuan 2.Target 2.2.(a))	0	0	0	0	11,7
5.	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Tujuan 2 Target 2 .2.(b))	ND	33	26	28	37
6.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (Tujuan 3.Target 1.1*)	100	100	100	100	100
7.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Tujuan 3.Target .1.2*)	0	273,60	0	141,64	0,03
8.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.(Tujuan 3.Target.2.1*)	0	1,36	1,4	0	0,002
9.	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (3.2.2*)	100	99,18	100	100	80,95
10.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (Tujuan 3.Target.2.2(a))	7,28	4,1	11,8	11,3	0,008
11.	Kelurahan UCI (Tujuan3. Target.2.2.(b)) (%)	55,6	0	59	25	0
12.	Prevalensi HIV (Tujuan 3.Target.3.1(a))	0	0	0	0	0
13.	Angka keberhasilan pengobatan TB+ (Tujuan 3.Target.3.1(b)) (%)	96	80	93	94	93
14.	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (Tujuan 3.Target.3.1(b))	100	100	100	100	100
15.	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (Tujuan 3.Target. 3.1(b)) (%)	ND	ND	25	13	20
16.	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (Tujuan 3. Target.3.3*)	0	0	0,08	0,11	0,02
17.	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100
18.	Jumlah Kasus Hepatitis B (Tujuan 3.Target.3.4.(a))	0	0	0	0	0
19.	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang, 2021

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk bidang urusan kesehatan di Kota Sabang tahun 2021 sebesar 88,8% (16 indikator) meningkat lebih baik dari tahun

2020. Sementara IKD tahun 2021 capaian kinerja yang menurun dari tahun 2020 sebesar 5,5% (1 indikator). Indikator yang menurun yaitu rasio dokter terhadap jumlah penduduk dan rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Hal ini terjadi karena penambahan jumlah penduduk belum diimbangi dengan jumlah bangunan puskesmas dan rumah sakit. Belum diperlukan adanya penambahan karena komposisi jumlah puskesmas dan rumah sakit dianggap masih dalam kondisi ideal.

Sementara itu, capaian indikator SDGs untuk bidang urusan kesehatan di Kota Sabang tahun 2020 sebesar 52,63% (10 indikator) capaiannya menurun dari tahun 2020. Sementara indikator SDGs tahun 2021 yang capaiannya menurun dari tahun 2020 sebesar 47,361% (9 indikator). Indikator yang menurun yaitu prevalensi Prevalensi kekurangan gizi, malnutrisi, Prevalensi Ibu hamil anemia, Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan Angka keberhasilan pengobatan TB+.

Masih terdapatnya 5,6% prevalensi malnutrisi di Kota Sabang disebabkan oleh pendapatan keluarga, jumlah saudara dalam keluarga dan pendidikan orang tua (pola asuh). Kasus kematian ibu tahun 2020 terdapat 1 kasus yang disebabkan tekanan psikis selama kehamilan. Persentase kelurahan UCI di Kota Sabang masih rendah karena keyakinan masyarakat terhadap imunisasi masih rendah akibat dari isu vaksin mengandung unsur haram.

Tabel 2.26
Capaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: (jumlah Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar/Jumlah Sasaran Ibu Hamil) x 100%	85	82	84	78,5
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin: (jumlah yang dilayani sesuai standar/jumlah sasaran ibu hamil) x 100%	83	76	80	77,5
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir: (jumlah bayi yang dilayani sesuai standar (KN1)/jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup))x100%	85,80	80,12	83,55	80,95
4.	Pelayanan Kesehatan Balita: (jumlah balita yang dilayani sesuai standar/jumlah balita) x 100%	39,71	35,08	31,63	42,47
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: (jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang dilayani/jumlah	100	100	50	22

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
	sasaran anak pada usia pada pendidikan dasar)x100%				
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif: (jumlah pengujung usia 15-59 tahun/jumlah warga negara usia 15-59 tahun)x 100%	20,37	9,8	15,47	77,3
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: (jumlah pengujung usia ≥ 60 tahun/jumlah warga negara usia ≥ 60 tahun)x 100%	31,3	32,9	45,6	41
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi: (Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota)x100%	6,6	19,8	7,6	16
9.	Pelayanan kesehatan Penderita Diabeter Melitus (DM): (Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota)x100%	4,3	8,6	6,1	11
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat: (jumlah ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar/Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi)x100%.	100	100	100	100
11.	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB):	8,6	9,2	9,7	6

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
	(Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang /Jumlah orang yang terduga TBC)x100%				
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: (jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar /Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota)x100%	100	0	100	0

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang, 2022

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Sabang sebagai kota kepulauan dengan ciri fisik perkotaan dan perdesaan, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Prioritas utama pembangunan pada bidang urusan pekerjaan umum adalah pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah serta penanganan abrasi pantai.

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Sabang dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam), rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan lain-lain. Berikut tabel yang menggambarkan capaian indikator bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, adalah:

Tabel 2.27
Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	87,76	89,3	89,3	94,98	89,72
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,6	0,59	0,58	0,57	0,57
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)					
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)(%)	84,15	86,72	90,12	92,95	94,11
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	63,15	63,38	64,77	67,53	72,83
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	81,30	81,3	90,89	91,39	95,88
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	11,49	10,82	9,69	7,12	7,28
8	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	61,54	61,54	61,54	84,62	84,62
9	Persentase penduduk berakses air minum (%)	75,46	75,90	91,75	91,83	89,87
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	89,23	89,61	89,99	90,36	89,87
11	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,40	0,3	0,26	0,19	0,28
12	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,9	2,81	2,78	2,78	2,78
13	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,28	0,28	0,28	0,37	0,35
14	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,240	0,24	0,24	0,42	0,3

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
15	Ketaatan terhadap RTRW (%)	65,43	65,43	65,43	65,93	65,95
16	Ruang Publik yang berubah peruntukan (%)	0	0	0	0	0
Indikator SDG's						
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90,86	95,20	97,13	97,04	97,85
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	83,69	91,65	89,71	89,20	95,88
3	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	13,71	10,68	7,68	4,71	4,14
4	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	61,59	64,42	65,67	67,98	86,6
5	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	18	18	18	18	18
6	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (%)	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis, 2022

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk bidang urusan Pekerjaan Umum di Kota Sabang tahun 2021 sebesar 31,25% (5 indikator) meningkat lebih baik dari tahun 2020. Sementara IKD tahun 2021 capaian kinerja yang menurun dari tahun 2020 sebesar 31,25% (5 indikator). Indikator yang menurun yaitu rasio panjang jalan dan akses air minum. Hal ini terjadi karena kecepatan penambahan jumlah penduduk belum dimbangi dengan kesiapan sarpras air minum. Panjang ruas jalan di Kota Sabang sampai dengan tahun 2021 terus di tingkatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung pengembangan wilayah dan perekonomian masyarakat.

Pencapaian indikator SDGs dari bidang pekerjaan umum belum dari tahun 2017-2021 menunjukkan tren peningkatan. Capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan sanitasi layak masing-masing 97,85% dan 95,88%. Pencapaian ini terwujud dikarenakan adanya keterpaduan program pemerintah pusat, pemerintah kota dan pemerintah gampong dalam penuntasan permasalahan air bersih dan sanitasi dalam mekanisme kolaborasi program. Selain itu, hal tersebut perlu upaya percepatan Pemerintah Kota Sabang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan memaksimalkan dukungan anggaran baik melalui APBK Kota Sabang, APBA melalui Dana kekhususan (DOKA dan MIGAS), APBN maupun CSR.

Tabel 2.28
Capaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2021

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari: (jumlah rumah tangga yang dilayani air minum sesuai standar/jumlah rumah tangga)x100%	75,9	91,75	91,83	89,87
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik: (jumlah rumah tangga yang dilayani limbah domestik sesuai standar/jumlah rumah tangga)x100%	98,81	98,81	98,83	95,88

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis, 2022

Pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kota Sabang saat ini melalui SPAM dengan jaringan perpipaan yang dikelola PDAM Tirta Aneuk Laot dan SPAM yang langsung dikelola pihak gampong. Dengan optimalisasi SPAM di Pria Laot dan Waduk Paya Seunara dan PDAM Kota Sabang, serta pembangunan reservoir di beberapa lokasi yang tersebar diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Sabang akan terpenuhi.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020 untuk urusan perumahan 100% meningkat dibandingkan tahun 2019, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusan perumahan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami

penyesuaian judul dan atau formula sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran Permendagri 86/2017 yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Sabang.

Rasio permukiman layak huni di Kota Sabang terus mengalami peningkatan dari 0,95 tahun 2020 meningkat menjadi 0,97 tahun 2021. Selain itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni juga terus meningkat dari 95,6% tahun 2020 menjadi 96,0% tahun 2021. Untuk indikator lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2020 sebesar 0,19% dan semakin meningkat tahun 2021 sebesar 0,28. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.29
Indikator Bidang Perumahan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi KK MBR (%)	29,92	34,32	41,09	48,52	53,11
2	Rasio permukiman layak huni	0,91	0,93	0,93	0,95	0,97
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	86,5	93,2	94,9	95,6	96,0
4	Persentase permukiman yang tertata (%)	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0,4	0,3	0,26	0,19	0,28
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	55,02	55,02	37,66	20,30	20,30
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	10,68	10,68	7,68	4,71	4,14
8	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	72,22	77,78	83,33	88,89	71,64
9	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	8961	9491	9751	10011	7394
10	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	75,46	75,90	91,75	93,5	95,0
11	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100
12	Rumah tangga ber sanitasi (%)	81,30	87,66	90,89	92,0	95,88
13	Rumah layak huni (%)	86,5	93,2	94,9	96,0	96,0

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis data, 2022

Pencapaian maksimal Indikator Kinerja Bidang Perumahan di Kota Sabang disebabkan adanya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengagendakan kegiatan-kegiatan strategis beserta pembiayaan yang maksimal, seperti penataan kawasan kumuh, penyiapan jamban bagi masyarakat MBR, optimalisasi penyediaan air bersih dan agenda promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan. Selain itu pemerintah Kota Sabang dalam menjalankan agendanya berkolaborasi dengan berbagai stakeholder baik BUMN, gampong, LSM dan pihak terkait lainnya.

Tabel 2.30
Capaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2018-2021

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	3	26	32	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	-	33	36	0

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis data, 2022

Selain pencapaian target IKD, pemenuhan target indikator SPM di Kota Sabang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2021, baik penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni maupun fasilitas rumah bagi masyarakat terkena relokasi.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih menjadi persoalan seperti pencetus kriminalitas atau gangguan trantibmas. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan, termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang menjadi linmas.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang sering terjadi di Kota Sabang adalah, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, sehingga kesiapsiagaan bencana menjadi hal penting dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam mensiagakan diri menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat diantaranya diwujudkan melalui pembentukan Gampong Siaga Bencana (GSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana. Kinerja dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Rasio Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk	95,1	93,4	88	98	98
2	Persentase penanganan PERDA (%)	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81,8	80	34,8	54,5	58
5	Jumlah SDM kebencanaan yang terlatih (%)	35	47	47	58	58
6	Persentase wilayah terbangun prasarana pengendali banjir	62	69	77	85	85
7	Jumlah prasarana pencegahan bahaya kebakaran	2	3	3	3	3
8	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100
Capaian SPM						
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	100	100	100	100	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos, PMG, PP dan PA; BPBD, 2022

F. Sosial

Pembangunan pada urusan sosial ditujukan untuk menekan angka kemiskinan. Angka Kemiskinan Kota Sabang terus mengalami penurunan, hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kinerja capaian indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Bidang Sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan PMKS dari tahun 2017-2021 secara persentase tertangani secara keseluruhan. Kemudian untuk PMKS yang memperoleh bantuan fluktuatif dari 24,4% pada tahun 2017 menjadi 54,61 % pada tahun 2020. Perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2017–2021 fluktuatif namun cenderung meningkat.

Pencapaian indikator bidang sosial lainnya yaitu PMKS yang mendapat perlindungan sosial dengan capaian 100%, dengan bantuan keringanan biaya rekening listrik, gas 3Kg, biaya kematian, biaya pendidikan, geunaseh dan lain-lain yang meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Penurunan persentase penduduk tahun 2021 diatas garis kemiskinan menjadi indikasi bahwa pendapatan masyarakat mengecil dengan berkurangnya lapangan kerja dan semakin tingginya harga pokok dibandingkan tahun 2020 dan penduduk miskin di Kota Sabang kembali meningkat.

Tabel 2.32
Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2015-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase PMKS penerima bantuan (%)	24,4	23,5	50,82	54,61	
2	Miskin (orang)	5.980	5.620	5.430	5.270	5.330
3	Penyandang disabilitas (orang)	-	-	335	335	397
4	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (orang)	-	-	274	280	253
5	Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
7	Keluarga penerima program PKH (KPM)	1.020	1.851	1.834	1.558	1.372
8	Persentase anak terlantar yang tertangani (%)	100	100	100	100	100
10	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	82,34	83,69	84,4	85,06	84,68
Indikator SDG's						
1	Angka Kemiskinan (%)	17,66	16,31	15,60	14,94	15,32
2	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100
3	Jumlah PMKS yang tertangani yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (orang)	0	0	0	2	2

Sumber: Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang, 2021

Tabel 2.33
Capaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2018-2021

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti (%)	0	0	0	0
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti (%)	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti (%)	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti (%)	24,20	0	0	0
5.	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang, 2022

Pencapaian target SPM bidang sosial Kota Sabang pada tahun 2021 telah maksimal dengan capaian 100% pada indikator rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Sementara untuk penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan diluar panti tidak ada di Kota Sabang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Sasaran pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.34
Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	0	0	0	0	0
2	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	7,80	35,75	34,36	34,95	23,12
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,52	65,82	72,66	71,55	63,71
Indikator SDG's						
1	Persentase peningkatan upah minimum kota (%)	18,01	8	8,74	7,80	0
2	Persentase jumlah penganggur (%)	3,00	4,21	4,60	4,81	3,56

Sumber: BPS Kota Sabang dan DPMPNTAKER Kota Sabang, 2022

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 63,71% menurun dari tahun 2020 sebesar 71,55%. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Menurunnya TPAK Kota Sabang tahun 2021 disebabkan menurunnya jumlah angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat. Penurunan angkatan kerja disebabkan karena pada tahun 2021 lebih banyak usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja, karena berstatus masih sekolah/kuliah dan lainnya.

Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Sabang, membaiknya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang yang sebelumnya terganggu akibat pandemi Covid-19, mengakibatkan pulihnya peluang kerja yang mendukung pariwisata seperti perhotelan/*homestay*, rumah makan, travel dan suvenir. Terlihat tingkat

pengangguran terbuka (TPT) di Kota Sabang tahun 2021 menurun menjadi sebesar 3,56% dari tahun 2020 sebesar 4,81%.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Sabang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 0,783 pada tahun 2019 menurun menjadi 0,772 pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat pada tahun 2020 yaitu 56,75% dan tahun 2019 sebesar 38,30%. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Peningkatan dari sisi penawaran tersebut salah satunya disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat pendidikan pada pekerja perempuan. Sementara dari sisi permintaan, terjadi peningkatan disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang membaik (dari sisi produksi) sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja perempuan. Fenomena lain yang makin mendorong masuknya perempuan ke lapangan kerja adalah karena makin tingginya biaya hidup bila hanya ditopang oleh satu penyangga pendapatan keluarga.

Selain itu pemerintah juga semakin serius dalam memperhatikan kepentingan/kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat, hal ini bisa diperhatikan dari semakin banyaknya forum-forum anak yang terbentuk. Langkah lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan pemberian pendampingan kepada perempuan, khususnya bagi yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan untuk lebih berdaya secara ekonomi. Selain itu juga akan diadakan pembekalan terhadap siswi menengah terkait peran perempuan dalam pembangunan.

Tabel 2.35
Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	51,33	51,40	53,15	53,12	53,16
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	30	30	30	25	25
3	Rasio KDRT (%)	0,459	0,677	0,783	0,772	0,096

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	40,31	38,32	38,30	56,75	57,01
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas, mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	100	100	100	100	90
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	90
9	Persentase penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100
10	Tingkat pemenuhan kebutuhan esensial anak	100	100	100	100	100
11	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia kerja (%)	40,31	38,32	38,30	56,75	57,01
12	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100
13	Jumlah Pengaduan Perempuan Korban kekerasan	1	4	3	6	14
14	Jumlah Pengaduan Anak Korban Kekerasan	15	12	9	3	11
15	Indek Pembangunan Gender (IPG)	95,83	95,97	95,47	95,81	95,60
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	78,53	78,51	76,01	75,43	75,66
Indikator SDG's						

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	0	0,084	0,09
2	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	100	100	100	100	90

Sumber: Dinsos, PMG, PP & PA Kota Sabang & BPS, 2022

C. Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Kelurahan mandiri pangan tahun 2021 terkendala oleh kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum sehingga tidak dapat mengajukan bansos-hibah. Begitu juga dengan kelancaran akses pangan masyarakat miskin, juga terhambat dari prosedur kegiatan yang harus melalui pengajuan bansos-hibah. Selebihnya kinerja pada urusan pangan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Ketersediaan pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	25,26	26,58	140,03	405,45	405,45
Indikator SDG's						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (poin)	43,50	43,75	82,4	85,7	87,0
2	Jumlah Desa Rawan Pangan (gampong)	1	0	0	0	4
3	Produksi tanaman pangan (ton)	425,3	321	258,5	421,8	194,6

Sumber: Dinas P2, Disperindakop dan UKM, Bulog, BPS dan olahan, 2022

Pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) bidang pangan tahun 2020 terus meningkat, yaitu ketersediaan pangan utama tahun 2019 sebesar 140,03Kg/Jiwa/Tahun meningkat 405,45Kg/Jiwa/Tahun pada tahun 2020 dan 2021. Ketersediaan pangan secara serempak dipengaruhi oleh stok bahan pangan. Bahan pangan utama Kota Sabang masih sangat tergantung dari daratan. Dengan ketersediaan moda transportasi yang memadai maka impor bahan pangan utama tidak menjadi kendala.

D. Pertanahan

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan

pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Sabang.

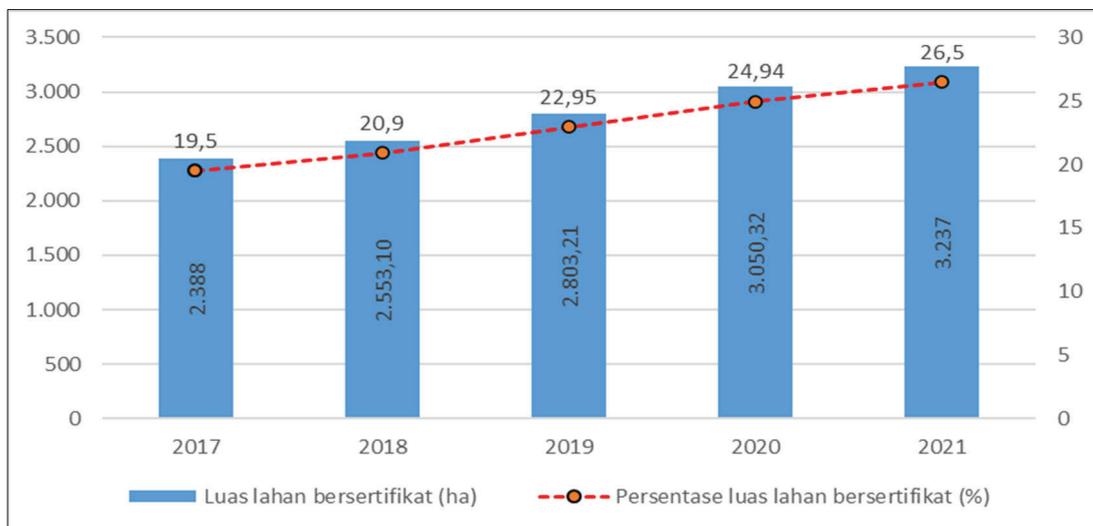
1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah

Tiga indikator pertanahan yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasa meragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.

Tabel 2.37
Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Luas lahan bersertifikat (ha)	2.388	2.553,1	2.803,21	3.050,32	3.237
Luas wilayah (ha)	12.213,97	12.213,97	12.213,97	12.213,97	12.213,97
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	19,5	20,9	22,95	24,94	26,50

Sumber: BPN Kota Sabang dan pengolahan, 2022



Gambar 2.12
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Sabang mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Tercatat seluas 2.388 hektar lahan bersertifikat di tahun 2017 kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 3.237 hektar lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,90%. Peningkatan juga terlihat dari persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, yakni 24,94% pada tahun 2020 meningkat menjadi 26,50% pada tahun 2021.

2. Penyelesaian Kasus Tanah

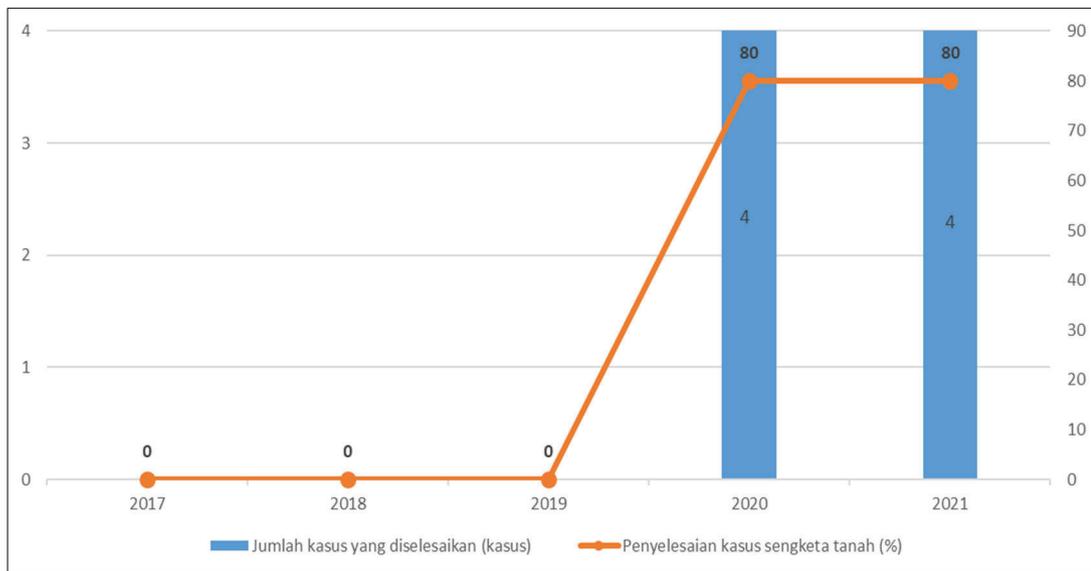
Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Secara umum, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan tidak ada kasus yang dapat terselesaikan seluruhnya (100%). Untuk tahun 2020-2021 penyelesaian kasus pertanahan hanya mencapai 80%. Hal tersebut dapat mengindikasikan masih adanya kasus pertanahan yang sekaligus mengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahan di Kota Sabang.

Tabel 2.38
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kasus yang diselesaikan (kasus)	0	0	0	4	4
Jumlah kasus yang terdaftar (kasus)	0	0	1	5	5
Penyelesaian kasus sengketa tanah (%)	0	0	0	80	80

Sumber: BPN Kota Sabang dan hasil pengolahan, 2022



Gambar 2.13
Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2017-2021

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.39
Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah izin lokasi (izin)	0	0	0	0	0
Jumlah permohonan izin lokasi (izin)	0	0	0	0	0
Penyelesaian izin lokasi (%)	0	0	0	0	0

Sumber: Sekda Kota Sabang dan hasil pengolahan, 2022

E. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu kinerja yang terlihat adalah sampai dengan Tahun 2020 Kota Sabang belum berhasil memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota.

Selain itu kinerja pada urusan lingkungan hidup dapat diukur dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang kompositnya terdiri dari IKA, IKU, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan di daerah dan menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Terlihat pada dua tahun terakhir, bahwa Indeks Kualitas Air terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan status mutu air dalam kondisi kurang baik, belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan.

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2017-2021, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (ada/tidak ada)	tidak ada				
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	tidak ada	ada	ada	ada	ada

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	tingkat daerah (ada/tidak ada)					
3	Timbulan sampah yang tertangani (%)	90,85	81,72	74,63	79,09	81,8
4	Persentase cakupan area pelayanan (%)	83,47	87,47	88,60	90,20	90,65
5	Luas lahan yang dikonservasi (%)	47,8	43,5	45,3	47,9	46,8
6	tersedianya Dokumen SLHD (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada
7	Jumlah ekowisata dan Jasa lingkungan (%)	20	21	23	5	5
8	Hasil pengukuran kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu (%)	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Indikator SDG's						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	51,90	72,72	77,99	72,8 (baik)
2	Indeks Kualitas Udara	-	-	90,48	93,30	94,15 (sangat baik)
3	Indeks Kualitas Air	-	64,0	77,62	78,86	56,67 (tercemar ringan)
4	Timbulan sampah yang tertangani (%)	90,85	81,72	74,63	79,09	81,8%
5	Luas lahan yang dikonservasi (%)	47,8	43,5	45,3	47,9	46,8
6	persentase limbah b3 tertangani	47,06	69,23	73,68	78,14	78,14
7	Proporsi luas kawasan lindung terhadap luas wilayah	63,88	63,88	63,88	63,30	63,30

Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kota Sabang, tahun 2022

Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam kondisi baik dengan 72,8 poin. IKLH ini di tentukan oleh Indeks Kualitas Udara menunjukkan kinerja sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 94,15%, penurunan ini disebabkan oleh banyaknya aktifitas kendaraan bermotor, kontruksi dan aktifitas industri.

Sedangkan kinerja Indeks Kualitas Air juga mengalami penurunan namun masih dalam batas baku mutu kelas II. Ini disebabkan oleh topografi Kota Sabang yang berada di pesisir pantai yang merupakan alur tempat pembuangan limbah yang berdampak di beberapa sumber air, sehingga status mutu air dalam kondisi tercemar.

Selain itu juga belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, sehingga hal ini juga mempengaruhi kualitas sumber air.

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Tabel 2.41
Indikator Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Tingkat Validasi Database Kependudukan (%)	98	95	98	98	98
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	85	88	92	95	94,39
3	Rasio keluarga memiliki Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	100
4	Rasio bayi memiliki Akta Kelahiran (%)	91,2	90,9	98,3	98	98,21
5	Rasio Pasangan memiliki Akta Nikah (%)	28,2	43,7	71,6	-	80,57
6	Rasio Penduduk memiliki NIK (%)	100	100	100	100	100
7	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	-	-	68	100	99,04
9	Persentase pemanfaatan data kependudukan (%)	-	-	20	20	60

Sumber: DisdukCapil Kota Sabang, 2022

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Sabang sudah baik. Untuk sisa sebesar 2% pada validasi database, kemungkinan hal itu berasal dari data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Sedangkan sejumlah 5% penduduk yang belum berKTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2020 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.42
Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase Desa Mandiri (SDG's) (%)	-	-	16,67	16,67	16,67
2	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	95	94,44	94,44	94,44	94,44
3	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	8	8	8	8	8
4	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos, PMG, PP dan PA, 2022

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Dukungan terhadap Kampung KB diantaranya dengan pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) .

Untuk mempersiapkan Bonus Demografi yang ditandai jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), Kota Sabang akan menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang meliputi 5 bidang, yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan, agar dapat membangun kualitas manusia dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.43
Indikator Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	3,41	1,06	1,75	5,48
Indikator SDG's						
2	Cakupan peserta KB aktif (3.7.1*) (Jumlah Peserta KB Aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x100	65,3	67,3	70,24	59,63	49,93
3	Rasio Akseptor KB per 1000 PUS (Tujuan 1.Target 4.1.(c))	0,88	0,44	0,24	0,21	0,316
4	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	29	29	25	29	29

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB, 2022

Keikutsertaan akseptor KB di Kota Sabang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendorong (pendidikan dan sosial ekonomi), faktor pemukim (jumlah PLKB), dan faktor penguat (dukungan masyarakat atau perangkat gampong). Tingkat pemahaman, pendidikan, dan kepedulian Keuchik, Tuha Peut, tokoh agama, atau tokoh masyarakat terhadap program KB sangat di butuhkan untuk menunjang kesuksesan akseptor KB. Pendidikan masyarakat dan perangkat gampong yang rendah berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam menjadi akseptor KB menjadi rendah. Mayoritas kesejahteraan keluarga berada pada tingkat Keluarga Sejahtera I dan II. Peran aktif dan jumlah PLKB di Kota Sabang juga perlu di optimalkan.

I. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik namun tetap ramah terhadap lingkungan. Salah satu kinerja pada urusan perhubungan adalah pemanfaatan moda transportasi massal.

1. *Angkutan Umum Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota.*

Jaringan jalan di Kota Sabang belum keseluruhan terlewati angkutan umum. Sehingga persentase jaringan jalan di Kota Sabang terlewati angkutan umum baru mencapai 71,77%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan yang diukur

menggunakan panjang jalan. Adapun panjang jaringan jalan di Kota Sabang adalah sebanyak 202.236 meter sedangkan jaringan jalan yang terlayani adalah 145.147 meter untuk kendaraan umum.

2. *Rasio Izin Trayek*

Indikator persentase izin trayek untuk lingkup Kota Sabang sangat kecil, yaitu 4 izin dengan rasio 0,01. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah tidak adanya terminal untuk angkutan umum sehingga angkutan yang ada melayani untuk seluruh Kota Sabang tanpa menggunakan trayek yang ada. Angkutan umum di Kota Sabang merupakan angkutan yang tidak terikat dengan trayek yang biasanya melakukan pelayanan dari rumah ke rumah.

3. *Jumlah Uji Kir Angkutan Umum*

Pada tahun 2017-2021

Unit pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang belum memiliki fasilitas berupa gedung uji, alat uji dan sistem informasi manajemen PKB sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang tidak lagi melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Untuk mengakomodir pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan wajib uji di Kota Sabang, Dinas Perhubungan Kota Sabang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah memiliki Unit Pengujian Berkala yang telah terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan rekomendasi numpang uji dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang sebagai daerah registrasi kendaraan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang akan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengawasan dan pendataan kendaraan wajib uji, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan dan penilaian terhadap penghapusan kendaraan di wilayah Kota Sabang.

4. *Kepemilikan KIR Angkutan Umum*

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Sabang dan belum tentu berdomilisi di Kota Sabang, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang beraktifitas wilayah Kota Sabang.

Kepemilikan KIR angkutan umum belum mencapai 40% dari wajib KIR. Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Perhubungan perlu melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kesadaran pemilik angkutan umum dalam kepemilikan KIR, melalui sosialisasi dan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Sabang adalah 30 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 10 menit, penyetakan plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit untuk masing-masing kendaraan. Tabel menunjukkan lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kota Sabang pada tahun 2017-2021.

6. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dari tahun ke tahun terus diupayakan dari berbagai sumber pendanaan, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang cenderung bertambah dan masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi rambu-rambu, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak atau hilang. Indikator pelayanan bidang perhubungan dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 2.44
Indikator Pelayanan Bidang Perhubungan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan darat sesuai standar	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
2	persentase pemenuhan sarpras perhubungan laut sesuai standar	70,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	78,00	78,00	80,00	83,00	0
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.178.722	1.249.080	867.413	730.189	878.472
5	Rasio izin trayek	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	27,38	0	0	0	0
7	Jumlah terminal:					

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal Bus ▪ Pelabuhan Laut ▪ Pelabuhan Udara ▪ Pelabuhan Penyeberangan 	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2
		1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1
8	Angkutan Darat (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9	Kepemilikan KIR angkutan Umum (yang tidak memiliki kir)(%)	68,48	60,74	60,74	60,74	60
10	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	30	30	30	30	30
11	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rupiah)	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000
12	Pemasangan rambu-rambu (%)	77,11	77,11	77,11	80	41

Sumber: Dishub Kota Sabang, 2022

J. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017, urusan komunikasi dan informatika memiliki 5 (lima) indikator, yakni jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah.

Saat ini akses terhadap komunikasi dan informasi semakin mudah dan terjangkau oleh masyarakat antara lain melalui *free hotspot* dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah, sehingga pemanfaatan wartel dan warnet menjadi kurang efektif. Data perkembangan terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.45
Indikator Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sabang
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	39,13	39,13	39,13	33,96	35

2	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	0	0,00	12,50	25,00	25,00
3	Jumlah Wifi di area publik (lokasi)	7	8	10	12	12
4	Jumlah surat kabar nasional	3	2	2	2	2
	Jumlah surat kabar lokal	4	3	3	3	3
5	Jumlah penyiaran:					
	▪ Radio Nasional:	1	1	1	1	1
	▪ Radio Lokal	1	1	1	1	1
	▪ TV Lokal	-	-	-	-	-
	▪ TV Nasional	2	2	2	2	2
6	Web site milik pemko	15	31	31	31	31
7	Keterlibatan Pemko dalam event:					
	▪ Event tingkat lokal	1	3	3	3	3
	▪ Event regional	3	4	4	4	4
	▪ Event nasional	1	1	1	1	1
	▪ Event internasional					
8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100
9	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	75	75	75	80	80

Sumber: Dishubkominfo dan Disbudpar Kota Sabang, 2022

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Jumlah koperasi di Kota Sabang cenderung fluktuatif tapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017, jumlah koperasi yang ada adalah sebanyak 63 unit dan

tahun 2018 dan 2019 meningkat sebanyak 79 unit dan 81. Sementara tahun 2020 dan 2021 masing-masing jumlah koperasi 90 dan 92 unit.

Sedangkan persentase koperasi aktif menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 koperasi aktif sebesar 71% pada tahun 2017 dan 49,4% Tahun 2019. Sementara tahun 2020 dan 2021 jumlah koperasi aktif di Kota Sabang kembali naik sejumlah 63,33 % dan 56,52% koperasi.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Pada tahun 2020 peningkatan usaha mikro dan kecil sebanyak 2 % dari tahun 2019 dan naik 1% Tahun 2021. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.46
Koperasi Aktif di Kota Sabang Tahun 2017 -2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	45	45	40	57	52
2	Jumlah Koperasi (unit)	63	79	81	90	92
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	71	55,96	49,4	63,33	56,52
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase koperasi yang sudah RAT	31,74	14,22	27,71	14,94	19,56
2	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	52,94	-	57,00	67,59	69,23
3	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	2,50	2,80	2,80	4,50	7,40
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	67,05	65,12	73,37	91,13	92,07
5	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	1,50	1,90	1,90	2,00	2,05

Sumber: Desperindagkop dan UMKM Kota Sabang, 2022

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor PMDN dan PMA

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Penanaman modal yang ada di Kota Sabang banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Sabang sebagai Pariwisata di Provinsi Aceh dengan morfologi kepulauan berkembang..

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di bawah merupakan jumlah kumulatif perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Sabang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Kota Sabang.

2. Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA

Sejalan dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terus meningkat setiap tahun, nilai investasi yang ditanamkan di Kota Sabang juga menunjukkan penurunan yang cukup besar dari tahun 2017-2018. Pada tahun tahun 2020 nilai investasi PMDN dan PMA masing masing sebesar Rp. 8.782.000.000 dan Rp. 55.000.000. Untuk Tahun 2021 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 34.700.000.000 dan PMA sebesar Rp.3180.037.084

Tabel 2.47

Realisasi Jumlah PMDN dan PMA di Kota Sabang Tahun 2017 -2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PMDN	2	2	4	14	15
2	PMA	2	-	3	22	4
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase Investor yang menanam Modal	75,00	80,00	85,00	93,00	87,00
2	Presentase Promosi Penanaman Modal	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	0,60	0,64	0,75	0,45	0,50

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: DPMPTSPNAKER Kota Sabang , 2022

M. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Tabel 2.48
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Organisasi Pemuda (organisasi)	9	9	21	11	7
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (kali)	7	6	6	3	5
3	Jumlah Organisasi Olahraga (organisasi)	53	54	50	32	42
4	Jumlah Kegiatan Olahraga (kali)	53	54	50	0	1
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	-	NA	NA	30,15	30,15
2	persentase cabang olah raga yang berprestasi	-	20,00	25,00	0,00	0,00
3	persentase pembinaan kepramukaan	100	100	100	100	100

Sumber: Kesbangpol dan Dispora Kota Sabang, 2022

Penetapan status Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-2021 berdampak pada pembatasan aktivitas yang bersifat pengumpulan masa. Ketetapan ini menyebabkan agenda even olah raga dan kepemudaan di Kota Sabang berkurang.

N. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Sedangkan gedung kesenian dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kesenian & kebudayaan di Kota Sabang, untuk itu diperlukan fasilitas yang representatif sesuai standar pagelaran. Selengkapnya dapat terlihat dari tab.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya (kali)	2	5	6	1	0
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (gedung)	2	2	2	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	12	12	12	6	6
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki (unit)	116	116	116	116	116
5	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	10,34	10,34	10,34	5,17	5,17
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
2	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	-	19,13	24,95	25,00	0
3	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,34	10,34	10,34	5,17	5,17
4	Persentase penyelenggaraan Adat Istiadat	100	100	100	100	100

Sumber: Disdikbud Kota Sabang dan MAA Kota Sabang, 2022

O. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Sabang sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 tetap. Berikut ini merupakan tabel terperinci tentang jumlah perpustakaan di Kota Sabang dari tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2.50
Jumlah Perpustakaan di Kota Sabang Tahun 2017 -2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Gedung Perpustakaan Milik Pemerintah Kota (Unit)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (orang)	98	135	48	23	245

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Koleksi Jenis Buku Perpustakaan Daerah (buku)	100	100	100	100	100
4	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah (buku)	33.154	35.304	35.304	35.304	35.034
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	-	100,00	100,00	100,00	100

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2022

Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya kecil tetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan. Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada Tahun 2018 terdaftar 40 Partai Politik, 39 Organisasi Kemasyarakatan, 4 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 14 Yayasan, sedangkan pada tahun 2019 di Kota Sabang terdaftar 40 Partai Politik, 43 Organisasi Kemasyarakatan, 6 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 17 Yayasan. Sementara tahun 2020 terdaftar 40 Partai Politik, 39 Organisasi Kemasyarakatan, 4 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 14 Yayasan.

Sedangkan untuk partai politik, terdapat 7 partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, yaitu Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi (Pemilihan Kepala Daerah Periode 2017-2022) belum optimal, ini ditunjukkan dari jumlah pemilih Kota Sabang yang memiliki hak suara pada pemilu 2017 adalah 25.337 pemilih, yang terdiri dari 12.333 laki-laki (48,67%) dan 13.004 perempuan (51,32%). Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Kota Sabang adalah 81,59 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.

Potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu periode sebelumnya relatif kecil, yaitu 11 kasus dengan rincian 1 kasus pencemaran nama baik, 5 kasus perusakan atau pemasangan APK tanpa izin, 2 kasus sengketa internal partai saat pencalonan, 1 kasus perlibatan anak di bawah umur dalam kampanye, 1 kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan 1 kasus dugaan politik uang.

Q. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik

pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu.

Namun sebaliknya yang terjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang *up date*. Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk sistem data statistik yang terintegrasi, buku “Kota dalam Angka” tahun 2017 hingga 2021 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

R. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini.

Pengelolaan arsip di Kota Sabang masih belum baik, mengingat sumber daya manusia pengelola kearsipan masih terbatas. Pada Tahun 2021 pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan belum terlaksana.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian pada tahun 2017-2021 dapat terlihat pada tabel. Dari segi SDM petani, menurunnya kapasitas kelembagaan petani ditunjukkan dengan makin berkurangnya kelompok tani yang dibina dan berkurangnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, sejak tahun 2020 dan 2021 penyuluh pertanian terus di tingkatkan dengan jumlah tenaga pertanian lapangan penyuluh masing-masing 13 orang dan meningkat 19 orang.

Tabel. 2.51
Jumlah Petani, Kelompok Tani di Kota Sabang

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (orang)	1.601	2.257	2.257	2.344	2.344
2	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (orang)	10	10	10	13	19
3	Jumlah Petani (orang)	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
4	Jumlah Kelompok Tani yang terbina (kelompok)	45	42	45	0	50

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Jumlah wilayah pengembangan pertanian (gampong)	11	11	11	11	11
6	Produksi hasil perternakan (ton)	306	256	260,98	265	269,6
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	4,65	4,4	4,2	6,1	6,31
2	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	30,00	30,00	47,00	50,00	69
3	Persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	0,53	0,53	0,66	0,43	2,29
4	Persentase penanganan bencana pertanian	27,00	27,00	28,00	28,50	53
5	Persentase penyuluhan pertanian	31,46	31,46	30,85	30,86	55

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Kelompok tani merupakan satu bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Sabang. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Sabang secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah Kota, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kota Sabang menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 8% . Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelompok tani yang diiringi dengan pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka penyetabilan pangan di saat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatannya adalah dengan pemberian bantuan bibit dan media tanam serta kegiatan bimtek untuk kelompok tani dan seluruh anggotanya.

B. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Sabang. Tahun 2021, nilai PDRB ADHB sektor penggalian di Kota Sabang hanya berada pada kisaran 0,69% atau 10,96 milyar kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Sabang disebabkan oleh sumber bahan galian berupa pasir dan batu. Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel. 2.52
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dan galian (milyar rupiah)	11,17	10,49	10,52	10,76	10,96
2	Jumlah PDRB (milyar rupiah)	1 272,47	1 397,80	1 531,59	1 531,41	1 595,30
3	Kontribusi sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB (%)	0,88	0,75	0,69	0,70	0,69
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase pengelolaan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Sabang dan Pemko Sabang, 2022

C. Kehutanan

Keberadaan sumber daya hutan dan ekosistemnya di Kota Sabang sangat mempengaruhi jalannya aktifitas masyarakat baik sebagai penyangga, dan pencegah dari bencana tanah longsor, erosi dan banjir.

Kota Sabang memiliki potensi hutan yang cukup besar, yaitu kawasan hutan lindung mencapai 3.400 Ha. Selain hutan lindung Kota Sabang juga memiliki Taman Wisata Alam Pulau Weh seluas 1.201 hektar dan Taman Wisata Alam Laut seluas 5.280 Ha. dan wisata yang luasnya 3.900 Ha. Namun pada tahun 2014 terjadi pengurangan luas hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan. Berikut disajikan data tabel keadaan kehutanan di Kota Sabang.

Tabel 2.53
Peruntukkan Pemanfaatan Hutan di Kota Sabang

No	Peruntukkan	Luas (Ha)
1.	Hutan Lindung	3.233
	- Gunung Sarung Keris	1.416,45
	- Gunung Sinnieureugoh	448,80
	- Gunung Lemo Matee	1.255,95
	- Gunung Cot Anoi Raya	71,30
	- Gunung Cot Po Tunong	19,30
	- Gunung Cot Abeuk	21,40

No	Peruntukkan	Luas (Ha)
2.	Taman Wisata Alam Pulau Weh	1.201
3.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh	5.280
3.	Hutan Bakau	60
4.	Hutan Rakyat	15
5.	Rawa –rawa	
6.	Lahan Kritis	3.585
7.	Lahan Reboisasi	-
8.	Penghijauan Lingkungan	77

Ket: * Angka diperbaiki

Sumber : BKPH Pulau Weh Tahun 2017

D. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sabang. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi alam, historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Sabang juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Sasaran strategis sektor ini adalah berkembangnya Destinasi Pariwisata Sabang yang Maju, sehingga Indeks Pariwisata Kota Sabang dapat meningkat. Kota Sabang merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai salah satu daerah destinasi wisata nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan diharapkan dapat menghasilkan PAD demi meningkatnya ekonomi masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan dapat dijadikan sebagai indikator suksesnya program tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kunjungan wisatawan					
Wis. Mancanegara (orang)	2.981	29.827	31.450	5025	784
Wis. Nusantara (orang)	736.275	709.506	589.244	121.265	154.469

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata (Rp)	880.320.000	664.620.000	350.600.000	1.185.621.994	30.3420.000
Jumlah Destinasi Wisata (obyek)	63	64	67	67	71
Rerata Lama menginap (hari)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
Persentase pengembangan daya tarik wisata	12,50	12,50	9,38	15,63	16,90
Persentase promosi pariwisata	25,00	25,00	20,00	20,00	25,0
Persentase SDM terlatih	10,00	10,00	16,00	18,00	22,0

Sumber: Dispar Kota Sabang dan Dishub Kota Sabang, 2022

Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun selama covid-19 tahun 2020-2021 memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan. Kunjungan wisata menjadi salah satu indikator daerah Kota Sabang dengan capaian 784 orang wisatawan mancanegara dan 154.469 orang wisatawan nusantara di tahun 2021. Wisatawan mancanegara masih lebih rendah dari tahun 2020 sementara wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari tahun 2020.

Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada tiga fase “penyelamatan” yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), yaitu Tanggap Darurat, Pemulihan, dan Normalisasi. Pada tahun 2021 Terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebesar 22,93%, hal ini disebabkan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.

2. Kontribusi Terhadap PDRB

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan.

Tabel. 2.55
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan dan transportasi (milyar rupiah)	265,57	284,51	301,91	298,23	308,39
2	Jumlah PDRB (milyar rupiah)	1.272,5	1.397,8	1.531,6	1.531,4	1.595,3
3	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan dan transport terhadap PDRB (%)	20,9	20,4	19,7	19,5	19,3

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Dari tahun 2017-2021, nilai PDRB akomodasi dan makan minum, perdagangan dan transportasi terus menunjukkan perkembangan positif. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalami pertumbuhan negatif dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2020-2021 kontribusinya mengalami penurunan masing-masing menjadi 19,5% dan 19,3%.

E. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Sabang. Sektor perdagangan dalam PDRB Kota Sabang 2020 terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terus mengalami peningkatan. Dari dua sub sektor pembentuknya, sub sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang nilai PDRB terbesar dari PDRB sektor perdagangan, nilainya mencapai yaitu mencapai 15,41% dari PDRB Kota Sabang tahun 2017, kemudian menurun menjadi 15,04% tahun 2018 dan kembali turun 14,56% tahun 2019. Sementara tahun 2020 dan 2021 persentase kontribusi sektor perdagangan mengalami peningkatan menjadi 14,7% dan 14,67% terhadap PDRB Kota Sabang.

Tabel. 2.56
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	196,14	210,31	223,11	225,42	233,98
2	Jumlah PDRB (Milyar Rupiah)	1 272,47	1 397,80	1 531,59	1 531,41	1 595,30
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	15,41	15,05	14,57	14,72	14,67
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	18,20	20,00	30,00	50,00	50,00
2	Persentase pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan strategis	95,00	95,00	90,00	92,00	93,75
3	Ekspor bersih perdagangan (nilai ekspor-nilai impor) dalam US dolar	807.904,4 US\$	144964,4 US\$	472242 US\$	472242 US\$	452242 US\$
4	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera	80,00	80,00	82,00	85,00	86,25
5	Persentase Pedagang yang memasarkan barang produk dalam negeri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Sabang dan Disperindagkop Kota Sabang, 2022

F. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbang PDRB tingkat menengah dalam PDRB Kota Sabang. Nilai PDRB sektor industri pengolahan ini mengalami fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017, nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 27,82 milyar rupiah dan meningkat menjadi 34,84 milyar dan 35,71 Milyar Rupiah di tahun 2018 dan tahun 2019. Kontribusi sektor industri tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,08 milyar. Meskipun PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif, sektor ini terus cenderung turun dari tahun 2018-2020. Kontribusi yang terus menurun tersebut terjadi akibat dari pertumbuhan sektor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri dalam konteks PDRB Kota Sabang. Berdasarkan data PDRB ADHB Kota Sabang tahun 2015-2020, kontribusi terbesar dalam PDRB sektor industri disumbang dari sub sektor industri makanan dan minuman skala *home industry* di Kota Sabang.

Tabel. 2.57
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri (Milyar Rupiah)	32,51	33,88	34,75	34,09	35,3
2	Jumlah PDRB (Milyar Rupiah)	1.272,5	1.397,8	1.531,6	1.531,4	1.595,3
3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	2,55	2,42	2,27	2,23	2,21
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase Bina Pelaku IKM	70,00	76,00	78,00	81,00	32,75

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

G. Perikanan

1. Produksi Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan juga sebagai salah satu sektor unggulan Kota Sabang yang diharapkan dapat menjadi penopang sekaligus penggerak perekonomian daerah serta menjadi sumber protein hewani bagi bahan pangan masyarakat.

Produksi perikanan di Kota Sabang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, produksi perikanan tangkap di Kota Sabang pada tahun 2019 lebih kecil dari target yang direncanakan. Produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi tahun ini dibagi dengan target produksi tahun yang sama

dikalikan 100%. Tahun 2021 jumlah produksi perikanan meningkat 16,34% dari tahun 2020 yaitu sebesar 7.518 Ton/tahun.

Tabel. 2.58
Produksi Perikanan di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Ikan per tahun (Ton)	4.493,00	4.202,00	4.411,61	6.461,79	7.518,00
Target Daerah (Ton)	2.530,12	5013,10	5.062	5.116	5.165
Rasio Produksi Perikanan terhadap Target Daerah (%)	177,6	83,86	87,15	126,30	145,56
Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	-4,39	-4,59	2,72	2,91	0,2
Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	-4,12	-4,20	1,07	1,72	0,10
Persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2022

2. Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kap/tahun. Dalam melakukan analisis angka konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan dengan selisih yang tidak terlalu lebar serta mempunyai trend yang selalu naik dari tahun ke tahun.

Jumlah konsumsi ikan masyarakat Kota Sabang tahun 2021 sebesar 109,5 kg/Kap/Tahun, masih dibawah target konsumsi Kota Sabang sekitar 140 kg/Kap/Tahun yaitu sebesar 24,32 kg/Kap/Tahun atau sekitar 78,21%. Berikut kami sajikan Tabel Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Sabang.

Tabel 2.59
Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	14,20	43,21	24,32	147,70	109,5
Target Daerah (Kg/Kap/Tahun)	50	42	43	140,00	140,00
Rasio Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	28,4	102,88	56,56	105,50	78,21
Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
Konsumsi ikan (Kg/Kap/Thn)	14,20	139,00	139,00	140,00	109,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2022

3. *Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan*

Cakupan Bina Kelompok Nelayan adalah persentase bantuan baik berupa bantuan fisik maupun pelatihan atau sosialisasi yang diberikan Dinas yang membidangi Perikanan dibagi dengan jumlah kelompok nelayan yang ada. Adapun di tahun 2021 jumlah cakupan bina kelompok nelayan sebesar 18,52 % atau 5 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang. Sedangkan Produksi Perikanan kelompok nelayan adalah kontribusi produksi perikanan nelayan terhadap produksi perikanan Kota Sabang. Adapun persentase produksi perikanan kelompok nelayan di tahun 2021 sebesar 98,5%.

Table berikut menyajikan rasio Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.

Tabel 2.60
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n	16	7	15	12	5
Jumlah kelompok nelayan	65	19	20	27	27
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	24,62	36,84	75	44,4	18,52

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2022

Tabel 2.61
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	1,20	848,2	2.582,3	6452	7.406
Jumlah produksi ikan di daerah (Ton)	4.493,0	4.202	4.321,6	6.452	7.518,0
Kontribusi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	0,03	20,18	51,01	100	98,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2022

4. Jumlah Nelayan Di Kota Sabang

Jumlah nelayan di Kota Sabang tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya yang semula berjumlah 1.167 orang menjadi 1.270 orang, yang terdiri dari nelayan tetap 931 orang dan nelayan sambilan/tambahan sebanyak 339 orang.

Tabel. 2.62
Jumlah Nelayan di Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Nelayan			Jumlah (org)
		Tetap	Sambilan Utama	Sambilan Tambahan	
Tahun 2017					
1	Sukajaya	205	90	56	955
2	Sukakarya	452	269	150	440
Jumlah		657	359	206	2.395
Tahun 2018					
1	Sukajaya	420	150	115	685
2	Sukakarya	439	55	45	549
Jumlah		859	205	160	1.234
Tahun 2019					
1	Sukajaya	419	-	209	625
2	Sukakarya	360	-	182	542
Jumlah		779	-	391	1.167
Tahun 2020					
Sukajaya		449	0	229	678

Sukakarya	390	0	199	589
Jumlah	839	0	428	1.267
Tahun 2021				
Sukajaya	536	0	268	804
Sukakarya	395	0	71	466
Jumlah	931		339	1.270

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2022

5. Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Alat Tangkap

Berikut dilampirkan tabel jumlah Armada Perikanan Tangkap yang ada di Kota Sabang, Tahun 2017-2021.

Tabel 2.63
Jumlah Armada Perikanan Tangkap yang ada di Kota Sabang
Tahun 2017-2021

No	Kapal Motor (GT)					Motor Tempel	Perahu Tanpa Motor	Jumlah (Unit)	Tahun
	0-5	5-10	10-20	20-30	30-50				
1	438	10	6	1	-	99	128	682	2017
2	340	31	2	3	-	148	54	576	2018
3	370	58	19	9	-	156	64	676	2019
4	385	49	6	3	0	158	64	665	2020
5	368	56	6	3	-	196	76	705	2021

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2022

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2018 Kota Sabang menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022. Untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan, salah satu upaya yang dilakukan melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan *stakeholder* lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2015-2020 pelaksanaan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja seperti tersaji pada tabel.

Organisasi Pemerintah Kota Sabang belum memiliki institusi khusus untuk menjalankan fungsi ke Litbangan, sehingga fungsi ke Litbangan dilaksanakan oleh Bappeda. Kondisi ini membuat Kota Sabang masih memiliki keterbatasan untuk meningkatkan daya saing daerah terkait masih minimnya inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

Untuk memaksimalkan peran ke Litbangan tersebut, beberapa daerah di Indonesia telah mendirikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda/BPP). Ini sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2011 yang menyatakan agar daerah mendirikan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk menunjang optimalisasi pembangunan daerah paling lambat dua tahun setelah diundangkannya peraturan menteri tersebut (pasal 60 ayat 1).

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu	2	2	2	2	2
Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda	1	1	1	1	5
Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	83	92,70	93,10	96,89	100
Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pemanfaatan hasil ke Litbangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Sabang, 2022

B. Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan Kota Sabang sudah berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021 terhadap pengelolaan keuangan tahun 2020 di Kota Sabang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kemampuan pendapatan Kota Sabang masih sangat tergantung dari pendapatan dana transfer pemerintah (menyumbang 65-74% dari total pendapatan Kota Sabang), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang dalam 5 (lima) tahun terakhir masih sangat rendah berkisar 7-10 % dari Pendapatan Kota Sabang. Selama ini pembelanjaan pembangunan di Kota Sabang sangat tergantung dari pendapatan bersumber DOKA (menyumbang 10-11 persen dari total pendapatan

Kota Sabang) dan DAK. Sementara, pendapatan sumber DAU sudah terbagi habis untuk pembelanjaan wajib mengikat dan mandatory. Kebijakan pengurangan dana transfer Otsus Aceh menjadi 1% dari total DAU Nasional mulai tahun 2023 akan berdampak signifikan terhadap pembiayaan pembangunan di Kota Sabang. Sehingga target-target pencapaian daerah akan mengalami perlambatan.

Tabel 2.65
Realisasi IKD Kinerja Bidang Urusan Keuangan Sabang Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	100	100	100	100	100
Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	7,01	9,27	8,91	7,75	9,34

Sumber: Bappeda Kota Sabang, 2022

Selain pengelolaan Pendapatan Daerah, pengelolaan aset daerah (terutama aset tetap) berupa aset tanah berjumlah 1312 persil baru bersertipikat 265 persil atau sekitar 20,1%. Aset kendaraan roda 2 sebanyak 980 unit kondisi layak jalan 760 unit, sisanya diminta perlu lakukan penghapusan dengan cara lelang sebanyak 83 unit.

Optimalisasi bangunan gedung baru mencapai 87% dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kota Sabang, sisanya 13% belum termanfaatkan. Sementara bangunan kede/toko dan sejenisnya belum dimanfaatkan secara optimal.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi organisasi Pemerintah Sabang masih belum maksimal yang terlihat dari adanya tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola Pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari belum efisien dan efektifnya penggunaan anggaran, distribusi aparatur yang tidak merata dan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya, belum efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, sumber daya aparatur yang masih lemah, hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

D. Pengawasan

Peningkatan kapasitas pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) diperlukan karena obyek pengawasan APIP semakin hari semakin luas, meliputi pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kasus/khusus. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja baik ditingkat Kota maupun ditingkat Provinsi Aceh.

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Kota Sabang mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, termasuk di Tahun 2021. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh

A. Kasus Pelanggaran Syariat Islam Yang Tertangani.

Pelanggaran Syariat Islam di Kota Sabang mengacu kepada beberapa qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh antara lain Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang meliputi pelanggaran Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzat, Liwath, dan Musahaqah. Semakin baik pemahaman dan pengamalan Syariat Islam, maka pelanggaran akan semakin kecil. Oleh sebab itu jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam merupakan indikator penting untuk melihat tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Pelanggaran (Jarimah) terhadap penerapan Syariat Islam selama Tahun 2017-2021, hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Data Pelanggaran Syariat Islam

Tahun	Jumlah kasus Pelanggaran					Jumlah pelanggaran
	Qanun 11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam	Qanun 12/2003 tentang Minuman Khamar	Qanun 13/2003 tentang Maisir	Qanun 14/2003 tentang Khalwat	Qanun 6/2014 tentang Hukum Jinayat	
2017	-	-	1	12	-	13
2018	4	-	-	160	-	164
2019	3	0	0	0	141	144
2020	12	0	0	0	109	121
2021	-	-	-	-	110	110

Sumber: Satpol PP dan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang, 2022

Pada tahun 2021 di Kota Sabang ditemukan 110 kasus pelanggaran syariat Islam dan ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebanyak 121 kasus. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam di Kota Sabang. Dari 110 kasus pelanggaran yang terjadi sebesar 100% merupakan kasus jinayat. Adapun penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.67
Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam Tahun 2021

Qanun	Pembinaan di tempat	Pembinaan di Kantor	Hukum Adat	Penyelesaian Penyidik	Penyelesaian oleh Mahkamah Syar'iyah	Jumlah Perkara
1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002	0	0	0	0	0	0
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari:						
a. Khamar;	0	0	0	0	0	0
b. Maisir;	0	0	0	0	5	5
c. Zina; dan	0	0	0	0	2	2
Khalwat & Ikhtilat	97	0	0	0	6	103
Jumlah Kasus	97	0	0	0	13	110

Sumber: Satpol PP-WH dan Mahkamah Syar'iyah 2022

B. Pertumbuhan Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah

Pemahaman Syariat Islam yang baik akan meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, salah satunya adalah pembayaran Zakat dan Infak. Rata-rata Laju pertumbuhan penerima zakat tahun 2017-2021 sebesar 26,43%. Sementara untuk penerima infaq dan sadaqah belum dilaksanakan penyaluran disebabkan oleh ketidak sesuaian rencana realisasi penyaluran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.

Tabel 2.68
Pertumbuhan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tahun	Indikator				
	Pertumbuhan penerimaan zakat, infaq dan sedekah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah penerima zakat (orang)	Pertumbuhan (%)	Jumlah penerima infaq dan Sadaqah (orang)
2017	5.496.483.258	4,83	7.193	-48,15	991
2018	5.442.972.483	-0,97	10.739	49,30	1.735

Tahun	Indikator				
	Pertumbuhan penerimaan zakat, infaq dan sedekah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah penerima zakat (orang)	Pertumbuhan (%)	Jumlah penerima infaq dan Sadaqah (orang)
2019	5.443.275.083	0,005	11.508	7,16	788
2020	5.622.139.398	3,28	12.077	4,94	0
2021	4.236.815.549	-24,64	18.381	52,20	0

Sumber: Baitul Mal Sabang, Tahun 2022

Pertumbuhan penerima zakat tahun sejak tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan menunjukkan tren positif. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Sabang mengalami menurun. Sementara untuk penerima infaq dan sadaqah belum dilaksanakan pembagian dan diharapkan pemanfaatannya lebih kepada program yang bersifat produktif sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan.

C. Konflik Keagamaan

Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah rendahnya tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Orang yang memiliki pemahaman dan pengamalan nilai agama yang baik tidak akan menghadirkan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat pemahaman dan pengamalan dapat diukur dengan jumlah konflik yang terjadi. Tingkat toleransi antar umat beragama juga masih kental dirasakan yang ditunjukkan melalui tidak adanya konflik yang terjadi antar umat beragama.

Pada tahun 2021, tidak ada konflik keagamaan di Kota Sabang, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini berarti capaian 2020 sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya Data di atas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama tahun 2021 **berhasil**.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2017-2021, pengeluaran makanan per Kapita di Kota Sabang mengalami perkembangan positif. Pada tahun 2017, pengeluaran per Kapita penduduk Kota Sabang adalah sebesar 10,61 juta rupiah per tahun.

Sementara pada tahun 2021, pengeluaran per Kapita ini meningkat menjadi 11,78 Juta Rupiah/Tahun. Secara umum, jumlah pengeluaran makanan memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Meskipun demikian, nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan juga lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Tabel 2.69
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Makanan (Rp/Kap/Bln)	700.149	659.317	780.405	802.788	789.614
Pengeluaran non Makanan (Rp/Kap/Bln)	492.431	591.926	674.699	672.673	625.598
Jumlah Pengeluaran (Rp/Kap/Bln)	1.192.581	1.251.244	1.455.105	1.475.461	1.415.212
Jumlah Penduduk (orang)	33.978	34.571	34.874	41.197	42.066
Pengeluaran Makanan/Kapita/Tahun (Rp/Kap/Thn)	8.401.788	7.911.804	9.364.860	9.633.456	9.475.368
Pengeluaran non Makanan/Kapita/Tahun (Rp/Kap/Thn)	5.909.172	7.103.112	8.096.388	8.072.076	7.507.176
Pengeluaran per Kapita per Tahun (Juta Rupiah)	10,61	10,90	11,44	11,27	11,78

Sumber: BPS, Tahun 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Sabang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Sabang dalam meningkatkan daya saing daerah.

A. Aksesibilitas Daerah

Kota Sabang selain ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga Kota Sabang merupakan penopang distribusi perekonomian Kota Sabang. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Sabang antara lain:

1. Sarana jalan di Kota Sabang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan panjang total sepanjang 202.236 Km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 0,4% serta rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 88,3% dan rasio jalan rusak ringan mencapai di atas 7,5%.

2. Pelabuhan Balohan yang merupakan pelabuhan penyeberangan untuk melayani penumpang kapal antar antar kabupaten/kota. Selain pelabuhan penyeberangan, juga terdapat pelabuhan *hub port* selain sebagai pelabuhan bongkar muat barang namun beberapa kapal pesiar internasional juga singgah dipelabuhan ini.

B. Penataan Ruang

Dalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 86/2017 ini terdapat 6 (enam) indikator, yakni ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnya dengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Sabang, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah Kota Sabang merupakan status wilayah perkotaan, sehingga indikator wilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini diiadakan.

1. Ketaatan Terhadap RTRW

Adapun pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan¹ (satu) indikator kinerja yaitu Ketaatan Terhadap RTRW sesuai dengan kebutuhan masyarakat (skala prioritas) serta berwawasan lingkungan, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.70
Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
Ketaatan terhadap RTRW (%)	65,43	65,43	65,43	65,43	65,43

Sumber: PUPR dan Bappeda Kota Sabang, 2022

Dalam penataan ruang, masalah ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan indikator yang menjadi ukuran capaian kinerja pemerintah. Secara umum ketaatan masyarakat terhadap RTRW relatif baik. Rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW, seperti hutan lindung dengan tingkat rasio ketaatan 77,27% ini disebabkan beberapa hal diantaranya telah terjadi perambahan hutan sebelum tahun 80-an akibat harga cengkeh yang tinggi. Selain itu lahan yang direncanakan belum terealisasi sesuai rencana dan pemanfaatannya masih seperti saat awal perencanaan.

2. Persentase Luas Wilayah Produktif

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktif adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagai wilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Sabang didekati dengan penjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, industri, pertanian dan perikanan.

Tabel 2.71
 Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Sabang

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas wilayah Produktif (Ha)	3.946,18	3.946,18	3.946,18	3.946,18	3.946,18
2	Jumlah seluruh wilayah Budidaya (Ha)	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61
3	Persentase luas wilayah produktif (%)	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83

Sumber: Survey Tim GIS, Bappeda Sabang

3. Persentase Wilayah Industri

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industri adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.72
 Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Sabang

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas wilayah Industri (ha)	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36
2	Jumlah seluruh wilayah Budidaya (ha)	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61
3	Persentase luas wilayah industri (%)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

Sumber: Survey Bappeda Sabang

Luas wilayah industri skala menengah dan besar di Kota Sabang yang direncanakan dalam RTRW Kota Sabang berada di Gampong Balohan, Anoe Itam dan Jaboi. Wilayah industri di Kota Sabang saat ini masih didominasi sentra-sentra industri skala rumah tangga untuk mendukung sektor wisata dan bukan industri skala besar dengan pabrik yang modern.

4. Persentase Luas Wilayah Genangan

Indikator luas wilayah banjir sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 86/2017 adalah dengan membandingkan antara jumlah wilayah banjir dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayah banjir, sehingga data mengenai luas wilayah banjir diganti dengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.73
 Persentase Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas wilayah rawan genangan (ha)	323,25	323,25	323,25	323,25	323,25
2	Jumlah seluruh wilayah Budidaya (ha)	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61
3	Persentase luas wilayah rawan genangan (%)	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79

Sumber: Studi EHRA, 2016

Dari 18 gampong di Kota Sabang, 2 gampong yang memiliki luas wilayah rawan genangan yang relatif luas, yaitu: gampong Cot Ba'U seluas 191 hektar dan Balohan 40 hektar.

C. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air bersih di Kota Sabang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun. Jumlah pemakaian air melalui PDAM pada tahun 2021 tercatat 2,009 Juta M³. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.74
 Perkembangan Pelayanan Air Bersih PDAM di Kota Sabang
 Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelanggan	6.210	6.487	6.878	7.212	7.581
2	Pemakaian Air (M3)	1.874.848	1.927.978	1.979.669	2.009.292	2.147.682
3	Penjualan Air (Rp)	4.307.624.210	4.753.587.954	7.781.645.422	8.700.460.890	9.568.083.785

Sumber: PDAM Tirta Aneuk Laot, 2022

D. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi

Di era teknologi, Keberadaan Energi terutama listrik merupakan suatu hal penting untuk menunjang segala aktivitas penduduk di suatu daerah, baik itu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, pemerintahan, ataupun kegiatan sehari-hari diluar dua hal tersebut.

Pelanggan listrik di Kota Sabang sejak tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 3,31%, dengan jumlah pelanggan tahun 2021 sebanyak 14.218 dengan produksi listrik 37.095.096 KWh dan terjual 35.703.906 KWh.

Sedangkan untuk fasilitas telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi di

Kota Sabang dilayani oleh 4 operator seluler untuk telepon nirkabel yaitu Telkomsel, Indosat, Exelindo, dan Telkom Fleksi.

Kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan telekomunikasi di Kota Sabang terutama pembangunan menara BTS adalah diterapkannya BTS bersama untuk mengatasi permasalahan di beberapa lokasi yaitu Gampong Iboih, Gampong Paya, Gampong Beurawang dan Gampong Anoe Itam.

E. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Sabang sebagai kota pariwisata sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional dan perbankan. Sampai dengan tahun 2021 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2020 sebanyak 62 buah menjadi 102 buah di tahun 2021. Selain itu jumlah hotel dan penginapan lainnya juga berkurang dari tahun 2020 sebanyak 150 buah menjadi 146 buah di tahun 2021. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sabang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Sabang.

Tabel 2.75
Perkembangan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Sabang
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Restoran, Rumah Makan dan Cafe (unit)	41	49	62	62	102
	a. Restoran dan Rumah Makan	25	25	34	34	36
	b. Cafe	16	24	28	28	66
2	Hotel dan Penginapan Lainnya (unit)	124	130	158	158	146
3	Bank (unit)	5	5	5	5	
	a. Konvensional	4	3	3	0	0
	b. Syariah	1	2	2	5	2

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Sabang dan BPS Sabang, 2022

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perizinan.

A. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Sabang sangat kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparaturnya Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Pada tahun 2021 angka kriminalitas sebesar 55 kejadian, dan keadaan ini menurun dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di setiap jurong telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasikan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

B. Kemudahan Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sabang. Penyelesaian izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Prosedur izin terbit perizinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan telah mencapai 100 %. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk PTSP Kota Sabang tahun 2021 dengan kategori "**Baik dengan Catatan**". Diharapkan adanya Kondisi iklim usaha Kota Sabang pada tahun 2021 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya.

Tabel 2.76
Perizinan di Kota Sabang Tahun 2021

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)	Jumlah Izin Yang dikeluarkan
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
	Bangunan Pribadi/Perusahaan	5	9	1% dari RAB	5
	Bangunan Pemerintah	5	4	Gratis	4
	Bangunan Menara	5	15	1% dari RAB	-
2.	Klasifikasi Baku Lapangan Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)				

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)	Jumlah Izin Yang dikeluarkan
1	2	3	4	5	6
	-Izin Usaha PMDN	1 Hari	4 Dokumen	Gratis	1.372
	-Kegiatan Usaha	1 Hari	2 Dokumen	Gratis	138
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)				
	-NIB PMDN	1 Hari	4 Dokumen	Gratis	76 NIB
	-NIB IUMK	1 Hari	2 Dokumen	Gratis	93 NIB
4.	Tanda Daftar Industri (TDI)	5	4-6	Gratis	-
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	5	4 -7	Gratis	2

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2022

Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator ini diantaranya: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Gangguan (HO).

C. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Kota Sabang mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Pajak yang mengalami perubahan pengelolaan ini antara lain adalah PBB dan pajak BPHTB. Pada tahun 2020, pajak yang ada di Kota Sabang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB dan PBB. Sedangkan retribusi yang diberlakukan di Kota Sabang pada tahun 2021 meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, mobil penumpang, pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, penyewaan tanah dan bangunan, terminal, pelayanan pelabuhan, pengujian

kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah; tempat parkir khusus; rumah potong hewan; IMB, HO, retribusi bidang pariwisata.

Tabel 2.77

Jumlah Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sabang Tahun 2021

No	Uraian	Obyek Pajak	Jumlah Rincian Obyek Pajak
1	Pajak Daerah (8 Jenis)		
		Pajak Hotel	3
		Pajak Restoran	6
		Pajak Hiburan	2
		Pajak Reklame	3
		Pajak Penerangan Jalan	1
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5
		Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1
		Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2
		Total	23
2	Retribusi Daerah (3 Jenis)		
		Retribusi Jasa Umum	7
		Retribusi Jasa Usaha	8
		Retribusi Perizinan Tertentu	5
		Total	20

Sumber: BPKD Kota Sabang, 2022

D. Sinkronisasi Pemko Sabang dengan BPKS

Seluruh wilayah Kota Sabang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan dipertegas kembali dengan pasal 167, 168, 169 dan 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga termasuk satu wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.

Mengingat wilayah kerja BPKS berada di wilayah Kota Sabang maka diperlukan kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan agar terjadi keterpaduan dan efektifitas pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan juga program prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sabang.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan tokoh utama yang berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang. Pemaparan data dapat dilihat pada Tabel yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang selama tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2017, rasio lulusan ini hanya mencapai 561 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2018 rasionya naik menjadi 573 per 10.000 penduduk dan kembali naik hingga tahun 2021 menjadi 626 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.78
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah S1, S2, S3 (jiwa)	2.267	2.372	2.477	2.515	2.663
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	40.493	41.436	42.191	42.314	42.556
3	Rasio Lulusan S1, S2, S3	561	573	587	594	626

Sumber: Disdukcapil Kota Sabang, 2022

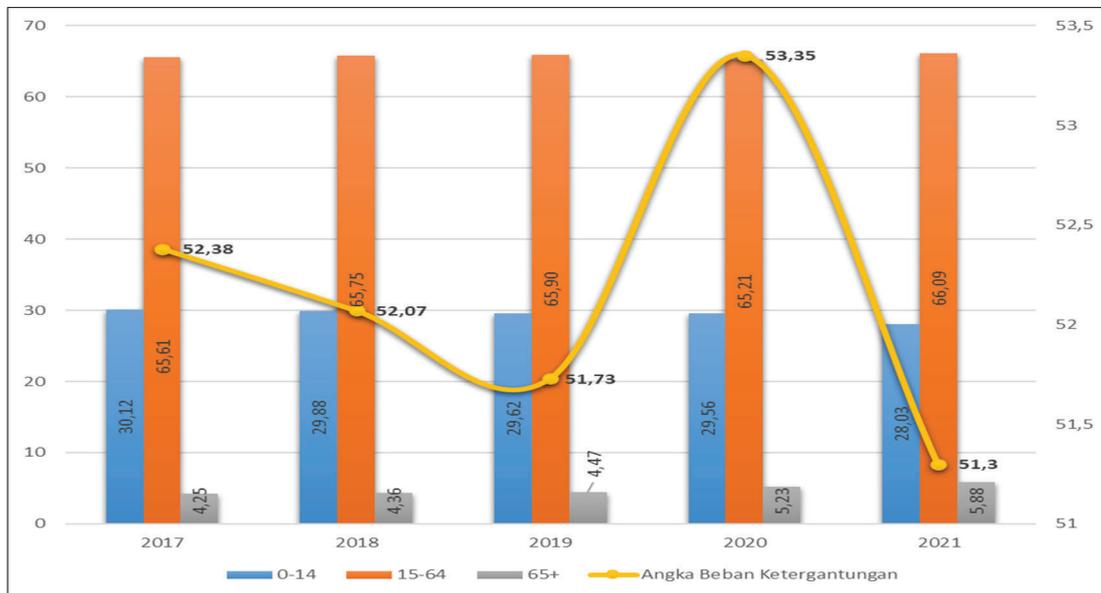
2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Sabang pada tahun 2021 adalah 51,30%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51-52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.79
Persentase Penduduk Kota Sabang Menurut Umur Tahun 2017–2021

Tahun	Umur (%)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
2017	30,12	65,61	4,25	52,38
2018	29,88	65,75	4,36	52,07
2019	29,62	65,90	4,47	51,73
2020	29,56	65,21	5,23	53,35
2021	28,03	66,09	5,88	51,30

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022



Gambar 2.14
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sabang
Tahun 2017-2021

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sabang Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Kota Sabang

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2021

Tabel 2.80
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Capaian Setiap Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase penurunan pelanggaran syariat islam	-16,17	29,06	40,97	49,21
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,97	11,13	11,14	11,18
3	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,21	70,45	70,51	70,56
4	Prevalansi stunting balita (%)	26,50	16,07	11,50	13,50
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,64	2,71	1,94	2,80
6	Angka Patisipasi Angkatan Kerja	65,82	72,66	71,55	63,71
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,0	95,47	95,81	95,60
8	Indeks Daya Saing Pariwisata	2,6	2,62	2,67	2,75
9	Indeks Pekerjaan Umum	0,732	0,788	0,791	0,812
10	Indeks Perumahan	0,880	0,900	0,920	0,930
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,58	77,62	78,0	72,8
12	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	40,0	45,0	50,0	52,0
13	Indek Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
14	Persentase Peningkatan PAD (%)	3,83	3,74	-14,60	-1,43

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJM Kota Sabang Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Sabang
Tahun 2018-2021

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
I.A.	<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
I.A.1.1.	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi	5,86	5,82	-1,15	
I.A.1.2.	Laju Inflasi	3,83	3,56	1,28	
I.A.1.3.	PDRB Perkapita (juta)	40,46	43,92	37,22	
I.A.1.4.	Indeks Gini	0,271	0,281	0,271	0,293
I.A.1.5.	Tingkat Kemiskinan	16,31	15,60	14,94	15,32
I.A.1.6.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	21,69	19,49	17,79	13,18
I.B.	<i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i>				
I.B.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,82	75,77	75,78	76,11
I.B.2.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta rupiah/tahun)	10,90	11,44	11,27	11,78
I.B.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,21	4,60	4,81	3,56

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.B.4.	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,97	0,95	0,96
I.B.5.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,52	72,91	70,07	63,71
I.B.6.	Jumlah angkatan kerja (orang)	16.582,00	15.963,00	16.537,00	16.283,00
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
II.A	Pelayanan Urusan Wajib				
A.1.	Pendidikan				
A.1.1.	APK (%)	66,21	72,20	98,32	94,51
A.1.2.	APM (%)	55,72	64,02	76,50	95,83
A.1.3.	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33	33,33	33,33	33,33
A.1.4.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (%)	82,18	85,36	77,54	
A.1.5.	Persentase Dayah yang Terakreditasi	44,00	44,00	44,00	44,44
A.1.6.	Persentase penyelenggaraan Pendidikan Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.	Kesehatan				
A.2.1.	IPKM	NA	NA	67,00	66,80
A.2.2.	Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk	1:181	1:174	1:218	1:218
A.2.3.	Persentase sistem pengawasan obat dan makanan	50	95	100	100,00
A.2.4.	Cakupan Desa Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
A.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
A.3.1.	Pekerjaan Umum				
A.3.1.1	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air	7,89	25,00	30,26	18,33
A.3.1.2	Persentase penduduk berakses air minum	75,9	91,75	91,83	89,87
A.3.1.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	81,58	81,76	81,94	91,39
A.3.1.4	Persentase drainase dalam kondisi baik	7,12	7,12	7,12	7,12
A.3.1.5	persentase pengembangan wilayah strategis	0,11	0,46	1,60	5,00
A.3.1.6	Rasio bangunan ber IMB	0,35	0,38	0,42	0,3
A.3.1.7	Persentase permukiman yang tertata	10,89	11,71	12,52	93
A.3.1.8	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	89,93	89,93	89,93	89,72
A.3.1.9	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	75,00	80,00	85,00	23
A.3.2.	Penataan Ruang				
A.3.2.1	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	65,1	65,4	65,70
A.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
A.4.1.	Rasio rumah layak huni	0,28	0,28	0,29	0,13
A.4.2.	Rasio pemukiman layak huni	0,91	0,91	0,95	0,72
A.4.3.	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	28,55	28,50	28,46	28,36
A.4.4.	Persentase Utilitas	77,78	83,33	88,89	66,67
A.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
A.5.1.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	100,0	100,0	100,0	100,0
A.5.2.	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	33,72	33,72	33,72	50,24
A.5.3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	34,8	54,5	54,5	58,00
A.6.	Sosial				
A.6.1.	Persentase regulasi tentang pemberdayaan sosial	100	100	100	100
A.6.2.	persentase kebijakan rehabilitasi sosial	65	65	67	67
A.6.3.	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
A.6.4.	Cakupan penanggulangan Bencana (sosial)	100	100	100	100
B.	Urusan Wajib Non Dasar				
B.1.	Tenaga Kerja				
B.1.1.	Persentase tenaga kerja terampil	6,90	7,50	8,00	3,57
B.1.2.	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	12,00	15,00	18,00	13,33
B.1.3.	Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undangan Ketenagakerjaan	43,00	43,00	43,00	43,00
B.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak				
B.2.1.	Persentase kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan (SDGs)	60,00	61,00	61,50	61,90
B.2.2.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (SDG's)	91,00	90,00	92,00	100,00
B.2.3.	Persentase Keluarga Sejahtera II	42,00	45,00	47,00	50,82

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.2.4.	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	80,00	82,00	84,00	85,00
B.2.5.	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80,00	85,00	89,00	90,00
B.2.6.	persentase regulasi terhadap perlindungan anak	41,00	50,00	60,00	70,00
B.3.	Pangan				
B.3.1	skor pola pangan harapan (PPH)	80,89	82,4	85,7	87,00
B.3.2	persentase pengawasan keamanan pangan	11,11	33,00	33,00	44,40
B.4.	Pertanahan				
B.4.1.	Penyelesaian Izin Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.2.	Penyelesaian sengketa Tanah garapan	0,00	0,00	0,00	60,00
B.4.3.	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4.	Cakupan redistribusi tanah, serta ganti rugi kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.5.	Cakupan pengelolaan tanah kosong	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.6.	persentase permohonan izin	0,00	0,00	0,00	0,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
	membuka tanah terfasilitasi				
B.4.7.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.	Lingkungan Hidup				
B.5.1.	persentase dokumen perencanaan	16,70	50,00	50,00	66,67
B.5.2.	persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	57,14	71,43	71,43	71,40
B.5.3.	Persentase pengelolaan RTH	18,18	36,36	45,45	72,73
B.5.4.	persentase limbah tertangani	37,50	43,75	53,49	75,00
B.5.5.	persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	46,70	50,00	50,00	66,67
B.5.6.	persentase penghargaan lingkungan hidup	66,67	66,67	66,67	33,30
B.5.7.	persentase penanganan pengaduan	0,00	100,00	0,00	0,00
B.5.8.	persentase Timbulan sampah yang tertangani	81,72	74,63	78,94	81,80
B.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
B.6.1.	Rasio Penduduk Ber KTP Persetuan Penduduk	90,00	92,00	93,00	93,29
B.6.2.	Persentase penerbitan	95,00	95,00	97,00	98,99

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
	dokumen pencatatan sipil				
B.6.3.	Persentase pemanfaatan data kependudukan	15,00	15,00	15,00	60,00
B.6.4.	Tingkat validitas data kependudukan	95,00	98,00	100,00	100
B.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
B.7.1.	Cakupan Penataan Desa	NA	NA	NA	
B.7.2.	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	NA	16,67	16,67	0
B.7.3.	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	94,44	94,44	94,44	94,44
B.7.4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100,00	100,00	100,00	100,00
B.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
B.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,75	0,88	1,50	2,82
B.8.2.	Rasio Akseptor KB	18,2	79,56	60,00	49,93
B.8.3.	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	89,90	89,90	89,90	89,90
B.9.	Perhubungan				

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.9.1.	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	70,00	75,00	80,00	75,00
B.9.2.	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	70,00	75,00	80,00	75,00
B.9.3.	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	78,00	80,00	83,00	70,00
B.10.	Komunikasi dan Informatika				
B.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	39,13	39,13	33,96	69,81
B.10.2.	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	0,00	12,50	25,00	50,00
B.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
B.11.1.	Persentase koperasi yang sudah RAT	14,22	27,71	14,94	51,06
B.11.2.	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	-	57,00	67,59	86,27
B.11.3.	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	2,80	2,80	4,50	9,30
B.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	65,12	73,37	91,13	20,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
	(jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)				
B.11.5.	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	1,90	1,90	2,00	16,33
B.12.	Penanaman Modal				
B.12.1.	Persentase Investor yang menanam Modal	80,00	85,00	93,00	40,00
B.12.2.	Persentase Promosi Penanaman Modal	1,00	1,00	1,00	52,00
B.12.3.	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00
B.12.4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	0,64	0,75	0,45	25,00
B.12.5.	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00
B.13.	Kepemudaan dan Olah Raga				
B.13.1.	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	NA	NA	30,15	30,15
B.13.2.	persentase cabang olah raga yang berprestasi	20,00	25,00	0,00	9,00
B.13.3.	Jumlah pembinaan kepramukaan	41,60	41,60	41,60	41,60
B.14.	Statistik				
B.14.1.	persentase komponen data statistik sektoral	15,97	16,97	21,01	25,40

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.15.	Persandian				
B.15.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	3,03	3,03	3,03	18,18
B.16.	Kebudayaan				
B.16.1.	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	54,64	54,64	54,64	54,64
B.16.2.	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	19,13	24,95	25,00	0,00
B.16.3.	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,34	10,34	5,17	10,34
B.16.4.	Persentase penyelenggaraan Adat Istiadat	0,00	30,00	30,00	33,33
B.17.	Perpustakaan				
B.17.1.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	100,00	100,00	100,00	100,00
B.18.	Kearsipan				
B.18.1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	<i>Pelayanan Urusan Pilihan</i>				
C.1.	Kelautan dan Perikanan				

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
C.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	-4,59	2,72	2,91	14,97
C.1.2.	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	-4,20	1,07	1,72	0,13
C.1.3.	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,00	33,00	33,00	33,00
C.1.4.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	139,00	139,00	140,00	109,50
C.2.	Pariwisata				
C.2.1.	persentase pengembangan daya tarik wisata	12,50	9,38	15,63	15,63
C.2.2.	persentase promosi pariwisata	25,00	20,00	20,00	50,63
C.2.3.	persentase SDM terlatih	10,00	16,00	18,00	0,31
C.3.	Pertanian				
C.3.1.	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	4,40	4,20	6,10	6,36
C.3.2.	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	30,00	47,00	50,00	61,54
C.3.3.	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	0,53	0,66	0,43	86,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
C.3.4.	persentase penanganan bencana pertanian	27,00	28,00	28,50	16,67
C.3.5.	persentase penyuluhan pertanian	31,46	30,85	30,86	18,20
C.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral				
C.4.1.	Persentase pengelolaan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan				
C.5.	Perdagangan				
C.5.1.	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	20,00	30,00	50,00	27,78
C.5.2.	Persentase pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan strategis	90,00	92,00	92,00	100,00
C.5.3.	Ekspor bersih perdagangan (nilai ekspor-nilai impor) dalam US dolar	472242 US\$	472242 US\$	472242 US\$	
C.5.4.	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera	80,00	82,00	85,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
C.5.5.	Persentase Pedagang yang memasarkan barang produk dalam negeri	100,00	100,00	100,00	100,00
C.6.	Perindustrian				
C.6.1.	Persentase Bina Pelaku IKM	76,00	78,00	81,00	100,00
D.	Pendukung Urusan				
D.1.	Sekretariat Daerah				
D.1.1.	Cakupan layanan administrasi umum KDH/WKDH	100,00	100,00	100,00	100,00
D.1.2.	Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00
D.1.3.	capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Sekretariat Dewan				
D.2.1.	Cakupan layanan administrasi umum Sekretariat DPRD	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.2.	Persentase fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRK	100,00	100,00	100,00	100,00
E.	Penunjang Urusan				
E.1.	Perencanaan				

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
E.1.1.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	92,70	93,10	96,89	100,00
E.1.2.	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
E.2.	Keuangan				
E.2.1.	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	100,00
E.2.2.	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	NA	NA	NA	92,32
E.2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	7,59	8,27	7,75	9,34
E.3.	Kepagawaian				
E.3.1.	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00
E.4.	Pendidikan dan Pelatihan				

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
E.4.1.	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	18,00	18,00	20,00	20,00
E.5.	Penelitian dan Pengembangan				
E.5.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	81,00	82,00	84,00	85,00
E.6.	Pengelolaan Perbatasan				
E.6.1.	Cakupan pengelolaan wilayah perbatasan	100,00	100,00	100,00	100,00
F.	Pengawasan				
F.1.	Inspektorat Daerah				
F.1.1.	Tingkat Maturitas SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) Kota	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
F.1.2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
G.	Kewilayahan				
G.1.	Kecamatan				
G.1.1.	Cakupan Pelayanan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.2.	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.3.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban	100,00	100,00	100,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
G.1.4.	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.5.	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100,00	100,00	100,00	100,00
H.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
H.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
H.1.1.	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00
H.1.2.	Persentase Pembinaan Politik Daerah	75,00	75,00	75,00	75,00
H.1.3.	Persentase ormas, Organisasi Pemuda dan LSM yang terdaftar	100,00	100,00	100,00	100,00
H.1.4.	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan fasilitasi P4GN	N/A	N/A	N/A	100,00
H.1.5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00
I.	Kekhususan				
I.1.	Kekhususan Aceh				
I.1.1.	Persentase koordinasi dan	80,00	85,00	97,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
	sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam				
I.1.2.	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	40,00	40,00	80,00	80,00
I.1.3.	Persentase Pertumbuhan ZIS	6,44	6,59	6,79	
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Kemampuan Ekonomi Daerah				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	PDRB per kapita (ADHK) (juta rupiah)	31,09	32,61	27,29	
	PDRB per kapita (ADHB) (juta rupiah)	40,46	43,92	37,22	
	Pertumbuhan Jumlah Penganggur (%)	-46,84	17,91	0,0006	
	Fasilitas Wilayah/Infrastrukt ur				
1.	Perhubungan				
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	814.405,0 0	867.413,0 0	917.413,0 0	

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
2.	Penataan Ruang				
2.1.	Ketaatan Terhadap Tata Ruang (%)	65,43	65,43	65,43	67,20
2.2.	Persentase Luas Wilayah Produktif	70,83	70,83	70,83	70,83
2.3.	Persentase Luas Wilayah Industri	0,03	0,03	0,03	0,03
	Fokus Iklim Investasi				
1.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	21,69	19,49	15,69	
2.	Perizinan				
2.1.	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan (izin)		385,00	1.141,00	
2.2.	Lama proses perizinan (hari)	5,00	5,00	3,00	3,00
	Fokus Sumber Daya Manusia				
1.	Ketenagakerjaan				
1.1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	573,00	587,00	637,00	594,00

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan di Kota Sabang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan di Kota Sabang. Gambaran umum di Kota Sabang tidak semua mencerminkan penurunan capaian namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan di Kota Sabang dengan dasar bahwa Kota Sabang adalah kota pariwisata yang sudah tidak lagi mentolerir kondisi-kondisi minor seperti misal angka kemiskinan, permukiman kumuh dan kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi tersebut, serta memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan kota sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya dengan target akhir RPJM Kota Sabang maka permasalahan pembangunan daerah Kota Sabang dapat dirumuskan

sebagai berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah

1. Permasalahan kualitas pelayanan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat

Dalam mendekati masalah kesehatan, sesuai tugas dan fungsi urusan pemerintahan daerah, identifikasi permasalahan dan akar masalah dilakukan dengan analisis dari faktor pelayanan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Ada 3 (tiga) permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Sabang, yaitu:

- a. Promosi Pola Hidup Sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular dengan capaian Persentase Prevalensi Tuberculosis (TB) 13% per 100.000 penduduk; (ii) Prevalensi penduduk malaria 0,11 per 1000 penduduk.
- b. Kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan, hal ini dinyatakan dari data, yaitu: (i) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas) terus meningkat sejak tahun 2018 sebesar 2.31% menjadi 5,5% pada tahun 2020; (ii) kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) pada tahun 2021 sebesar 13,56% meningkat dari tahun 2020 sebesar 11,50%, (iii) Rerata Persentase Balita Umur 0-59 Bulan Menurut Jenis Imunisasi Lengkap terus menurun sejak tahun 2015-2020 yaitu 88,15 % menjadi 61,2% tahun 2020.
- c. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini terbaca dari target yang belum tercapai atas indikator: (i) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 80,9%; (ii) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup baru mencapai 11,3/1.000 Kelahiran Hidup masih lebih tinggi dari dibandingkan dengan capaian Aceh yaitu 10/1.000 Kelahiran Hidup,; (iii) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang saat ini tidak representative dan berdampak kualitas pelayanan pasien.
- d. Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19, dimana di Kota Sabang sudah terkonfirmasi sebanyak 549 orang pada bulan Februari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 47 atau sebesar 8,56 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 3,3 Persen. Target vaksinasi covid-19 di Kota Sabang adalah 31.217 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua sebesar 21.811 jiwa atau 69,87 persen (Maret 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 72,06 persen.

2. Permasalahan Pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian Kota Sabang yaitu:

- a. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sabang belum optimal yaitu sebesar 2,67% dan lebih rendah dari Laju Pertumbuhan PDRB Aceh (2,79%) dan Nasional (3,51%).
- b. Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor PDRB masih belum optimal, ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih negative (-1,78%).
- c. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 126 ribu wisatawan (menurun 79,6% dari tahun 2019).
- d. Kota Sabang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, sehingga pasokan bahan pangan sangat tergantung pada daerah sekitarnya serta masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, yang menjadi elemen dari Pola Pangan Harapan hanya memiliki laju pertumbuhan 1,22%.
- e. Sektor perdagangan sebagai salah satu kontributor penggerak ekonomi daerah masih sangat kecil, ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Perdagangan Besar dan Eceran (1,88%).

3. Pengelolaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan serta tangguh untuk mendukung pariwisata dan kebutuhan dasar belum optimal

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Beberapa permasalahan Infrastruktur di kota Sabang adalah:

- a. Kualitas jalan Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik sudah mencapai 94,98%, namun kelengkapan ruas jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air masih 67,53%.
- b. Belum adanya angkutan masal di Kota Sabang yang melayani trayek antar daerah dan persentase izin trayek untuk lingkup Kota Sabang sangat kecil, yaitu 4 izin dengan rasio 0,01.
- c. Pengembangan daya tarik wisata baru 15,63% dari seluruh destinasi wisata yang ada di Kota Sabang.
- d. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, di mana persentase ketaatan terhadap tata ruang 65,43%, dan saat ini Kota Sabang

belum memiliki RDTR sebagai dokumen teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar lainnya adalah masalah lingkungan pemukiman. Kondisi infrastruktur dasar permukiman direpresentasikan dengan indikator berikut:

- a. Belum maksimalnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat hanya 7,12%;
- b. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku belum optimal sekitar 67,98%;
- c. Rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat sangat rendah sebesar 0,3%;
- d. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Sabang sebanyak 4,4%;
- e. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU baru mencapai 88,89% dan persentase kawasan kumuh 0,19%.

Faktor kesehatan lingkungan juga berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan menjadi faktor pendukung daya tarik kota. Permasalahan lingkungan hidup Kota Sabang tercermin dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,80 poin pada tahun 2021 (lebih rendah dari tahun 2020 yaitu 78 Poin) beserta komponen-komponennya yang semuanya, yaitu Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) (61); Indeks Kualitas Air (IKA) (56,67); Indeks Kualitas Udara (94,15). IKLH Kota Sabang 72,80 poin lebih rendah IKLH Aceh sebesar 75,54 poin.

4. Kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum

Kualitas dan daya saing manusia dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, minat baca dan kepemudaan dan olah raga.

- a. Indikator bidang urusan Pendidikan masih belum optimal, yaitu: (i) Angka Partisipasi Murni jenjang SD dan SMP belum optimal, masih dibawah 100%; (ii) Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah, baru mencapai 68,33%, (iii) Sekolah terakreditasi masih belum maksimal (SD: 58,06%; SMP: 99,7%), (iv) Persentase Guru Bersertifikasi belum optimal (SD:59,35%; SMP: 69,53%).
- b. Masih rendahnya minat membaca masyarakat di perpustakaan, diindikasikan oleh jumlah pengunjung perpustakaan terus menurun rata-rata persentase penurunan 58,24%.
- c. Masih belum optimalnya aktifitas pembinaan atlit olah raga dan persentase cabang olah raga yang berprestasi baru mencapai 25% dari total cabang olah raga yang diikuti.

- d. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan yang diindikasikan dengan Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing hanya 30,15%, Indeks Pemberdayaan Gender 75,43 dan Partisipasi angkatan kerja perempuan baru 56,75%.
5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat tanggap dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan (*Good Governance*)

Capaian area perubahan reformasi birokrasi Kota Sabang, meliputi:

 - a. Persentase penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan sangat rendah dengan skor 62,15 %;
 - b. Maturitas SPIP masih di bawah level 3;
 - c. Penilaian Kinerja PTSP belum optimal dengan status Kurang Baik dengan nilai 56,3 Poin;
 - d. Kepatuhan Standar Pelayanan publik berada pada zona kuning (69,1 poin);
 - e. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi e-governance baru 21%;
 - f. Pengelolaan asset daerah (asset tetap/tanah) belum optimal baru mencapai 20,1% dari total asset pemerintah kota.
6. Permasalahan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota yang Berkeadilan dan Inklusif

Kemiskinan tercermin dari adanya gap pendapatan, gap kemajuan wilayah, dan kondisi fisik kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti rumah tidak layak huni, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Beberapa indikasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

 - a. Angka Kemiskinan Kota Sabang tahun 2021 sebesar 15,23% meningkat dari tahun 2020 sebesar 14,94%, sementara, Garis kemiskinan Kota Sabang (Rp. 620.373), lebih tinggi dari pada Provinsi Aceh (541.109) dan Garis kedalaman kemiskinan tahun 2021 sebesar 2,80 poin meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,94 poin.
 - b. Perlindungan sosial masih rendah, ini ditandai dengan penanganan PMKS baru mencapai 54,61% dan masih rendahnya ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan dan lain-lain.
7. Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama
 - a. Kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sabang dalam 5 (lima) tahun terakhir masih tinggi dengan rata-rata 13-21 kasus per 10.000 penduduk. Dominasi kasus yang terjadi pada penyalahgunaan narkoba dengan 17-27 kasus per tahun.

Sementara, kasus pencurian dengan menempati posisi kedua tertinggi dengan 7-23 kasus per tahun.

- b. Pelanggaran qanun syariat di Kota Sabang masih tinggi dengan jumlah kasus 121 pada tahun 2020.
- c. Potensi konflik horizontal yang muncul akibat dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada periode yang lalu terjadi relatif kecil dengan 11 kasus (1 kasus pencemaran nama baik, 5 kasus perusakan atau pemasangan APK tanpa izin, 2 kasus sengketa internal partai saat pencalonan, 1 kasus melibatkan anak di bawah umur dalam kampanye, 1 kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemili, dan 1 kasus dugaan politik uang), namun telah menggerakkan masa yang besar dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
- d. Bencana kebakaran dengan tingkat waktu tanggap /response time rate hanya 54,5 persen.

8. Permasalahan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah belum optimal
Derajat desentralisasi fiskal Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017-2021 masih rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 9,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat rata-rata 65-74 persen dan Pemerintah Aceh rata-rata 10-11 persen masih cukup tinggi.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Penegakan Syariat Islam

1. Pemanfaatan dan pengelolaan mesjid belum optimal, seperti shalat berjamaah, kegiatan remaja mesjid, pengajian dan aktifitas keagamaan lainnya.
2. Masih belum optimalnya pengelolaan Zakat, infak dan shadakah.
3. Penerapan dan Pengamalan nilai-nilai keagamaan dilingkungan pendidikan belum optimal.
4. Masih kurangnya pembinaan kemandirian terhadap Pendidikan Dayah/Pesantren.
5. Belum optimalnya pengelolaan lembaga Tahfiz Al Qur an.
6. Belum optimalnya peran ulama dalam proses pembangunan daerah.
7. Masih adanya kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam di Kota Sabang.

B. Kesehatan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan gizi masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah sakit umum, baik prasarana dan sarana gedung RS, maupun layanan sistem informasi manajemen RS.

3. Terbatasnya tenaga dokter, dokter spesialis dan SDM fungsional kesehatan lainnya.
 4. Masih ditemukannya kasus penyakit menular seperti malaria, TBC, demam berdarah.
 5. Masih rendahnya perilaku hidup sehat dimasyarakat.
 6. Masih kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga fungsional kesehatan.
- C. Pendidikan
1. Belum optimalnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
 2. Masih rendahnya fungsi pengawasan terhadap mutu pendidikan.
 3. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan terutama pada pendidikan usia dini.
 4. Masih ada guru dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1/D-IV terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar.
 5. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusif.
 6. Belum optimalnya akses, mutu dan kualitas pendidikan yang berdaya saing.
 7. Kecenderungan penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan Dasar.
 8. Rasio guru PAUD terhadap murid menurun.
- D. Kesejahteraan Sosial
1. Penerapan Sistem perlindungan sosial masih kurang tepat sasaran dan belum memanfaatkan satu basis data terpadu.
 2. Pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial belum maksimal.
 3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menangani masalah sosial dilingkungannya.
 4. Keterlibatan dunia usaha dalam penanganan masalah sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) masih kurang.
 5. Belum optimal Peran lembaga adat aceh dalam kehidupan social masyarakat
 6. Masih lemahnya pembinaan terhadap bantuan produktif Penyandang Masalah kesejahteraan sosial.
- E. Kebudayaan
1. Memudarnya nilai-nilai budaya dan norma sosial di masyarakat, terutama kalangan remaja dan pemuda.
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan.
 3. Masih terbatasnya festival seni dan budaya.
 4. Pemeliharaan terhadap situs-situs sejarah masih kurang.
 5. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan terkait kebudayaan dan tidak maksimalnya fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan aset budaya dan sejarah.
- F. Pariwisata
1. Belum optimalnya sinergisitas dalam pengelolaan sektor pariwisata.

2. Sumber daya manusia pelaku pariwisata masih kurang.
 3. masih belum ada peningkatan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.
 4. Perlunya regulasi yang mengatur pengelolaan sektor pariwisata halal.
 5. Penerapan peraturan terkait retribusi sektor pariwisata belum optimal
 6. Perlunya peningkatan koneksitas/aksesibilitas, manajemen atraksi, amenities destinasi wisata
 7. Strategi pemasaran belum komprehensif dan terpadu
 8. Destinasi pariwisata belum dapat bersaing secara regional, nasional, dan internasional
 9. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata masih kurang
 10. Belum baiknya tatakelola pariwisata.
 11. Kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata masih kurang.
 12. Belum adanya diversifikasi produk pariwisata.
- G. Bidang Pemerintahan, Politik dan HAM
1. Penyusunan, implementasi dan penegakan peraturan Daerah masih belum optimal.
 2. Belum berjalannya aplikasi *e-planning* yang bersinergi dengan *e-budgetting*
 3. Belum optimalnya fungsi pelayanan publik.
 4. Belum terlaksananya implementasi pemekaran wilayah.
 5. Minimnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing walaupun dalam masa produktif.
- H. Pekerjaan Umum
1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana jalan, terutama pada jalan strategis;
 2. Peningkatan pemeliharaan infrastruktur jalan terutama jalan status masih kurang;
 3. Masih ada pembangunan ruas jalan yang belum selesai akibat permasalahan lahan;
 4. Jaringan Ruas jalan kota masih kurang sehingga belum mampu mengembangkan potensi di seluruh wilayah Kota Sabang;
 5. Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan terutama di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
 6. Laju abrasi karena air laut belum diimbangi dengan upaya penanganan yang sesuai;
 7. Masih minimnya dokumen perencanaan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan fisik;
 8. Ketersediaan lahan di lokasi rencana masih ada yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan yang tersedia
 9. Usulan kegiatan belum mengacu pada dokumen perencanaan yang tersedia

- I. Perumahan
 1. Masih adanya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat Kota Sabang;
 2. Masih adanya rumah penduduk yang tidak layak huni yang perlu di rehab atau dibangun baru;
 3. Masih adanya masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan sendiri untuk dibangun rumah layak;
 4. Belum optimalnya upaya pemeliharaan terhadap sarana permukiman yang ada guna memperpanjang usia pakai sarana tersebut; dan
 5. Masih perlunya peningkatan kualitas layanan dasar permukiman, yang meliputi prasarana jalan lingkungan, prasarana drainase lingkungan, prasarana air bersih, serta prasarana sanitasi lingkungan.
- J. Penataan Ruang
 1. Masih kurangnya pemahaman dan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai fungsi kawasan
 2. Kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang;
 3. Belum ditetapkannya Qanun tentang RDTR dan belum optimalnya penyediaan rencana rinci kawasan strategis (RTBL);
 4. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang (masih berupa sanksi administratif) dan belum diaturnya mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang;
 5. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi kepada masyarakat dibidang penataan ruang;
 6. Rendahnya partisipasi stakeholder dalam penataan ruang, baik dalam perencanaan ruang (keterlibatan dalam proses penyusunan), pemanfaatan dan pengendalian ruang (pengurusan ijin pemanfaatan ruang); dan
 7. Ketersediaan RTH publik di Kota Sabang secara fisik sudah mencukupi, namun secara status RTH yang dikelola pemerintah masih terbatas.
- K. Perhubungan
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas;
 2. Rambu-rambu lalu lintas dan sarana dan prasarana jalan masih kurang;
 3. Sarana dan prasarana untuk uji kelayakan kendaraan bermotor belum memadai
 4. Masih adanya angkutan umum yang belum melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor;
 5. Belum tersedianya terminal angkutan umum yang mengakibatkan terbentuknya lokasi pangkalan angkutan umum bayangan;

6. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yang memadai terutama di pusat kota yang mengakibatkan kesemerautan dan kemacetan;
 7. Belum optimalnya pembinaan terhadap manajemen pengelolaan angkutan umum sehingga pergerakan angkutan umum tidak dapat dikontrol; dan
 8. Perawatan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Balohan kurang optimal;
- L. Komunikasi dan Informatika
1. Belum optimalnya penyebarluasan data dan informasi pembangunan disebabkan terbatasnya sarana teknologi informasi;
 2. Belum optimalnya kerjasama di bidang komunikasi dan informasi antara pemerintah dan mass media;
 3. Kurangnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi.
- M. Lingkungan Hidup
1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
 3. Belum optimalnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL;
 4. Ketersediaan sarana monitoring polusi belum sesuai kebutuhan;
 5. Belum optimalnya sistem penanganan/pengelolaan sampah di TPA Lhok Batee;
 6. Belum optimalnya manajemen/tatakelola persampahan Kota;
 7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah;
 8. Belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan di kawasan lindung;
 9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 10. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami.
- N. Pertanahan
1. Konflik sengketa tanah yang masih tinggi;
 2. Belum optimalnya pengamanan aset-aset tanah Pemerintah Kota;
 3. Sulitnya pengendalian penggunaan lahan, antara lain disebabkan oleh persepsi bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginan sendiri;
 4. Belum teridentifikasi tanah negara/tanah terlantar secara detail (database) dan akurat; dan
 5. Belum adanya insentif dan disinsentif dibidang pertanahan.

- O. Bidang Ketenagakerjaan
 - 1. Terbatasnya data ketenagakerjaan
 - 2. Kebutuhan lapangan kerja belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.
 - 3. Kecenderungan perusahaan menggunakan tenaga kerja luar karena lebih ekonomis.
 - 4. Tenaga kerja lokal belum dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar
 - 5. Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja perlu ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar kerja sehingga dapat menyediakan lapangan kerja dan daya saing tenaga kerja dapat meningkat.
 - 6. Metode pelatihan perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan komperensif mulai dari dasar sampai lanjutan dan diberikan bantuan peralatan sesuai jenis pelatihan sehingga peserta pelatihan menjadi mandiri dan profesional di bidangnya.
 - 7. Evaluasi dan pembinaan lanjutan terhadap tenaga kerja yang telah dilatih perlu ditingkatkan untuk melihat keberhasilan pelatihan yang telah dilaksanakan.
 - 8. Belum ada tim terpadu antar instansi, terkait perluasan kesempatan kerja sesuai potensi Kota Sabang.
- P. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
 - 2. Kondisi perkembangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil masih terbatas dan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis Sabang yang merupakan daerah kepulauan.
 - 3. Akses dan sumber pembiayaan dengan lembaga perbankan masih kurang dimanfaatkan.
 - 4. Nilai tambah produksi usaha kecil dan menengah masih perlu ditingkatkan.
 - 5. Tidak semua koperasi memiliki data akurat/ terkini mengenai kelembangaan maupun usahanya akibat belum terlaksananya RAT selama beberapa tahun terakhir.
 - 6. Pembinaan terhadap koperasi tidak aktif sangat sulit dilakukan akibat pengurus tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengaktifkan kembali koperasinya.
 - 7. Tingkat kesadaran pengurus, pengelola koperasi dan anggota masih rendah.
 - 8. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pengurus dan pengawas koperasi.
- Q. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
 - 1. Pertumbuhan investasi masih rendah;
 - 2. Infrastruktur pendukung investasi belum optimal;

3. Regulasi dan sumber daya manusia (SDM) bidang Penanaman Modal belum optimal;
 4. Data perkembangan investasi/penanaman modal belum tersedia dengan baik; dan
 5. Layanan perizinan satu pintu belum optimal.
- R. Bidang Perdagangan
1. Pedagang kaki lima dan asongan belum tertata, terutama pedagang di pusat kota.
 2. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bidang perdagangan
 3. Pengawasan terhadap peredaran barang terutama barang yang sudah kadaluarsa masih perlu ditingkatkan
 4. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrolgion pendukung pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penggunaan timbangan oleh pedagang
 5. Masih ada aset perdagangan yang belum dimanfaatkan/fungsional.
- S. Bidang Perindustrian
1. Masih ada aset perindustrian yang belum fungsional.
 2. Inovasi untuk pengembangan ekonomi kreatif pendukung kegiatan pariwisata seperti kuliner, jenis dan desain souvenir hasil kerajinan masyarakat belum optimal.
 3. Perlu peningkatan kualitas produk kerajinan masyarakat agar dapat bersaing dengan produk kerajinan dari luar Sabang.
 4. Ketergantungan pelaku IKM pada Pemerintah Daerah.
- T. Bidang Ketahanan Pangan
1. Kebutuhan lahan untuk aktivitas non-pertanian terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk
 2. Kecenderungan petani menanam tanaman non pangan juga mempengaruhi ketahanan pangan.
 3. Ketergantungan pada daratan dan transportasi laut terhadap kebutuhan bahan pangan pokok.
 4. Keamanan pangan baik bahan pangan segar maupun bahan pangan jadi masih perlu ditingkatkan. Selain itu masih ditemukan penggunaan kemasan pangan yang berbahaya.
 5. Belum tersedianya alat pengujian keamanan pangan.
 6. Diversifikasi pangan masih perlu ditingkatkan.
- U. Bidang Pertanian
1. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman belum optimal, terutama hama babi dan penyakit pada tanaman
 2. Keterlibatan dan peran Balai Penyuluh Pertanian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian masih perlu ditingkatkan.
 3. Nilai tambah produk hasil pertanian pendukung kegiatan pariwisata masih kurang.

4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan terlantar
 5. Masih ada bantuan pertanian yang belum memanfaatkan
 6. Masih ada petani yang menggunakan bahan berbahaya untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman terutama sayur-sayuran yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat.
 7. Pembinaan dan pengawasan terhadap petani dan peternak masih kurang.
 8. Penerapan peraturan daerah terkait dengan zona bebas ternak masih kurang mengingat Sabang merupakan destinasi wisata nasional dan internasional.
- V. Bidang Kehutanan
1. Masih adanya hutan lindung yang berdekatan dengan lahan masyarakat yang belum ada pal batas.
 2. Kurangnya pal batas yang permanen.
 3. Perambahan hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan.
 4. Pembukaan lahan di kawasan hutan lindung oleh masyarakat.
- W. Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan kelautan dan perikanan;
 2. Nilai tambah produk hasil perikanan masih kurang;
 3. Pengolahan hasil perikanan masih secara tradisional sehingga produk hasil perikanan belum dapat bersaing dengan produk luar dan belum berorientasi pasar;
 4. Produksi dan produktivitas pelaku usaha kelautan dan perikanan masih rendah;
 5. Penanganan pasca panen produk kelautan dan perikanan belum baik;
 6. Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang;
 7. Teknologi penangkapan belum maksimal; dan
 8. Perlunya pembinaan terhadap pembudidaya ikan khususnya yang berada di sekitar Danau Aneuk Laot agar tidak membuang limbah hasil budidaya ikan ke danau tersebut dan pembudidaya ikan pada umumnya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya untuk tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Sabang untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai inflasi, angka kemiskinan dan indeks ketimpangan (Indeks Gini). Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas Kota Sabang di tahun 2023.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memiliki tema yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan target bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 5,3 - 5,9 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 3 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 7,5 - 8,5 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran angka 5,3 - 6 persen. Tema RKP Tahun 2023 difokuskan pada: (a) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (b) peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia; (c) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*; (d) pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (e) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (f) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; serta (g) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

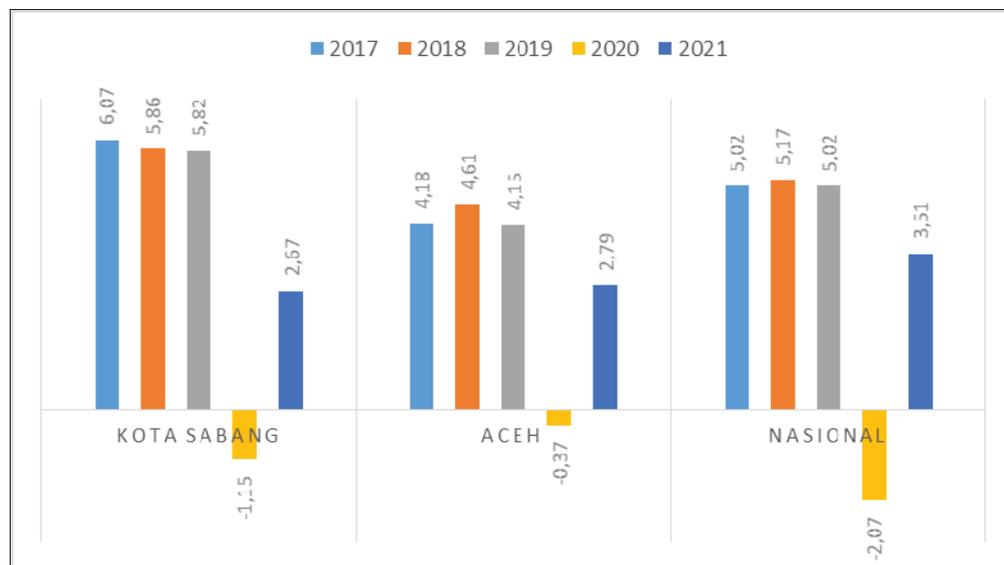
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Sabang pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Sabang yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Sabang. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah

bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Secara umum kondisi perekonomian Kota Sabang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global. Kondisi perekonomian Kota Sabang selama kurun waktu tahun 2017–2021 mengalami pertumbuhan meningkat dengan didukung oleh kebijakan pemerintah Kota Sabang antara lain pembangunan infrastruktur, bantuan langsung yang bersifat universal dalam rangka meringankan beban pengeluaran, pengendalian inflasi serta dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi. Sementara tahun 2021 pertumbuhannya ekonomi Kota Sabang mulai menggeliat kembali seiring dengan meningkatnya kembali kunjungan wisatawan ke kota Sabang.

Di samping itu ada faktor-faktor yang menunjang perekonomian kota yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah kota yakni kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor rill serta pengaruh kondisi perekonomian global yang secara langsung berdampak pada kondisi perekonomian di kota. Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Aceh.



Gambar 3.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sabang dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Sabang tahun 2021 menjadi 2,67 persen, lebih meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai berada pada -1,15 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi Aceh dan Nasional selama kurun waktu 2017 - 2019, LPE Kota Sabang masih berada di atas LPE Aceh dan LPE Nasional, namun pada kurun waktu 2020 – 2021 kembali berada di bawah LPE Aceh dan LPE Nasional.

Tabel 3.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Sabang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 x	2021 xx
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	87,08	91,17	95,81	97,55	100,62
B	Pertambangan dan Penggalian	11,17	10,49	10,52	10,76	10,96
C	Industri Pengolahan	32,51	33,88	34,75	34,09	35,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,06	2,28	2,5	2,46	2,46
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,14	2,43	3,08	2,92	2,99
F	Konstruksi	387,93	455,93	529,47	530,47	538,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	196,14	210,31	223,11	225,42	233,98
H	Transportasi dan Pergudangan	47,37	50,15	49,29	45,59	49,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,13	49,82	53,14	45,15	44,81
J	Informasi dan Komunikasi	23,3	24,38	25,66	27,66	29,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,1	33,53	36,35	37,23	38,25
L	Real Estat	46,56	48,93	52,29	52,69	54,77
M,N	Jasa Perusahaan	3,23	3,32	3,41	3,26	3,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	208,41	223,96	236,08	228,08	244,54
P	Jasa Pendidikan	49,32	53,97	63,64	66,59	70,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,91	79,65	86,64	95,14	107,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	21,1	23,59	25,84	26,34	27,5
Produk Domestik Regional Bruto		1.272,5	1.397,8	1.531,6	1.531,4	1.595,3

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Tabel 3.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sabang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 x	2021 xx
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	70,53	72,65	75,81	76,58	77,52
B	Pertambangan dan Penggalian	9,98	9,23	8,99	9,03	9,06
C	Industri Pengolahan	25,04	25,95	26,66	26,25	26,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	2	2,18	2,35	2,32	2,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,44	1,53	1,88	1,77	1,81
F	Konstruksi/Construction	299,22	327,2	361,1	357,1	359,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	155,7	164,26	169,16	167,27	170,4
H	Transportasi dan Pergudangan	38,16	39,75	38	34,94	37,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,35	35,13	36,85	31,65	31,08
J	Informasi dan Komunikasi	21,7	22,73	23,82	25,82	27,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,16	24,19	25,68	26,04	25,91
L	Real Estat	39,18	40,34	41,71	41,91	43,17
M,N	Jasa Perusahaan	2,83	2,87	2,92	2,8	2,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	167,78	176,08	181,73	173,73	182,46
P	Jasa Pendidikan	41,6	44,03	48,34	49,89	51,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,88	67,98	72,09	75,59	82,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	17,83	18,93	20,46	20,21	20,44
Produk Domestik Regional Bruto		1.015,38	1.075,03	1.137,56	1.122,89	1.152,87

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Dilihat dari nilai PDRB yang mencerminkan ukuran produktivitas nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun, kondisi ekonomi Kota Sabang terus mengalami peningkatan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2020 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 1.533.337,1 juta rupiah atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 1.532.655,09 juta rupiah, sedangkan untuk nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.124.425,9 juta rupiah atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 1.137.434,92 juta rupiah.

Tabel 3.3
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sabang

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 _a	2021 _{aa}
-1	-2	-3	-4	-5	-6	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,95	6,76	6,66	6,82	6,72
B	Pertambangan dan Penggalian	0,98	0,86	0,79	0,80	0,79
C	Industri Pengolahan	2,47	2,41	2,34	2,34	2,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,17	0,16	0,16
F	Konstruksi/Construction	29,47	30,44	31,74	31,80	31,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,33	15,28	14,87	14,90	14,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3,76	3,70	3,34	3,11	3,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,28	3,27	3,24	2,82	2,70
J	Informasi dan Komunikasi	2,14	2,11	2,09	2,30	2,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,25	2,26	2,32	2,25
L	Real Estat	3,86	3,75	3,67	3,73	3,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	16,52	16,38	15,98	15,47	15,83
P	Jasa Pendidikan	4,10	4,10	4,25	4,44	4,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,49	6,32	6,34	6,73	7,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,76	1,76	1,80	1,80	1,77
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2021 sumbangan terbesar berasal dari lapangan usaha jasa konstruksi sebesar 31,22%. Kontributor tertinggi kedua adalah dari lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang sebesar 15,83%. Kontribusi terbesar ketiga berasal dari sektor informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 6,68%. Gambaran lengkap distribusi lapangan usaha PDRB Kota Sabang dapat terlihat pada Tabel 3.3.

Dengan melihat perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, maka tahun 2023 laju perekonomian Kota Sabang diestimasikan mengalami kenaikan, yaitu tumbuh sebesar 2,8 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat

kemakmuran suatu wilayah. Pada kurun waktu 2017-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sabang cenderung mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2021 kembali bangkit walaupun hanya sebesar 2,67%. Sektor-sektor utama Kota Sabang adalah sektor tersier, antara lain akomodasi, transportasi, perdagangan besar dan eceran serta jasa pendidikan.

Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sabang.

Tabel 3.4
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang Kota Sabang 2017-2021 dan
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang 2022-2023

Realisasi/ Proyeksi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Realisasi	2017	6,07
	2018	5,86
	2019	5,82
	2020	-1,15
	2021	2,67
Proyeksi	2022	± 2,5-3,0
	2023	2,8

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022 dan Analisis

Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik maka pertumbuhan ekonomi Kota Sabang tahun 2022-2023 diperkirakan akan kembali bergerak naik. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama di Kota Sabang adalah sektor sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan sektor Kontruksi.

Dari sisi inflasi, pada tahun 2021, tingkat inflasi Kota Sabang mencapai 2,41% (merujuk pada angka inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2021). Angka ini lebih tinggi sebesar 1,13% dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 yang hanya berada pada kisaran 1,28%. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Sabang dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Namun, jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional 2021 sebesar 1,87%, maka inflasi Kota Sabang termasuk yang relatif lebih tinggi.

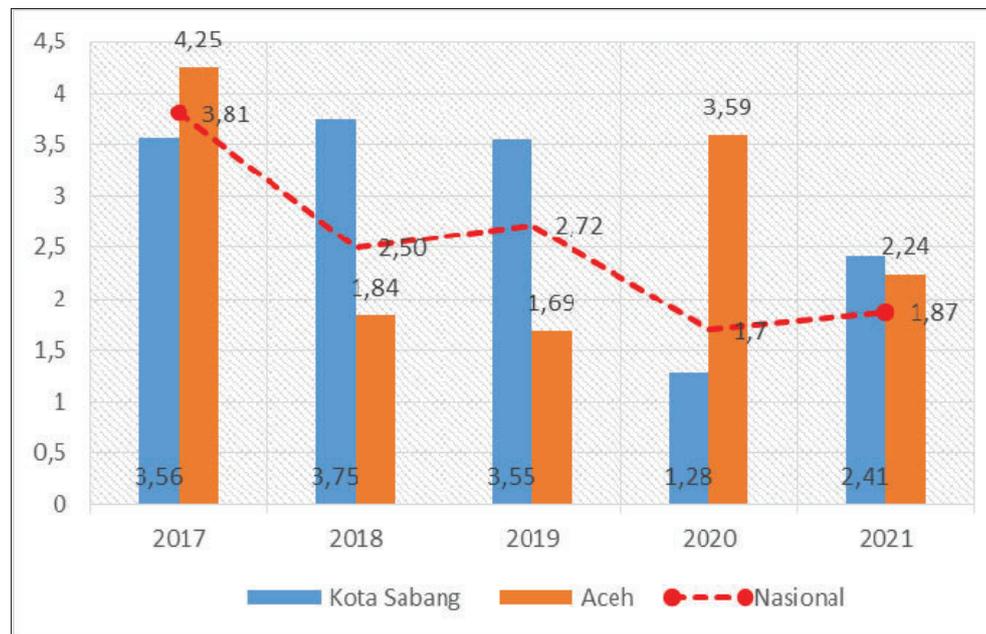
Bila pola pergerakan inflasi diasumsikan sama dengan pola pergerakan inflasi tahun-tahun sebelumnya maka tingkat inflasi Kota Sabang diperkirakan fluktuatif. Walaupun begitu tetap terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Beberapa faktor pendorong dan penghambat inflasi, antara lain adalah 1) ketersediaan bahan pangan utama, 2) fluktuasi kurs nilai tukar, 3)

fluktuasi harga minyak dunia, dan 4) rasionalitas produsen dan konsumen. Pentingnya pengendalian inflasi akan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bawah ini disajikan tingkat inflasi dan proyeksi tingkat inflasi Kota Sabang.

Tabel 3.5
Tingkat Inflasi Kota Sabang Tahun 2017-2021 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang Tahun 2022-2023

Realisasi/ Proyeksi	Tahun	Inflasi (%)
Realisasi	2017	3,56
	2018	3,75
	2019	3,55
	2020	1,28
	2021	2,41
Proyeksi	2022	2,5-3,0
	2023	2,5

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022 dan analisis.

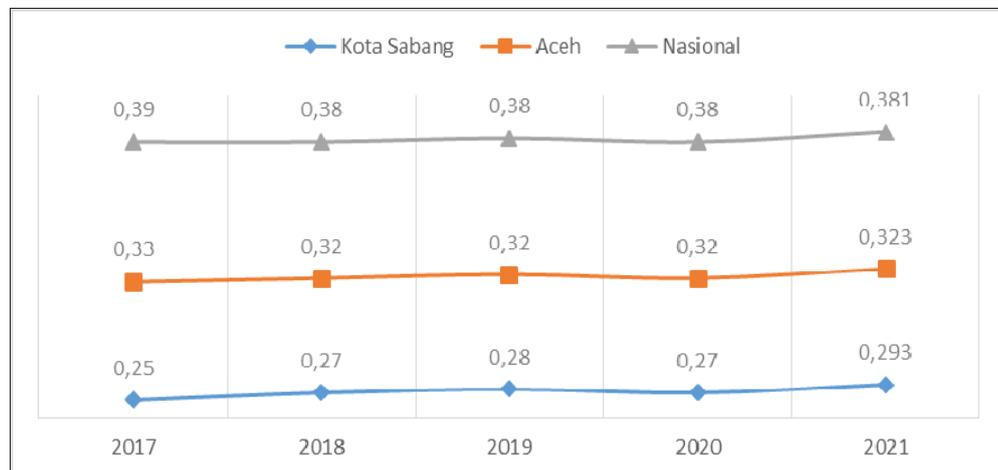


Gambar 3.2.

Laju Inflasi Kota Sabang dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Koefisien Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat

ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin kecil angka Indeks Gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat.



Gambar 3.3.
Perbandingan Indeks Gini dibandingkan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Koefisien Indeks Gini Kota Sabang pada tahun 2021 adalah sebesar 0,293 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,27. Angka ini jauh di bawah Indeks Gini Aceh dan Nasional. Dari angka Rasio Gini tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Sabang semakin rendah.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi Kota Sabang tahun 2023 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam kota sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2023 adalah:

- **Pengendalian Pandemi Covid-19**, jumlah kasus masih terus meningkat akibat masih belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan dan sementara vaksinasi diperkirakan baru bisa selesai awal tahun 2023;
- **Pemulihan Aktifitas Ekonomi Global**, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun masih sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19;
- **Letak Geografis sebagai Daerah Kepulauan dan Belum Didukung Ketersediaan Sarpras yang Belum Optimal**, mengakibatkan dalam kondisi-kondisi tertentu dapat mengganggu distribusi barang dan jasa serta pergerakan masyarakat;

- **Perubahan Harga Komoditas Global**, peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (batu bara dan CPO) akan relatif terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat *Green Recovery* pasca Covid-19;
- **Pemulihan Dunia Usaha**, sebagian dunia usaha tertutup permanen menyebabkan luka permanen bagi perekonomian. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan;
- **Pemulihan Konsumsi Domestik**, sebagian masyarakat masih menganggur dan mengalami penurunan pendapatan. Tingkat keyakinan konsumen terutama kelas menengah masih pada tingkat pesimis;
- **Jumlah penduduk** dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas;
- **Tingkat kemandirian** yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) tercatat rata-rata sebesar 9,43% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Sabang di tahun 2023 antara lain:

- Kota Sabang direncanakan menjadi kota pariwisata berskala internasional yang kembali ramai pada 2022, menyusul sejumlah infrastruktur yang akan dan tengah dibangun segera rampung, seperti modernisasi dan perluasan terminal pelabuhan Balohan, pembukaan trase jalan baru menuju kawasan wisata yang ditargetkan selesai di tahun 2022, pengembangan destinasi wisata baru dan optimalisasi kawasan wisata yang sudah ada dan pembangunan rumah sakit baru berskala internasional serta fasilitas lain untuk mendukung event di Kota Sabang.
- Posisi *geostrategic*, dengan ditetapkannya Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Weh dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Banda Aceh - Weh sekitarnya, akan menjadi suatu koridor pertumbuhan ekonomi di Sabang. Posisi *geostrategic* tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan wilayah kota maupun perkembangan wilayah Provinsi Aceh.
- Kebijakan investasi nasional, mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi melalui beberapa

strategi antara lain kemudahan perizinan, insentif investasi dan percepatan infrastruktur pendukung.

- Pasar bebas ASEAN, kondisi pasar bebas ASEAN membuka peluang bagi produk-produk lokal baik dari segi tenaga kerja, produksi maupun pemasaran.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Sabang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh Tahun 2023 maka prospek perekonomian Kota Sabang adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang tahun 2023 diprediksi akan mengalami pertumbuhan kisaran 2,8%.
- Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 2,5% dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana.
- Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan, akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2023, persentase warga miskin diprediksi dapat menurun tidak signifikan menjadi sebesar 14,96%, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan dengan meringankan beban pengeluaran masyarakat secara universal.
- Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi kisaran 3,53% melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kota Sabang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBK. Pada dasarnya APBK memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota disusun berdasarkan *money follow program* di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas kota, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyejahterakan rakyat, maka APBK harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan kota pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah Kota Sabang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Dalam hal pengumpulan pendapatan daerah, sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi. Apalagi dalam hal peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa kendala yang ditemui adalah:

1. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa qanun yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, di sisi lain masih adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
3. Belum adanya mekanisme khusus untuk mengetahui data obyek pajak, yang menyebabkan data obyek pajak tidak sesuai dengan fakta/keadaan.
4. Fasilitas obyek retribusi belum memadai khususnya pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang dilakukan oleh wisatawan.
5. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
6. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan daerah.
7. Tidak adanya sanksi tegas terhadap Wajib Pajak; khusus pajak dan retribusi petugas hanya berwenang untuk melakukan penagihan.
8. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Dengan melihat analisis kondisi/eksisting perkembangan perekonomian yang ada, mengamati perkembangan pembangunan di kawasan strategis dan melihat permasalahan yang ada, maka kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan qanun yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Sumber pendapatan daerah di Kota Sabang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan kota tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
 - d. Zakat, sebagai salah satu sumber PAD pemanfaatan zakat berlaku khusus dan perolehannya mengikuti ketentuan syariat islam.
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP,

Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - a) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (a) Dana Transfer Umum; Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi., terdiri dari:
 - Dana Bagi Hasil (DBH)
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.
 - 1) Bagi Hasil Pajak terdiri dari :
 - (1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - (2) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Peribadi
 - (3) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - (1) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - (2) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
 - (3) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
 - Dana Alokasi Khusus (DAU)
 - (b) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
Dana Alokasi Khusus Fisik/ (DAK) Fisik
Dana Alokasi Khusus Non Fisik / (DAK Non Fisik)
 - b) Dana Insentif Daerah; merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu;
 - c) Dana Otonomi Khusus, merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan;
 - d) Dana Keistimewaan, merupakan pendapatan transfer yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e) Dana Desa, merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- b. Transfer Antar Daerah, terdiri dari:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil
 - b) Bantuan Keuangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a) **Hibah**; merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) **Dana Darurat**; Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun gambaran pendapatan Kota Sabang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Sabang
Tahun 2019-2024

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		2019*	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***
1	PENDAPATAN	665.850.429.453,41	659.860.210.909,71	618.463.738.148,30	624.606.511.523,00	508.325.302.012,00	482.879.894.734,89
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	59.329.692.603,26	62.412.228.452,71	57.778.238.856,30	101.049.550.364,00	106.049.550.364,00	83.619.805.209,89
1.1.1	Pajak daerah	6.511.403.365,00	5.248.706.163,00	5.672.537.236,00	11.549.106.043,00	10.050.491.871,00	11.648.350.270,01
1.1.2	Retribusi daerah	16.510.812.414,00	21.599.701.019,16	17.429.187.303,92	28.795.938.678,00	30.294.552.850,00	26.485.682.714,22
1.1.3	Hasil Pengelolaan keuangan	2.013.106.077,00	2.012.729.861,00	1.704.207.578,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.598.234.873,42
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	34.294.370.747,26	33.551.091.409,55	32.972.306.738,38	58.704.505.643,00	63.704.505.643,00	42.887.537.352,24
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	601.196.137.245,15	591.006.742.457,00	554.961.120.292,00	517.447.781.159,00	396.166.571.648,00	393.150.909.525,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	513.007.419.625,00	499.643.741.726,00	480.667.217.966,00	434.439.865.000,00	356.715.558.000,00	356.715.558.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	478.978.998.625,00	421.014.520.726,00	436.723.932.966,00	413.374.739.000,00	342.536.233.000,00	342.536.233.000,00
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	379.312.219.498,00	350.199.215.665,00	346.032.732.064,00	342.536.233.000,00	342.536.233.000,00	342.536.233.000,00
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	9.168.876.498,00	11.887.490.665,00	13.898.304.064,00	10.401.805.000,00	10.401.805.000,00	10.401.805.000,00
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	370.143.343.000,00	338.311.725.000,00	332.134.428.000,00	332.134.428.000,00	332.134.428.000,00	332.134.428.000,00
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	99.666.779.127,00	70.815.305.061,00	90.691.200.902,00	70.838.506.000,00	-	-

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		2019*	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	79.659.565.448,00	49.144.187.566,00	69.200.803.764,00	45.782.322.000,00	-	-
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	20.007.213.679,00	21.671.117.495,00	21.490.397.138,00	25.056.184.000,00	-	-
1.2.1.1.3	Dana Insentif Daerah	10.392.723.000,00	53.472.920.000,00	17.145.258.000,00	6.885.801.000,00	-	-
1.2.1.1.4	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.5	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.6	Dana Desa	23.635.698.000,00	25.156.301.000,00	26.798.027.000,00	14.179.325.000,00	14.179.325.000,00	14.179.325.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	88.188.717.620,15	91.363.000.731,00	74.293.902.326,00	83.007.916.159,00	39.451.013.648,00	36.435.351.525,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	14.164.979.168,15	19.952.260.407,00	17.978.966.929,00	16.475.680.968,00	16.475.680.968,00	16.475.680.968,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	74.023.738.452,00	71.410.740.324,00	56.314.935.397,00	66.532.235.191,00	22.975.332.680,00	19.959.670.557,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	5.324.599.605,00	6.441.240.000,00	5.724.379.000,00	6.109.180.000,00	6.109.180.000,00	6.109.180.000,00
1.3.1	Hibah	5.323.920.000,00	6.441.240.000,00	5.724.379.000,00	6.109.180.000,00	6.109.180.000,00	6.109.180.000,00
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	679.605,00	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD dan diolah BPKD Kota Sabang (angka sementara), 2022

3.2.2. Arah kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas kota serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok PD.

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

b. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

d. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja perangkat daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

e. Optimalisasi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- 3) belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat Pemerintah Kota Sabang pada tahun 2023 merencanakan belanja hibah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah untuk. Belanja hibah ini direncanakan bagi : belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat (KIP), belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Sementara itu, belanja bantuan sosial diperuntukkan dalam menangani kejadian sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Di samping itu, pada tahun 2023 juga direncanakan pemberian insentif fiskal kepada gampong yang memiliki komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup. Konsep kebijakan ini disusun melalui pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada gampong yang berkeadilan, afirmatif dan berbasis kinerja.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Sabang Tahun 2019-2024

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		2019*	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***
2	BELANJA	676.394.205.884,87	634.608.819.986,30	679.559.410.887,45	765.594.794.297,00	565.400.402.012,00	529.197.688.713,24
2.1	BELANJA OPERASI	445.398.442.210,62	423.293.645.685,00	453.206.415.443,16	548.825.372.901,00	456.778.360.982,00	439.972.340.744,78
2.1.1	Belanja Pegawai	224.050.404.192,73	214.119.401.617,00	238.203.536.438,12	277.228.754.750,00	276.201.542.859,05	285.545.617.392,50
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.446.938.017,89	201.422.216.068,00	163.908.500.495,91	223.603.278.997,00	165.339.818.122,95	125.376.723.352,28
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	1.600.000.000,00	1.408.000.000,00	1.467.000.000,00	1.000.000.000,00	1.350.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	8.254.800.000,00	6.041.028.000,00	38.238.159.410,15	34.213.341.148,00	13.737.000.000,00	27.200.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	146.300.000,00	111.000.000,00	11.448.219.098,98	12.312.998.006,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	178.521.527.380,25	136.780.170.739,30	164.660.942.019,29	163.872.713.046,00	53.725.332.680,00	33.328.639.618,46
2.2.1	Belanja Modal Tanah	9.786.425.745,00	6.185.187.140,00	49.588.000,00	1.550.180.000,00		
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.759.672.876,60	29.090.165.548,83	20.778.659.936,00	29.561.760.816,00		
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.681.281.899,05	63.800.699.993,83	106.369.472.858,48	74.882.475.482,00		
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.319.986.088,60	35.462.525.498,63	36.157.547.274,81	57.568.999.788,00		
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	974.160.771,00	2.241.592.558,00	1.305.673.950,00	309.296.960,00		
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	12.867.483.086,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	0,00	12.867.483.086,00	0,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		2019*	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***
2.4	BELANJA TRANSFER	52.474.236.294,00	61.667.520.476,00	61.692.053.425,00	49.596.708.350,00	51.596.708.350,00	52.596.708.350,00
	Belanja Bagi Hasil	481.475.478,00	921.377.092,00	784.633.025,00	989.802.750,00	989.802.750,00	989.802.750,00
	Belanja Bantuan Keuangan	51.992.760.816,00	60.746.143.384,00	60.907.420.400,00	48.606.905.600,00	50.606.905.600	51.606.905.600
	- Bantuan Keuangan ke Desa						
	a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa					2.000.000.000	3.000.000.000
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa					14.179.325.000	14.179.325.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa					34.427.580.600	34.427.580.600
	- Bantuan Keuangan Lainnya						

* Realisasi

** Target Tahun Berjalan

*** Proyeksi

Sumber: SIPD (angka sementara) dan BPKD Kota Sabang, 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan qanun, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2019-2024

NO.	URAIAN	JUMLAH					
		2019*	2020*	2021*	2022**	2023***	2024***
1	2	3	4	5	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	144.488.282.774,00	58.075.100.000,00	50.263.922.133,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	144.488.282.774,00	58.075.100.000,00	50.263.922.133,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	144.488.282.774,00	58.075.100.000,00	50.263.922.133,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	3.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00	3.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	84.595.170.048,51	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	140.988.282.774,00	57.075.100.000,00	46.763.922.133,00

* Realisasi

** Target Tahun Berjalan

*** Proyeksi

Sumber: SIPD dan diolah (angka sementara) dan BPKD Kota Sabang, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas pembangunan RKPK Kota Sabang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang sebagaimana RPK Sabang Tahun 2023-2026, (2) kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2012, (3) hasil evaluasi RKPK tahun 2021 dan capaian kinerja RPJMK tahun 2021 (4) Isu Strategis, dan (5) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Aceh maupun Tingkat Nasional.

Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap tujuan pembangunan Kota Sabang periode 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Sabang. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Sabang, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2023, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid 19 di Kota Sabang khususnya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 yang telah ditetapkan melalui Qanun Kota Sabang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027. Pada tahap ketiga (2017-2022), RPJPD Kota Sabang telah ditetapkan berbagai prioritas pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Sabang tahun 2007-2027, yakni **“Kota Sabang yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan yang Baik dan Berwibawa”**.

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah:

1. **Maju**, dimaksudkan:
 - a. Ditinjau dari perkembangan ekonomi, yaitu meningkatnya kemakmuran daerah yang tercermin pada meningkatnya pendapatan. Berkembangnya jasa perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang memiliki keunggulan pengembangan perekonomian di sektor jasa perdagangan dan kepelabuhanan, perikanan laut, pariwisata, dan industri bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

- b. Ditinjau dari indikator sosial, yaitu meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat akan terindikasi melalui kemampuan sumber daya manusia, wawasan yang jauh kedepan, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatnya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial dan politik.
 - c. Ditinjau dari fisik dan prasarana wilayah, yaitu tersedianya sarana dan prasarana wilayah perkotaan yang lengkap dan bermutu yang bertaraf internasional serta berwawasan lingkungan sehingga terciptanya kota yang modern, bersih, indah dan nyaman.
2. **Sejahtera**, dimaksudkan dengan meningkatnya kehidupan masyarakat yang layak, berkeadilan, tertib, dan damainya kehidupan masyarakat, tertanggulangnya masalah kemiskinan dan pengangguran, kualitas tingkat kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar dan ekonomi.
3. **Aman**, dimaksudkan dengan tegaknya hukum yang adil dalam masyarakat, terwujudnya kedamaian, terhindarnya masyarakat dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar daerah, serta terhindarnya masyarakat dari bencana.
4. **Beriman**, diartikan bahwa masyarakat Kota Sabang, dalam menjalani hidupnya dengan berbagai kegiatan sehari-hari tetap tunduk, taat, dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT melalui pengamalan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.
5. **Pemerintahan yang baik dan berwibawa**, dimaksudkan pemerintahan yang baik dengan mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang demokratis, bebas KKN, transparan, akuntabel, efisien, efektif, partisipatif, dan mengupayakan kemandirian pengelolaan sumber daya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Guna mewujudkan hal tersebut, disusunlah 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang Kota Sabang tahun 2007-2027 sebagai berikut:

1. ***Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang***, yaitu:
 - a. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok usaha dan masyarakat, penataan dan pembinaan sektor informal lainnya, serta upaya menjaga ketahanan pangan.
 - b. Mendorong percepatan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melalui penyediaan infrastruktur ekonomi yang mendorong percepatan pengembangan sektor jasa kepelabuhanan, perindustrian dan perdagangan, kepariwisataan, perikanan.

2. ***Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan***, adalah pembangunan diarahkan kepada penciptaan kota yang, bersih, indah, tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan/wilayah akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terciptanya kota bertaraf internasional dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga terciptanya Kota Sabang yang maju, modern, asri dan nyaman;
3. ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan***, adalah pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan IPTEK yang berlandaskan pada pengamalan syariat Islam agar masyarakat Kota Sabang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang tinggi sehingga mampu menjadi masyarakat mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT; dan
4. ***Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik***, adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel, partisipatif), meningkatkan profesionalisme dan spiritualitas aparatur pemerintah daerah, membangun jaringan kerja sama dengan pihak lain untuk peningkatan kemampuan daerah dan pengelolaan sumber daya dengan mengimplementasikan UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Sebagai ukuran terwujudnya Kota Sabang sebagai kota yang maju, sejahtera, beriman, serta pemerintahan yang baik dan berwibawa maka pembangunan jangka panjang Kota Sabang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok. Setiap sasaran pokok dalam empat misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Adapun Prioritas rencana pembangunan Tahapan IV (RPK Sabang Tahun 2023–2026) sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi, sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
 - a. Terwujudnya kelengkapan sarana dan prasarana utama dan penunjang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port) yang fungsinya sebagai pelabuhan impor-ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transshipment) nasional.
 - b. Berkembangnya perdagangan/perniagaan di Kota Sabang yang merupakan pusat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, baik di tingkat regional (pintu gerbang ekspor-impor Aceh), nasional dan internasional.
 - c. Berkembangnya sektor pariwisata, dengan karakteristik wilayah khas dan prasarana dan sarana bermutu menjadikan Sabang sebagai Daerah Tujuan Wisata utama di Aceh dan terkenal ditingkat nasional dan

internasional dengan andalan wisata bahari, objek wisata budaya/sejarah/heritage dan wisata alam, yang berdampak pada meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat.

- d. Berkembangnya industri perikanan yang disertai meningkatnya produksi perikanan menjadi komoditi ekspor andalan Kota Sabang.
 - e. Terbangunnya Kawasan Industri Balohan (KIB) untuk pengembangan industri mekanikal/otomotif, dan industri lainnya yang berkualitas dan berdaya saing.
 - f. Berkembangnya usaha-usaha kecil menengah dan koperasi sebagai dampak dari berkembangnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang.
 - g. Terwujudnya ketersediaan sumber daya energi yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang investasi.
 - h. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2027 mencapai tingkat kesejahteraan dan kecilnya angka kemiskinan.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana, sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
- a. Terwujudnya prasarana dan sarana wilayah yang lengkap dengan kondisi baik dan merata di seluruh wilayah guna meningkatkan mutu kota dan mendukung pengembangan investasi:
 - prasarana jalan dan jembatan (jalan lingkar pulau Weh, jalan kawasan industri dan pelabuhan, jalan kota dan jalan lingkungan) dalam kondisi baik.
 - Ketersediaan sumber air baku (Danau Aneuk Laot, Embung Paya Seunara, Pria Laot, dan sumber lainnya) dan kualitas pelayanan air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan telah cukup terlayani ke seluruh wilayah. PDAM diharapkan telah dapat mendistribusikan air minum (bukan hanya air bersih) yang memenuhi standar kesehatan, dan dapat langsung diminum kepada masyarakat sesuai PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - Sistem pengelolaan air limbah dan persampahan telah berfungsi dengan baik untuk mewujudkan kota yang sehat
 - b. Terwujudnya sistem sarana transportasi darat termasuk pelabuhan penyeberangan yang lancar, efisien dan aman.
 - c. Termanfaatkannya ruang dan penatagunaan tanah secara serasi, selaras, seimbang, adil dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati.
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan dan berkembangnya perumahan vertikal di perkotaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mengantisipasi tingginya harga tanah.

- e. Terciptanya kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan perpaduan penataan kota lama dan kota baru yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
3. Pembangunan Pendidikan, sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
- a. Terjaminnya kualitas prasarana dan sarana serta tenaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
 - b. Pendidikan anak usia dini berkembang baik dalam rangka mengembangkan sikap yang baik, nilai-nilai sosial dan agama, pengetahuan dan daya cipta;
 - c. Berkembangnya pendidikan kejuruan (seperti SMK/Akademi/politeknik pariwisata, maritim, teknologi informasi, dan lain-lain) dan pendidikan non formal lainnya yang mempunyai kompetensi tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berstandar nasional maupun internasional dalam rangka memasuki dunia kerja (*market friendly*).
 - d. Meningkatnya lembaga pendidikan kejuruan, formal dan non-formal (teknologi informasi, maritim, otomotif/ industri, energi, pariwisata, dan lain-lain).
 - e. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang beriman dan berketrampilan dalam setiap jenjang pendidikan, formal dan non-formal, sehingga terwujudnya masyarakat Kota Sabang yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi.
4. Pembangunan Kesehatan, sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
- a. Tersedia sarana RSUD Sabang bertipe "B" dengan unit-unit pelayanan khusus bertaraf internasional, dan kualitas sarana Puskesmas/Pustu yang baik, serta pelayanan medis yang profesional.
 - b. Terwujudnya akses pelayanan kesehatan yang terjangkau, sumber daya manusia kesehatan yang bermutu, jaminan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seluruh unsur masyarakat, tercapainya tingkat derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, sehingga terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kota Sabang yang maju.
5. Pembangunan Pemerintahan Umum, sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas KKN.
 - b. Kemandirian pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya daerah melalui implementasi UU No. 11/2006, pengelolaan PAD dan sumber pendapatan lainnya yang sah, terutama dari hasil pengelolaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang oleh BPKS.
 - c. Terwujudnya penegakan hukum (negara, syari'at Islam, adat) penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

- d. Terwujudnya netralitas birokrasi dalam kehidupan politik dan hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah dengan DPRK, MPU, lembaga Adat, masyarakat, LSM dan lembaga non pemerintah.
 - e. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - f. Terwujudnya kepatuhan aparatur pemerintah pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efisien dan efektif.
 - g. Terwujudnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja yang berkualitas dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
 - h. Terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.
 - i. Tercapainya kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi.
 - j. Terwujudnya peran serta masyarakat yang optimal dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah.
 - k. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab.
 - l. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah.
 - m. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan
6. Pembangunan Agama, Sosial Budaya, sasaran kebijakan yang ingin dicapai adalah:
- a. Terwujudnya masyarakat yang Kota Sabang dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang baik dan kerukunan kehidupan beragama yang berperan pada terciptanya kualitas sumber daya manusia yang maju.
 - b. Terwujudnya keragaman budaya daerah yang maju yang bersendikan agama Islam yang berperan dalam kemajuan pariwisata yang khas Sabang/Aceh.
 - c. Lestarnya nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah, sistem nilai dan normanorma, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat serta mengembangkan kesenian tradisional dan kreasi baru untuk menunjang pariwisata.
 - d. Tersedianya kelengkapan dan kualitas prasarana dan sarana olah raga termasuk terbangunnya perkampungan atlet dan gedung olah raga Sabang-Merauke yang berstandar nasional/internasional dan meningkatnya prestasi olahraga daerah.

- e. Terwujudnya pemberdayaan perempuan yang maju, bersendikan agama Islam yang berperan dalam pembangunan di Kota Sabang
- f. Terwujudnya generasi muda yang berkualitas maju dan berdaya saing global dalam partisipasi pembangunan Kota Sabang
- g. Terwujudnya kemandirian penyandang masalah sosial fakir miskin, anak yatim/terlantar, penyandang cacat, dan lain-lain.

4.2 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032

Kebijakan program dan kegiatan pembangunan memerlukan ruang dan wilayah, oleh karena itu pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW Kota Sabang yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032.

Dalam RTRW, tujuan pemanfaatan ruang di Kota Sabang diarahkan untuk **“Mewujudkan Kota Sabang yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan serta Menjamin Keterpaduan Pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas”**.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang Kota Sabang, maka arahan untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan melalui kebijakan. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
2. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
3. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; dan
5. Pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026 diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027. Hubungan visi dan misi RPJPD Kota Sabang dengan tujuan dan sasaran Kota Sabang tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi RPJPD dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2023				2023				
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan (Misi 3)	Meningkatkan pengamalan Syariat Islam dan mewujudkan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik sosial masyarakat	35	%	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam	Persentase penurunan pelanggaran syariat	7,50	%	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak	Meningkatkan aktifitas dakwah dan syiar islam kepada masyarakat serta Pemakmuran tempat ibadah dengan optimalisasi manajemen serta penyediaan sarana dan prasarana	
												Meningkatkan peran ulama dalam pembangunan daerah
												Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat
												Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum
						Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	22	kasus/10.000 pddk	Peningkatan wawasan kebangsaan		

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											di Kota Sabang
											Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial
											Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik
											Meningkatkan organisasi ber-Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
							Angka pelanggaran Perda (Kasus)	77	kasus	Pengembangan kesadaran hukum dan pengawasan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan pengawasan terhadap masyarakat
										Pengembangan kepemudaan dan kepramukaan	Memberikan edukasi kepada pemuda melalui kegiatan dan ajang Pemuda serta mengoptimalkan lembaga kepemudaan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
										Pengembangan keolahragaan	Mengembangkan kapasitas dan daya saing keolahragaan
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan (Misi 3)	Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	Indek Pembangunan Manusia (Poin)	76,73	poin	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,24	Tahun	Peningkatan akses dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan daya saing siswa pada jenjang pendidikan formal dan non formal
											Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berbasis islami
											Meningkatkan kopetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
											Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pendidikan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan & pemerataan kualitas pendidikan dayah/pasantren	Meningkatkan akses, pembinaan dan pengembangan pembelajaran dayah/pasantren
						Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup (Tahun)	70,66	tahun	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
							Prevalansi stunting balita (%)	11,6	%		Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
											Meningkatkan pengawasan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman
											Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Pengendalian penduduk	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk, pengelolaan data, advokasi, dan komunikasi informasi
										Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan keluarga sejahtera
						Pengembangan dan pelestarian budaya ke-Acehan	Persentase pelestarian budaya ke Acehan	100	%	Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi
											Mengoptimalkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya
										Optimalisasi pelestarian tradisi keacehan	Meningkatkan pelestarian Adat dan Kelembagaan Adat

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan (Misi 1)	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (Persen)	14,96	%	Kemiskinan masyarakat menurun	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	2,30	poin	Optimalisasi pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
											Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
											Mengoptimalkan updating Sistem informasi kesejahteraan dengan sistem data fakir miskin yang terpadu
										Peningkatan pengelolaan ZISWAF untuk mendukung pelaksanaan ekonomi syariah	Meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola ZISWAF
						Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,70	poin	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan pembangunan kawasan gampong

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
											Meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong
										Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak	Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
											Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
											Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
											meningkatkan pengelolaan sistem informasi data gender dan anak

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan kualitas keluarga mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
										Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
											Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
											Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
						Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan (poin)	82,7	poin	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
										Peningkatan pembinaan budidaya dan produk peternakan	Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa
										Peningkatan pembinaan budidaya dan produk perikanan	Meningkatkan pembinaan nelayan perikanan tangkap dan budidaya
											Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
										Peningkatan Pengawasan wilayah pengelolaan laut dan darat	Meningkatkan pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya perikanan
										Peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
											Meningkatkan mutu dan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2023				2023		
											keamanan produk hasil pertanian
											Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan (Misi 1)	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota	Nilai PDRB Perkapita (juta)	38,5	Juta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,270	Poin	Pengoptimalan kualitas koperasi	Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengembangan koperasi
										Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Meningkatkan Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK
											Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
											Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dan lain-lain
						Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	2,8	%	Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar
											Meningkatkan penataan lahan dan pedagang
											Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional
										Pengotimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan	Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern
											Meningkatkan pengawasan pengendalian

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											harga
											Meningkatkan tata titik lokasi PKL
											Meningkatkan promosi produk UMKM
										Pengoptimalan pembinaan perindustrian	Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian
											Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian
											Meningkatkan promosi industri kreatif
											Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM
						Investasi di Kota Sabang meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	20,2	%	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan penelaahan dan pemeriksaan data terkait permohonan penanaman modal dan perizinan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi
											Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal
										Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan
											Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan
											Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan
										Pengembangan penanaman modal	Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan promosi penanaman modal
											Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal
						Angka Pengangguran berkurang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50	%	Pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Memberdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja
											Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak dasar bagi pekerja
						Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	11,25	%	Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
											Meningkatkan pelayanan pajak daerah

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan (Misi 2)	Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik (Persen)	57,2	%	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	0,915	Poin	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan
										Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai kewenangan kota
										Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Meningkatkan pembangunan dan kualitas saluran pengairan/ penyediaan bangunan talud
										Peningkatan pengelolaan tata ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Penambahan pembangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
										Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa konstruksi
										Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
											Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
											Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
											Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
											Mengoptimalkan pengelolaan air minum

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
										Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
										Peningkatan pelayanan pertanahan	Konsolidasi administrasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat
						Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,69	poin	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam dan non alam	Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran non kebakaran
						Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	74,0	poin	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan
											Meningkatkan ketertiban Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
											Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran
										Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara
										Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Meningkatkan pengelolaan RTH publik
										Peningkatan pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan (Misi 1)	Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (Persen)	23,5	%	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	2,77	Poin	Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
											Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
										Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
											Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata
Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik	Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik (Misi 4)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	55,46	Poin	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	66,23	poin	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan negara	Meningkatkan fasilitasi pengelolaan wilayah perbatasan negara
										Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan fasilitasi kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2023				2023		
										Peningkatan perekonomian dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan fasilitas kebijakan pelaksanaan perekonomian, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan SDA
										Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
										Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
											Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja program pembangunan daerah

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah
										Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
											Mengoptimalkan pengendalian anggaran
										Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
											Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
											Meningkatkan pengelolaan dana transfer

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
											Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
										Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah
											Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
											Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2023				2023			
										Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
											Meningkatkan pelayanan pajak daerah
										Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak daerah	Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah
											Meningkatkan pembinaan wajib pajak daerah
											Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
										Peningkatan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi pengawasan dan pembinaan setiap bidang pembangunan

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2023				2023		
											Optimalisasi pendampingan, asistensi, verifikasi serta monitoring dan evaluasi
										Peningkatan pelayanan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara	Optimalisasi perencanaan kepegawaian, pengembangan kompetensi pegawai, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
											penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi
										Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
											Meningkatkan pelaksanaan Pelayanan pencatatan sipil

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2023				2023		
										Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
											Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil
										Peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan	Meningkatkan sarana prasarana dan pengelola kearsipan
											Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
										Pengoptimalan fasilitasi pelaksanaan tupoksi DPRK	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPRK
										Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan budaya masyarakat gemar

VISI RPJPD	MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2023				2023		
											membaca
										Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral
										Peningkatan komunikasi publik	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
										Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
										Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informasi

4.4. Sasaran Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Sabang Tahun 2023

Sasaran pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Sabang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kota Sabang Nasional, Aceh dan Kota Sabang

No	Indikator	Target 2023		
		Nasional	Aceh	Sabang
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,9	3,5 - 3,7	2,8 - 3,0
2.	Inflasi (%)	2,0 - 4,0	2,18	2,5-3,0
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 -8,0	15,03	14,9 -14,0
4.	Tingkat Pengangguran (%)	5,5-6,2	5,64	3,5 - 4,0

Sumber: Rancangan RPJMN, RPJM Aceh dan RPK Kota Sabang

4.5. Tematik Pembangunan

Kebijakan pada RKPK Sabang Tahun 2023 memperhatikan tema dan agenda Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**. Untuk tahun 2023 tema pembangunan nasional adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2023 yang tercantum pada RPA yaitu **“Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19”**. Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPK Sabang Tahun 2023 adalah: **“Penguatan Perekonomian Daerah melalui Sektor Pariwisata yang Terintegrasi dan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kalimat kunci, yaitu:

1. **Penguatan Perekonomian Daerah**, dimaknai kemampuan pemerintah Kota Sabang dalam pengembangan kekuatan perekonomian dalam hal meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari segala komponen strategis pasca pandemi Covid-19 untuk mengembalikan penguatan dasar pembangunan Kota Sabang sebagai Kota Wisata Yang Berdaya Saing dalam Bingkai Syari’ah melalui pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.
2. **Pariwisata Terintegrasi**, dimaknai aktifitas pariwisata yang demikian kompleks dan melibatkan banyak sektor lain sebagai kunci penunjang, sehingga perlu kerja bersama dan partisipasi aktif seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada di Kota Sabang.

3. **Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal**, dimaknai sebagai aktifitas ekonomi yang mengandalkan kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal untuk dimanfaatkan dan di jadikan sebagai modal dalam mensejahterakan masyarakat.

4.6 Prioritas Pembangunan Kota Sabang

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan Rancangan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.**
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;

- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama; dan
 - d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**
Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023, “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. **Fokus Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrim 1,5-2,0%.
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%.
 - c. Nilai petani/nelayan 103-105/105-107.
2. **Fokus Penanggulangan Pengangguran disertai Peningkatan *Decent Job***, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %.
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang.
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%
4. **Fokus Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting pendek dan sangat pendek pada balita 17,5%
 - b. Insidensi TB 211 per 100 000 penduduk
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%
 - e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek dosen peneliti perekayasa berkualifikasi S3 17,48%
 - f. Rata Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun
 - g. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen.

5. **Fokus Mendorong Pemulihan Dunia Usaha**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3,50%
 - b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9 4,2 %
 - c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76 6,08 Miliar
 - d. Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun

6. **Fokus Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %
 - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 1.778,2 GW
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%

7. **Fokus Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4 5,9 %
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %
 - c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75 80
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55 6,08%
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%

8. **Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain: Air Bersih dan Sanitasi**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita 54,50m³ /det
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak , termasuk 11,5 aman
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%
 - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%
 - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 50%

9. **Fokus Pembangunan Ibu Kota Nusantara**, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi Pembangunan KIPP IKN Tahap 1A
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha*

Berdasarkan rancangan awal RKPA Tahun 2023, tema pembangunan Aceh tahun 2023 adalah “Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19”, maka Prioritas Pembangunan Aceh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif;
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 3) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan; dan
- 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta mempertimbangkan target capaian RPK Sabang Tahun 2023-2026, maka prioritas pembangunan Kota Sabang untuk Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam

Prioritas ini difokuskan pada 3 (tiga) bidang, yaitu: aqidah, syariah dan akhlak. Pelaksanaan syariat islam bidang aqidah Islamiyah sesuai Al Quran dan As Sunnah. Pelaksanaan syariat bidang syariah meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiah (pendidikan), dan pembelaan Islam. Pelaksanaan Islam bidang akhlak meliputi syiar dan dakwah.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan ditingkat primer dan rujukan.

3. Pemulihan Ekonomi

Tujuan prioritas ini ialah peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui pengembangan dan pemberdayaan industri, mengembangkan usaha perdagangan, pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional, peningkatan perluasan pasar ekspor dan daya saing, peningkatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, meningkatkan daya tarik Kota Sabang sebagai daerah tujuan investasi pengembangan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) meningkatkan kualitas infrastruktur jalan; (b) meningkatkan pelayanan sumber daya air; (c) meningkatkan penataan lingkungan permukiman dan perkotaan; dan (d) meningkatkan kinerja layanan transportasi dan komunikasi

5. Penurunan Angka Kemiskinan

Prioritas pembangunan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dengan sasaran masyarakat miskin dan pengangguran dengan melanjutkan bantuan sosial.

6. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), adat dan budaya, olahraga, kesehatan dan alam (*smart tourism*)

7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan

Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif.

8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah

a. mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah; optimalisasi belanja daerah dan pemanfaatan aset daerah secara optimal;

b. mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good governance*;

c. menciptakan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dengan strategi pengembangan sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, penerapan sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Fokus pada dukungan daerah terhadap lembaga pelaksana pemilu dan pilkada, komponen penunjang kelancaran proses pemilu dan pilkada serta mempersiapkan masyarakat menjadi pemilih cerdas jelang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

10. Pengembangan Kualitas Pendidikan

Pengembangan kualitas pendidikan melalui Sistem Pendidikan Terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, adat dan budaya ke Aceh dan berbasis TI.

11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif

Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai adat dan budaya lokal (*smart government*) mewujudkan kota cerdas (*Smart Island*).

12. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prioritas pengelolaan SDA dan pengurangan risiko bencana difokuskan pada meningkatkan konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam

dan lingkungan; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana; serta meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

13. Kemandirian Pangan

Prioritas pada peningkatan pembinaan, ketersediaan dan distribusi pangan.

14. Optimalisasi PAD

Prioritas ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah untuk kemandirian Kota Sabang dalam sektor keuangan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah



Gambar 4.1.
Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023

4.7 Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Sabang Tahun 2023

Fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Pandemi COVID-19 mengharuskan Pemerintah Kota Sabang melakukan refocusing dan realokasi APBK Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kota di Tahun 2020-2021. Dengan demikian, isu strategis yang mengemuka pada tahun rencana 2023 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Sosial Masyarakat sebagai Dampak Pandemi COVID-19”**. Isu strategis ini perlu dijawab dengan intervensi kebijakan daerah serta program dan kegiatan strategis, seperti yang tergambar pada *Road Map* Kebijakan Penanganan Dampak Pasca Covid-19.

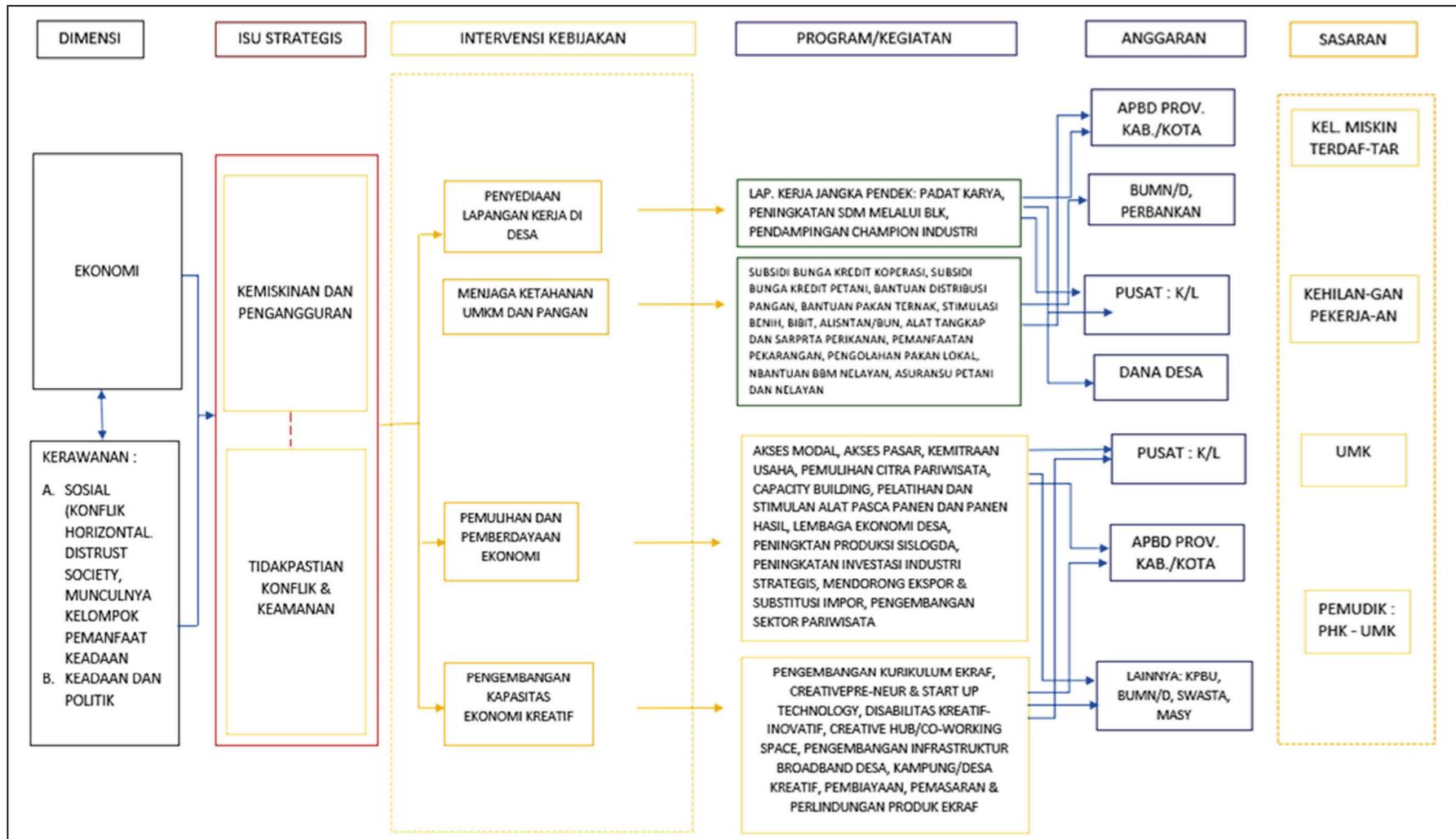
Tabel 4.3.

Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pasca COVID-19

Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Program Strategis	Sumber	Sasaran
Wabah Pandemi COVID-19	Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Sosial Masyarakat sebagai Dampak Pandemi COVID-19” (Kemiskinan, Pengangguran, Konflik, Keamanan)	Penyediaan lapangan kerja di gampong	Lapangan kerja jangka pendek: padat karya, peningkatan SDM melalui BLK	1. APBG 2. APBK 3. APBA 4. APBN	1. KK. Miskin 2. Pengangguran 3. UMKM 4. PHK
		Menjaga ketahanan UMKM dan pangan	Subsidi bunga kredit koperasi, subsidi bunga kredit petani, bantuan distribusi pangan, bantuan pakan ternak, stimulasi benih, bibit, alisntan/bun, alat tangkap dan sarprta perikanan, pemanfaatan pekarangan, pengolahan pakan lokal, bantuan BBM nelayan, asuransi	1. BUMN/D 2. APBK 3. APBA 4. APBN	

Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Program Strategis	Sumber	Sasaran
			petani dan nelayan		
		Pemulihan dan pemberdayaan ekonomi	Akses modal, akses pasar, kemitraan usaha, pemulihan citra pariwisata, <i>capacity building</i> , pelatihan dan stimulan alat pasca panen dan panen hasil, lembaga ekonomi gampong, peningkatan produksi sislogda, mendorong ekspor & substitusi impor, pengembangan sektor pariwisata	1. APBK 2. APBA 3. APBN 4. SWASTA 5. BUMD	
		Pengembangan kapasitas ekonomi kreatif	Pengembangan kurikulum ekraf, disabilitas kreatif-inovatif, pengembangan infrastruktur <i>broadband</i> gampong, gampong kreatif, pembiayaan, pemasaran &	1.APBG 2.APBK 3.APBA 4.APBN 5.Swasta 6.Masyarakat	

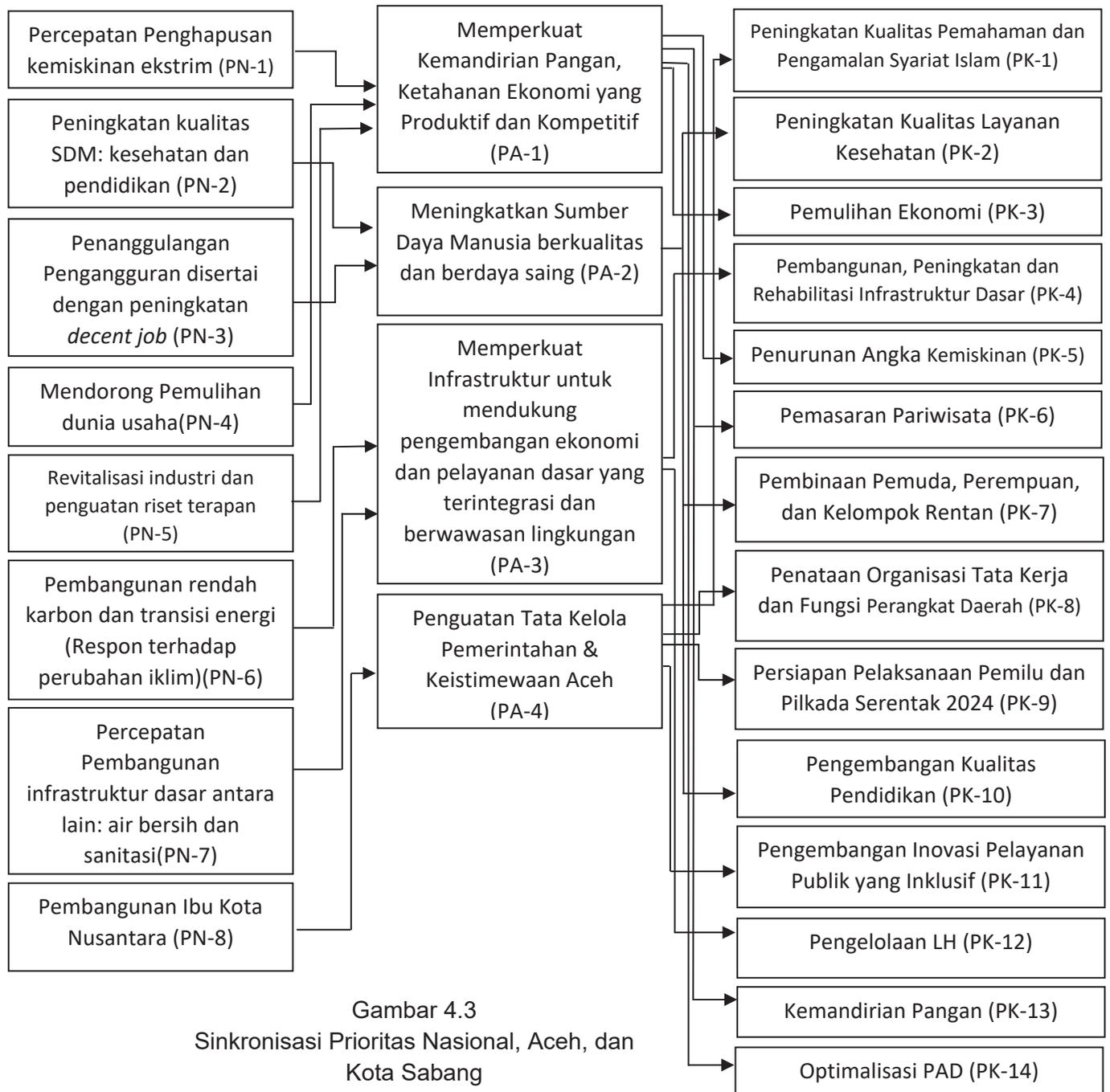
Permasa-lahan	Isu Strategis	Kebijakan	Program Strategis	Sumber	Sasaran
			perlindungan produk ekraf		



Gambar 4.2
Roadmap Kebijakan Penanganan Dampak Covid -19 Kota Sabang Tahun 2023

4.8 Penyeragaman Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Sabang

Dalam rangka menyelaraskan prioritas nasional dan prioritas Kota Sabang, maka dilaksanakan dengan penekanan prioritas pembangunan melalui intervensi Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Penyeragaman antara prioritas nasional dengan prioritas Kota Sabang melalui intervensi PD sebagaimana Tabel 4.3. Pengelompokan sasaran pembangunan berdasarkan pendekatan hubungan prioritas pembangunan di Kota Sabang dengan Aceh dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Aceh, dan Kota Sabang

Tabel 4.4.

Penyandingan Prioritas Nasional, Aceh dan Kota Sabang serta Program Prioritas Tahun 2023

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrim (PN-1)	Memperkuat Kemandirian Pangan, Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif (PA-1)	Pemulihan Ekonomi (PK-3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	22	Persen
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	20,41	Persen
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sudah RAT	51,06	Persen
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	86,27	Persen
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	9,3	Persen
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Bina Pelaku IKM	100	Persen
			Program Peningkatan Sarana Distribusi	Cakupan Bina Pedagang/ Usaha	27,78	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				Informal		
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting Dan Strategis	100	Persen
			Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	4	Pameran
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Timbangan Pedagang Yang Sudah Ditera	100	Persen
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pedagang Yang Memasarkan Barang Produk Dalam Negeri	100	Persen
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Investor yang menanam Modal	45	Persen
			Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Promosi Penanaman Modal	50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Mendorong Pemulihan dunia usaha(PN-4)			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100	Persen
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	28	Persen
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100	Persen
			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan PSKS aktif	100	Persen
		Penurunan Angka Kemiskinan (PK-5)	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	65	Persen
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100	Persen
			Program Baitul Mal	Persentase pertumbuhan zis	2,36	Persen
			Program Penanganan	Cakupan penanggulangan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan (PN-5)			Bencana	Bencana (sosial)		
		Pemasaran Pariwisata (PK-6)	Program Pemasaran Pariwisata	persentase promosi pariwisata	55,28	Persen
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pengembangan daya tarik wisata	23,44	Persen
			Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persentase SDM terlatih	34,40	Persen
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hak paten yang difasilitasi	20,00	Persen
		Optimalisasi PAD (PK-14)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	9,66	Persen
		Kemandirian Pangan (PK-13)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	skor pola pangan harapan (PPH)	82,7	Poin
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan	27,78	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				kerawanan pangan		
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase pengawasan keamanan pangan	44,4	Persen
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	2,50	Persen
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	15	Persen
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,31	Persen
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,33	Persen
			Program Pengolahan dan	Konsumsi ikan	109,50	(kg/kap)

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Pemasaran Hasil Perikanan			
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	62,50	Persen
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,44	Persen
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase penanganan bencana pertanian	17,50	Persen
			Program Penyuluhan Pertanian	persentase penyuluh pertanian yang dilatih	27,80	Persen
Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan (PN-2)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing (PA-2)	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan (PK-2)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6698	Poin
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan	100	Persen
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase gampong sehat	50	Persen
			Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,70	Persen
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	56,23	Persen
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan (KS)	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	90	Persen
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6698	Poin

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Masyarakat			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	75	Persen
Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan decent job (PN-3)		Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan (PK-7)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing (%)	43,75	Persen
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	cakupan Gugus Depan yang aktif	41,67	Persen
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	4	Urutan Peringkat
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio Pengarusutamaan Gender di Daerah	60	Persen
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang tertangani	90	Persen
			Program Pemenuhan Hak	Penilaian Kota Layak	Pratama	

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Anak (PHA)	Anak		
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	Persen
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	60	Persen
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase keluarga yang memenuhi pilar pembangunan keluarga	80	Persen
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	85	Persen
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	25	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				Sosial dan Budaya		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38,58	Persen
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50	Persen
			Program Hubungan Industrial	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undangan Ketenagakerjaan	45	Persen
		Pengembangan Kualitas Pendidikan (PK-10)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS	99,75	Persen
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33	Persen
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan PTK pada satuan pendidikan yang memenuhi	82,18	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				Standar Nasional Pendidikan		
			Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	60	Persen
			Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	55,56	Persen
			Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	60,52	Persen
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase fasilitasi even/ekshibisi seni tradisional yang dilaksanakan	19,13	Persen
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64	Persen
			Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Cakupan pembinaan adat	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (Respon terhadap perubahan iklim) (PN-6)	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan (PA-3)	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar (PK-4)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air (%)	36,67	Persen
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	92,25	Persen
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,55	Persen
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	74,17	Persen
			Program Pengembangan Permukiman	persentase pengembangan wilayah strategis	5,96	Persen
			Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber IMB	0,3	Poin
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase permukiman yang tertata	75,26	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,08	Persen
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	30	Persen
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7	Persen
			Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,139	Poin
			Program Kawasan Permukiman	Rasio pemukiman layak huni	0,75	Poin
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	24,74	Persen
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Utilitas	72,22	Persen
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan	80	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				sesuai standar		
			Program Pengelolaan Pelayaran	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	80	Persen
			Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	70	Persen
			Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	20	Persen
			Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanahan	Persentase SDM yang dibina	50	Persen
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	29	Persen
			Program Penangana Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	50	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Program Pengelolaan Energi Terbarukan	persentase pemantauan Energi Listrik Alternatif dan Terbaharukan yang dilaksanakan	100	Persen
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	75,0	Persen
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen)	60	Persen
Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi(PN-7)		Pengelolaan LH (PK-12)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan	50	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	10,00	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Hidup (PPLH)			
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan	100	Persen
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah tertangani	58,14	Persen
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyelenggaraan penyuluhan lingkungan	46,51	Persen
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup	33,33	Persen
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	62,50	Persen
			Program Pengelolaan	Persentase	35,29	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Keanekaragaman Hayati (Kehati)	pengelolaan RTH		
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	82,50	Persen
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (PN-8)	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh (PA-4)	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam (PK-1)	Program Syariat Islam Aceh	Persentase koordinasi untuk sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam (%)	100	Persen
			Program Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	100	Persen
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100	Persen
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Persentase peningkatan kewaspadaan	66,6	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial		
		Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah (PK-8)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100	Persen
			Program Pengelolaan Perbatasan	persentase capaian kegiatan pengelolaan perbatasan	100	Persen
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	Persen
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100	Persen
			Program Perumusan	Persentase	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk evaluasi	100	Persen
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	70	Persen
			Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	62,5	Persen
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase perangkat daerah yang telah	18,18	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Pengamanan Informasi	menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	Persen
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	Persen
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai	17,65	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				Peraturan Perundang - Undangan (%)		
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100	Persen
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi (%)	4,2	Persen
			Program Pendaftaran Penduduk	cakupan dokumen kependudukan	100	Persen
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100	Persen
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100	Persen
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat validitas data kependudukan	100	Persen
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase unit kearsipan yang mengelola arsip	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				sesuai standar kearsipan		
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	100	Persen
			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka (Nilai)	100	Persen
			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	persentase naskah kuno/koleksi budaya yang dilestarikan	100	Persen
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				gampong		
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100	Persen
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen
			Program Penyelenggaraan	Persentase	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			Urusan Pemerintahan Umum	pembinaan wawasan kebangsaan di gampong		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
				gampong		
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	11,11	Persen
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan perencanaan dan penganggaran gampong	100	Persen
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM aktif	100	Persen
		Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 (PK-9)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik	100	Persen
			Program Pemberdayaan	persentase	100	Persen

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Aceh (PA)	Prioritas Kota Sabang (PK)	Program			
			Nomenklatur	Indikator	Target	Satuan
			dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan		
		Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif (PK-11)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	90	Persen

(Sumber: RPK Sabang Tahun 2023-2026 dan Hasil Analisis)

Tabel 4.5.
Indikatif Belanja per Prioritas Kota Sabang Tahun 2023

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam (PK-1)	Program Syariat Islam Aceh	Persentase koordinasi untuk sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam (%)	100	Persen	3.655.486.111
	Program Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	100	Persen	500.000.000
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100	Persen	3.800.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan fasilitas penanganan konflik sosial	66,6	Persen	372.064.407
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan (PK-2)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6698	Poin	9.839.559.088
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100	Persen	5.000.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat	cakupan ketersediaan farmasi, alat	100	Persen	15.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Kesehatan dan Makanan Minuman	kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase gampong sehat	50	Persen	10.000.000
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,70	Persen	14.000.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	56,23	Persen	62.000.000
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan (KS)	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	90	Persen	20.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6698	Poin	24.438.557.603
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	75	Persen	100.000.000
Pemulihan Ekonomi (PK-3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	22	Persen	70.499.423
	Program Pengembangan	Persentase Peningkatan skala	20,41	Persen	59.999.627

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	UMKM	usaha UMK			
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sudah RAT	51,06	Persen	73.499.858
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	86,27	Persen	30.791.320
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	9,3	Persen	30.000.000
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Bina Pelaku IKM	100	Persen	620.000.000
	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Cakupan Bina Pedagang/ Usaha Informal	27,78	Persen	815.066.536
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Persentase Pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting Dan Strategis	100	Persen	45.000.000
	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	4	Pameran	69.995.395
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Timbangan Pedagang Yang Sudah Ditera	100	Persen	60.214.377
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Investor yang menanam Modal	45	Persen	23.004.932
	Program Promosi	Presentase Promosi	50	Persen	66.796.342

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Penanaman Modal	Penanaman Modal			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100	Persen	237.002.633
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	28	Persen	28.198.726
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100	Persen	26.998.270
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar (PK-4)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air (%)	36,67	Persen	1.205.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	92,25	Persen	100.000.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi	96,55	Persen	770.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	74,17	Persen	450.000.000
	Program Pengembangan Permukiman	persentase pengembangan wilayah strategis	5,96	Persen	150.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber IMB	0,3	Poin	130.000.000
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,08	Persen	2.125.000.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	30	Persen	200.000.000
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7	Persen	300.000.000
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni	0,139	Poin	100.000.000
	Program Kawasan Permukiman	Rasio pemukiman layak huni	0,75	Poin	1.400.000.000
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	24,74	Persen	350.000.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Utilitas	72,22	Persen	1.950.000.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	80	Persen	1.808.000.000
	Program Pengelolaan Pelayaran	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	80	Persen	20.000.000
	Program Pengelolaan	Persentase penyelenggaraan	70	Persen	17.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Penerbangan	operasional bandar udara			
	Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	20	Persen	103.000.000
	Program Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanian	Persentase SDM yang dibina	50	Persen	65.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanian	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian	29	Persen	103.000.000
	Program Penangana Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanian	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanian	50	Persen	38.000.000
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	persentase pemantauan Energi Listrik Alternatif dan Terbaharukan yang dilaksanakan	100	Persen	35.000.000
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	75,0	Persen	500.000.000
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (persen)	60	Persen	500.000.000
Penurunan Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan PSKS aktif	100	Persen	25.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
(PK-5)					
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	65	Persen	760.000.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100	Persen	2.330.915.130
	Program Baitul Mal	Persentase pertumbuhan zis	2,36	Persen	6.906.869.495
	Program Penanganan Bencana	Cakupan penanggulangan Bencana (sosial)	100	Persen	695.000.000
Pemasaran Pariwisata (PK-6)	Program Pemasaran Pariwisata	persentase promosi pariwisata	55,28	Persen	245.000.000
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase pengembangan daya tarik wisata	23,44	Persen	2.785.050.000
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persentase SDM terlatih	34,40	Persen	232.353.881
Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan (PK-7)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing (%)	43,75	Persen	562.032.600
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	cakupan Gugus Depan yang aktif	41,67	Persen	200.000.000
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	4	Urutan Peringkat	1.417.967.694
	Program Pengarusuta-	Rasio Pengarusatamaan	60	Persen	53.020.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	maan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Gender di Daerah			
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase KDRT yang tertangani	90	Persen	217.278.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penilaian Kota Layak Anak	Pratama		73.205.000
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	Persen	23.000.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	60	Persen	17.350.000
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase keluarga yang memenuhi pilar pembangunan keluarga	80	Persen	66.750.000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	85	Persen	787.427.263
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	25	Persen	787.427.263
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38,58	Persen	35.000.000
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50	Persen	68.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Tenaga Kerja				
	Program Hubungan Industrial	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	45	Persen	15.000.000
Penataan Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah (PK-8)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	319.511.513.520
	Program Pengelolaan Perbatasan	persentase capaian kegiatan pengelolaan perbatasan	100	Persen	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	Persen	2.000.981.850
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	Persen	1.144.018.150
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100	Persen	639.091.780
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100	Persen	324.243.077
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100	Persen	1.800.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Fungsi DPRD	DPRD			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk evaluasi	100	Persen	110.000.000
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	70	Persen	500.000.000
	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	62,5	Persen	410.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18,18	Persen	80.000.000
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	Persen	479.250.000
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	Persen	850.000.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	Persen	56.716.708.350
	Program Pengelolaan Barang Milik	Persentase Kesesuaian Pengelolaan	17,65	Persen	240.000.000

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Daerah	Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan (%)			
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100	Persen	1.198.690.471
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi (%)	4,2	Persen	581.205
	Program Pendaftaran Penduduk	cakupan dokumen kependudukan	100	Persen	125.000.000
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100	Persen	125.000.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100	Persen	229.891.032
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase unit kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	100	Persen	152.784.501
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	100	Persen	15.000.000
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka (Nilai)	100	Persen	172.804.501
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen	13.849.988
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen	55.751.980

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	dan Pelayanan Publik				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen	58.925.515
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100	Persen	189.460.465
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen	343.378.136
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persen	18.672.857
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen	76.293.940
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen	65.176.885
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100	Persen	112.591.922
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen	427.264.396
	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase penyelesaian pengaduan	100	Persen	14.979.900

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	dan Ketertiban Umum	masyarakat			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Masyarakat	100	Persen	25.000.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100	Persen	64.022.001
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan di gampong	100	Persen	209.998.985
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	Persen	335.999.114
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan perencanaan dan penganggaran gampong	100	Persen	244.000.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LPM aktif	100	Persen	177.000.000
Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 (PK-9)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik	100	Persen	7.269.707.525

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100	Persen	243.277.146
Pengembangan Kualitas Pendidikan (PK-10)	Program Pengelolaan Pendidikan	APS	99,75	Persen	9.511.180.000
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33	Persen	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan PTK pada satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	82,18	Persen	
	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase penyelenggara Majelis Pendidikan Daerah	60	Persen	389.354.248
	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	55,56	Persen	1.802.100.141
	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	60,52	Persen	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase fasilitasi even/ekshibisi seni tradisional yang dilaksanakan	19,13	Persen	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64	Persen	
	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Cakupan pembinaan adat	100	Persen	473.440.624

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif (PK-11)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	90	Persen	234.570.746
Pengelolaan LH (PK-12)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan	50	Persen	258.799.228
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	10,00	Persen	97.594.490
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan	100	Persen	19.067.235
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah tertangani	58,14	Persen	133.123.515
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup	33,33	Persen	196.708.240
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan	62,50	Persen	203.542.930

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan RTH	35,29	Persen	527.696.994
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	82,50	Persen	3.063.467.367
Kemandirian Pangan (PK-13)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	skor pola pangan harapan (PPH)	82,7	Poin	45.200.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	27,78	Persen	61.000.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase pengawasan keamanan pangan	44,4	Persen	23.800.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	2,50	Persen	45.200.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	15	Persen	1.243.571.174
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,31	Persen	88.447.529
	Program Pengawasan Sumber Daya	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan	33,33	Persen	149.999.654

Prioritas Kota Sabang	Nomenklatur Program	Indikator Program	Target	Satuan	Pagu (Rp)
	Kelautan dan Perikanan	Perikanan			
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	109,50	(kg/kap)	241.354.616
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	62,50	Persen	67.500.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,44	Persen	622.000.000
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase penanganan bencana pertanian	17,50	Persen	125.300.000
	Program Penyuluhan Pertanian	persentase penyuluh pertanian yang dilatih	27,80	Persen	110.000.000
Optimalisasi PAD (PK-14)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	9,66	Persen	240.000.000

4.9 Standar Pelayanan Minimal Kota Sabang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan, bahwa penetapan dan penerapan SPM berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah

Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6.
Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Sabang Tahun 2023

	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota	Prioritas Kota Sabang	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan; Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah; MPD
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan KB, dan RSUD

	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota	Prioritas Kota Sabang	Perangkat Daerah
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
3	Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Pelayanan informasi rawan bencana 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana 5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam; Penataan Organisasi, Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH BPBD

	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota	Prioritas Kota Sabang	Perangkat Daerah
6	Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Penurunan Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA

4.10 Pokok-Pokok Pikiran DPRK Sabang

Pokok-pokok pikiran DPRK dalam kerangka penyusunan RPK Tahun 2023 berisi saran dan pendapat DPRK yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRK dapat menjadi rencana kerja pemerintah kota di tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRK adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Sabang, dalam menyusun dokumen RPK Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Sabang 2023;
- b. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPK;
- c. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Sabang dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRK Sabang; dan
- d. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sabang yang lebih baik.

Rekomendasi DRPK Sabang dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRK tertuang dalam aplikasi SIPD dan sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Sabang 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan persampahan untuk mendukung terciptanya lingkungan permukiman dan kawasan wisata yang bersih.
2. Optimalisasi pengelolaan adat istiadat Aceh.
3. Optimalisasi pengelolaan pemerintahan gampong sebagai pemerintahan terkecil dalam mendukung agenda reformasi berokrasi.
4. Optimalisasi fungsi drainase/saluran pengendali banjir.
5. Optimalisasi hasil peternakan.
6. Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana permukiman.
7. Optimalisasi kualitas pendidikan dayah.
8. Optimalisasi layanan air bersih
9. optimalisasi pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
10. Optimalnya pelayanan RSUD
11. Optimalisasi penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
12. Optimalisasi penanganan kawasan perdesaan
13. Optimalisasi penyelenggaraan jalan
14. Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Inklusif
15. Kebutuhan peralatan pengolah hasil perikanan tangkap dan budi daya
16. Kebutuhan sarana dan prasarana perdagangan.
17. Kebutuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap
18. Kebutuhan terhadap kelengkapan rambu-rambu lalu lintas dan sarana dan prasarana jalan kota/protokol masih kurang
19. Kebutuhan terhadap prasarana pertanian
20. Kondisi rumah masyarakat tidak layak huni
21. Optimalisasi pemahaman dan pelaksanaan syariat islam
22. Pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau
23. Pelaksanaan festival seni dan budaya
24. Penyiapan sarana dan prasarana kerja
25. Pelestarian terhadap situs-situs sejarah masih kurang
26. Penyediaan lapangan kerja
27. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
28. Optimalisasi sumber daya manusia pelaku pariwisata

4.11 Inovasi Kota Sabang

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026, senantiasa dikembangkan inovasi dari mulai perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan. Pola pikir keluar dari kotak (out of the box) yang inovatif menjadi pijakan bagi penyusunan kebijakan pembangunan Kota

Sabang. Pada tabel di bawah disampaikan beberapa inovasi di Kota Sabang yang telah dan sedang terus dikembangkan Pemerintah Kota Sabang.

Tabel 4.7
Inovasi Kota Sabang

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
1.	SAPU LIDI (Saya Punya Layanan Lima Belas Menit Jadi)	Tujuannya adalah agar masyarakat dapat dengan mudah mengurus semua dokumen kependudukannya, dengan adanya layanan SAPU LIDI sehingga terwujudnya efektifitas, efisiensi dan akuntabel.		DISDUKCAPIL
2.	BAYI MAHIR (Bayi Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran)	Latar belakang Disdukcapil Kota Sabang salah satu dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan melalui pelayanan prima yang mengacu pada sistim informasi administrasi kependudukan (SI AK). Tujuan Memberikan pelayanan super cepat kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari dalam hal memberikan Akte Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga pasca kelahiran di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.		DISDUKCAPIL
3.	BANK DATA SEKOLAH TK, SD DAN SMP BERBASIS EXCEL	Pemenuhan kebutuhan data internal maupun eksternal secara akurat, terintegrasi dan cepat.		DISDIK
4.	KLINIK PERENCANAAN GAMPONG	Kepala gampong (keuchik) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang masih terbatas dalam penyusun dokumen perencanaan desa. Proses tahap perencanaan desa belum sesuai dengan jadwal yang telah diatur atau ditetapkan, sehingga realisasi		

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		anggaran tidak terserap secara optimal. Klinik Perencanaan Gampong ini diharapkan mampu menaikkan kapasitas pengetahuan Keuchik sehingga mampu menyusun dokumen perencanaan desa sesuai jadwal yang ditetapkan. Dengan demikian realisasi anggaran bisa terserap secara optimal.		
5.	GO- JENTELMEN (JEMPUT ANTAR LANGSUNG DOKUMEN)	Pelayanan Antar Jemput Langsung Dokumen Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah WNI dan Akta Kematian		DISDUKCAPIL
6.	'BAN TAN MEULABO' (BANTUAN PEMBUATAN MEREK, LABEL DAN LOGO)	<p>Melihat hal tersebut kami selaku Pembina UMKM Kota sabang melihat peluang emas untuk</p> <p>membantu Pelaku UMKM dalam pembuatan Merk, Logo dan label yang diharapkan dapat</p> <p>membantu Pelaku UMKM dalam mempromosikan Produk yang ada. adapun cara mensiasati</p> <p>kondisi tersebut salah satunya dengan membuat Label, Merk dan Logo sehingga Produk</p> <p>UMKM yang ada di Kota Sabang dapat Kita tampilkan ke luar Kota. seperti yang kita ketahui</p> <p>Virtual market merupakan jalan agar produk yang sudah diproduksi dapat kita pasarkan. kami</p> <p>melakukan Pembinaan ini sudah berjalan 2 Tahun dan sudah terdapat 85 UMKM</p>		DISPERINDAGKOP

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		<p>yang sudah kami buat Merk, Logo dan labelnya. Tujuan Hal ini dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu UMKM dalam meningkatkan Kualitas Produk dengan membuat Label, Merk dan Logo yang dapat diterima dan Kekiniian. 2. Membina UMKM dalam Pembuatan Merk, Label dan Logo agar Produk UMKM yang terdapat di Kota Sabang dapat bersaing dengan Produk lain. 3. Membantu UMKM dalam Promosi Produk. 		
7.	NGOPI BARENG UNTUK KESEHATAN	Merupakan inovasi dari kesehatan kerja, kegiatan ini dilakukan mengingat masih sering terjadi kecelakaan kerja/sakit pada saat nelayan melaut, hal ini terjadi akibat kurang kesadaran daripada nelayan untuk memeriksakan kesehatannya sebelum melaut. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jum'at di tempat pos-pos nelayan dengan cara petugas kesehatan memberikan penyuluhan dan memeriksakan kesehatan para nelayan		
8.	GAMPONG ADAT PERCONTOHAN	Belum terbentuknya acuan/pola adat istiadat di Kota Sabang secara komprehensif sehingga setiap gampong memiliki perbedaan pola yang mencolok dalam hal pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan adat istiadat, Tujuan: Teredukasinya masyarakat dalam adat istiadat di Kota		

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		Sabang		
9.	Gerakan Untuk Anak Sehat (GEUNASEH) Sabang	<p>" GEUNASEH " merupakan istilah atau singkatan dari Gerakan Untuk Anak Sehat Kota Sabang.</p> <p>"GEUNASEH" lahir dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuam Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik, yang berfokus pada upaya perbaikan gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita yang dapat meningkatkan taraf kesehatan anak.</p> <p>Geunaseh dirancang sebagai program pengentasan malnutrisi stunting yang berbasis Universal Child Grant dalam rangka pemenuhan kebutuhan esensial anak (0-6 tahun) berupa layanan untuk meningkatkan gizi serta kesehatan anak agar anak anak sabang tumbuh sehat, kuat dan cerdas. Tujuan Inovasi Daerah GEUNASEH adalah meningkatkan kualitas program pngentasan malnutrisi stunting balita melalui pendekatan preventif dan promotive dengan sasaran anak umur 0-6 tahun secara Universal yang memudahkan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan</p>		

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		<p>esensial gizi</p> <p>sesuai menu empat bintang dan layanan kesehatan tambahan serta pola asuh.</p>		
10.	<p>PENANAMAN BUNGA SERUNAI ATAU TEMBELEK AYAM</p>	<p>Manfaat dari penanaman bunga Serunai dan Tembelek Ayam berfungsi sebagai fungsida organik ramah lingkungan untuk menghindari hama serangga dan penyakit dari tanaman sayur-sayuran masyarakat. Selain untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sekaligus sebagai andil masyarakat untuk menjaga pencemaran lingkungan dari penggunaan anti hama kimia.</p>		<p>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>
11.	<p>Sistem Pelayanan Informasi Pariwisata Secara Terpadu (SIPADU)</p>	<p>Program Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia dari tahun ke tahun dinilai mampu menggerakkan daerah-daerah untuk semakin bergairah membangun pariwisata wilayahnya.</p> <p>Negara Indonesia menggelar kampanye Wonderful Indonesia, tentunya juga didukung oleh Kawasan Nusantara yang terus bergejolak meningkatkan standar pariwisata di daerahnya masing-masing. Tujuan umum dari proyek perubahan ini adalah untuk Meningkatkan Strategi Kualitas Pelayanan Informasi Pariwisata Yang Terintegrasi, Mudah Diakses Dan Up To Date Dengan Menggunakan Media Sosial Instagram dan Fanpage Facebook dan menggunakan</p>		<p>DINAS PARIWISATA</p>

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		flyer dan banner untuk mempromosikan website yang berisi informasi pariwisata terpadu tersebut		
12.	KTP UAS (KTP untuk Anak Sekolah)	Perekaman KTP Elektronik untuk Anak Sekolah yang sudah berusia 17 Tahun keatas. Petugas dari Disdukcapil akan turun langsung ke Sekolah Menengah Tingkat Atas.		DISDUKCAPIL
13.	KTP MULAS (Siap Melayani untuk Lansia atau Sakit)	Perekaman KTP Elektronik untuk Lansia dan Sakit dengan cara mendatangi langsung ke rumah-rumah penduduk yang membutuhkan.		DISDUKCAPIL
14.	AMBULANCE MEU PEU PEP PEP	Meningkatkan informasi kesehatan sangat penting bagi masyarakat, maka salah satu upaya untuk menjamin informasi kesehatan dapat diterima/diketahui oleh seluruh masyarakat adalah dengan cara penyampaian informasi melalui AMBULANCE MEU PEP PEP yang berkeliling Gampong, sehingga informasi dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat.		PUSKESMAS IBOIH
15.	MIJATJUM (Minum Jamu Tiap Hari Jumat)	Inovasi MIJATJUM merupakan inovasi dari Program Kesehatan Tradisional (KESTRAD). MIJATJUM ini lahir untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dalam mengonsumsi obat berbahan kimia. Dengan inovasi ini diharapkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan Asman Toga (Asuhan Tanaman Obat Keluarga). Untuk sementara, Puskesmas Iboih memanfaatkan Asman Toga yang ada di puskesmas untuk		PUSKESMAS IBOIH

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		dijadikan jamu, dan diperkenalkan pada masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas.		
16.	POLIRAM (Poli Igoe Rakan Aneuk Miet)	POLI IGOE RAKAN ANEUK MIET (POLIRAM) dihadirkan untuk meningkatkan kunjungan anak pada setiap puskesms dan menghilangkan kecemasan pada anak pada saat pelayanan kesehatan terutama tindakan di Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya, serta terwujudnya gigi sehat lewat program Preventif dan Promotif.		PUSKESMAS IBOIH
17.	UBERKOK (Usaha Berhenti Merokok)	<p>Tujuan dari inovasi ini adalah membuat pecandu rokok untuk berhenti merokok dengan metode Totok, serta untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok sehingga tercipta lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>Target dari inovasi ini adalah pecandu rokok dan narkoba, khususnya yang berada disepertaran Puskesmas Iboih.</p>		PUSKESMAS IBOIH
18	PENDATAAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BERBASIS ONLINE	<p>Sebelumnya proses pendataan Rumah Tidak Layak HUni (RTLH) dilakukan secara manual yaitu dengan mengajukan pertanyaan kuisisioner menggunakan media kertas/lembar kuisisioner yang didata oleh Petugas Fasilitator Lapangan (TFL), dalam proses perekapan data RTLH secara manual yaitu dengan menginput satu per satu data dari lembar kuisisioner dipindahkan ke</p>		

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		<p>dalam worksheet pada excel komputer yang mengakibatkan lambatnya proses laju sebuah kegiatan.</p> <p>Inovasi yang dilakukan adalah pendataan RTLH berbasis Online (Google Form).</p> <p>diharapkan melalui inovasi ini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini menjadi hambatan.</p> <p>Pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) berbasis online ini diharapkan dapat mempercepat proses laju sebuah kegiatan serta menghindar dari perbuatan memanipulasi data (Anti Korupsi)</p>		
19	Gerakan arisan Qurban ASN Kota Sabang	<p>Selama ini dalam pemerintahan kota sabang, ibadah qurban hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu saja. Realita dilapangan menunjukkan bahwa biaya qurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi atas, dan bagi mereka yang ingin berqurban akan melakukannya sendiri tanpa harus mengikuti arisan, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah merasa biaya qurban masih cukup tinggi, maka diperlukan adanya ta'awun'al birr (tolong menolong dalam kebajikan) antara</p>		Dinas Syariat Islam

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		<p>sesama muslim melalui media arisan. Didalam al-qur'an, as-Sunah</p> <p>maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan qurban dengan sistem arisan. Berikut adalah beberapa manfaat Inovasi Daerah Arisan Qurban ASN yang bersifat sukarela, untuk mensyiarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam berqurban: Dengan Berqurban menambah kecintaan seorang hamba kepada Allah SWT. Ketika melakukan qurban, kita akan jauh lebih bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Dan dengan berqurban dapat memupuk rasa peduli sesama</p>		
20	PEDULI (PELAYANAN DOKUMEN KELILING)	<p>inovasi PEDULI (PELAYANAN DOKUMEN KELILING), memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja sebagaimana pelayanan yang diberikan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang.</p> <p>Sebelum adanya inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan PEDULI, warga harus datang ke tempat pelayanan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sabang, pelayanan di tempat tersebut seringkali terkendala dengan banyaknya antrian sehingga menghabiskan waktu dan juga jarak yang</p>		

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		<p>jauh sehingga warga harus menyediakan waktu dengan harus meninggalkan tugas lainnya untuk ke tempat pelayanan. Tujuan utama dari program inovasi Peduli ini adalah untuk mengatasi masalah utama yaitu keterbatasan yang dialami warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan pada hari dan jam kerja reguler tetap dapat terlayani dengan pelayanan Jemput Bola Gampong ke Gampong</p>		
21	le Meulee gleh	<p>Menjadikan le Meulee sebagai kampung terbersih di Kota Sabang, guna meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat Jumlah Pariwisata Di Kota Sabang semakin meningkat</p> <p>Sasaran untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dengan terbentuknya kelompok "le Meulee gleh" menjadikan gampong ie meulee gampong yang bersih, tertib, sejuk, indah, aman, ramah dan kenangan</p>		
22	HKN (Hari Kesehatan Nelayan)	<p>Merupakan inovasi dari kesehatan kerja, kegiatan ini dilakukan mengingat masih sering terjadi kecelakaan kerja/ sakit pada saat nelayan melaut, hal ini terjadi akibat kurang kesadaran daripada nelayan untuk memeriksakan kesehatannya sebelum melaut. kegiatan ini dilakukan setiap hari jum'at di tempat pos2 nelayan dengan cara petugas kesehatan</p>		

No	Inovasi (Nama Inovasi)	Gambaran Inovasi (Gambaran Umum Maksud dan Tujuan Inovasi)	Keterkai- tan dengan Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana
		memberikan penyuluhan dan memeriksa kesehatan para nelayan		
23	POSYANDU LANSIA	Bentuk pelayanan terpadu untuk masyarakat usia lanjut di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan		

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPK Sabang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPK ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Rencana program dan kegiatan tahun 2023 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPK ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPK ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2023. Prioritas Program dalam RKPK tahun 2023 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib, urusan pilihan, penunjang dan unsur kekhususan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 5.2
Rencana Kegiatan Sumber Dana DOKA Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	USULAN KAB/KOTA BERDASARKAN KEWENANGAN KAB/KOTA	VOLUME	SATUAN	LOKASI	PAGU (Rp)	KRITERIA BIDANG OTSUS (6+2)
							22.975.332.680	
1	DSIPD	1.01.07.2.01.01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Pembangunan Asrama Putra Pesantren Al-Mujaddid	470	Meter	Sukajaya	1.000.000.000	PENDIDIKAN
2	DISDIKBUD	1.01.02.2.01.06- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penyediaan Utilitas Sekolah Terpadu	1	paket	Sukajaya	2.000.000.000	PENDIDIKAN
3	DISDIKBUD	1.01.02.2.01.22- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan peralatan TIK UNBK	1	paket	Sukajaya	1.000.000.000	PENDIDIKAN
4	DINKES & KB	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Penanggulangan Stunting	420	Anak	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	3.900.000.000	KESEHATAN
5	DSIPD	9.01.02.2.04.13- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Pengembangan Masjid Babussalam	1	Paket	Sukakarya	1.163.305.880	KEISTIMEWAN

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	USULAN KAB/KOTA BERDASARKAN KEWENANGAN KAB/KOTA	VOLUME	SATUAN	LOKASI	PAGU (Rp)	KRITERIA BIDANG OTSUS (6+2)
6	DSIPD	9.01.02.2.04.13- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Peningkatan Mesjid Ujong Kareung	1	Paket	Sukajaya	500.000.000	KEISTIMEWAN
7	DSIPD	9.01.02.2.04.13- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Peningkatan Mesjid le Meulee	1	Paket	Sukajaya	512.180.230	KEISTIMEWAN
8	SET MPU	9.01.03.2.01.03- Pendidikan Kader Ulama	Pengkaderan Ulama Se Kota Sabang	1	Paket	Sukakarya	500.000.000	KEISTIMEWAN
9	DINSOS PMGPPPA	1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	Bantuan alat bantu bagi disabilitas	1	Jenis	Kota Sabang	500.000.000	EKONOMI
10	DINSOS PMGPPPA	1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Modal usaha bagi masyarakat miskin (UEP)	114	KPM	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	2.003.349.804	EKONOMI

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	USULAN KAB/KOTA BERDASARKAN KEWENANGAN KAB/KOTA	VOLUME	SATUAN	LOKASI	PAGU (Rp)	KRITERIA BIDANG OTSUS (6+2)
11	DISPERINDAG KOP	3.30.4.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pasar murah bagi masyarakat miskin	3	Kali	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	595.066.536	KEMISKINAN
12	DINAS PUPR	1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembuatan WC untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	50	unit	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	500.000.000	EKONOMI
12	DINAS PUPR	1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni	10	unit	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	1.200.000.000	EKONOMI
13	DP2	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan petani sayuran dan palawija	200	Petani	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	500.000.000	EKONOMI

NO	PERANGKAT DAERAH	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	USULAN KAB/KOTA BERDASARKAN KEWENANGAN KAB/KOTA	VOLUME	SATUAN	LOKASI	PAGU (Rp)	KRITERIA BIDANG OTSUS (6+2)
14	DKP	3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (8 unit rumpon dangkal)	8	unit	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	540.000.000	EKONOMI
15	DLHK	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pelatihan pembuatan kompos bagi masyarakat miskin	90	Orang	Sukajaya/ Sukakarya/ Sukamakmue	500.000.000	EKONOMI
16	DINAS PARIWISATA	3.26.02. 2.03.04- Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penataan kawasan Teupin Layeu	1	Paket	Sukamakmue	2.500.000.000	EKONOMI
17	RSUD	1.02.02.2.01.01- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang	1	Paket	Sukajaya	3.561.430.230	KESEHATAN

Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPK Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1															
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1														
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1	1	1													
1	1	1	2.01												
1	1	1	2.01	1											
1	1	1	2.01	2											
1	1	1	2.01	6											
1	1	1	2.01	7											
1	1	1	2.02												
1	1	1	2.02	1											
1	1	1	2.02	5											
1	1	1	2.06												
1	1	1	2.06	1											
1	1	1	2.06	5											
1	1	1	2.06	6											
1	1	1	2.06	9											
1	1	1	2.07												
1	1	1	2.07	2											
1	1	1	2.08												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2 Laporan	2,499,960	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	2,499,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3 Laporan	4,999,995	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Laporan	4,999,995	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Teradministrasinya keuangan perangkat daerah dengan baik	100 %		0 %	100 %		72,677,880,465							100 %	79,945,168,520	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						644 Orang/bulan	72,672,880,545	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	644 Orang/bulan	79,940,168,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	2,499,960	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1 Laporan	2,499,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						1 Dokumen	2,499,960	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1 Dokumen	2,499,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							491,834,318								491,834,318	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 paket	5,665,485	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 paket	5,665,485	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5 paket	109,111,093	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		5 paket	109,111,093	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						20 paket	120,000,240	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		20 paket	120,000,240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						3 dokumen	6,243,500	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		3 dokumen	6,243,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 laporan	250,814,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 laporan	250,814,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							715,967,221								715,967,221	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						100 Laporan	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		100 Laporan	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						100 Laporan	147,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		100 Laporan	147,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						25 laporan	2,956,980	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		25 laporan	2,956,980	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						100 Laporan	565,010,241	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Laporan	565,010,241	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %		240,788,798							100 %	240,788,798	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						20 Unit	40,791,748	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	40,791,748	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 Unit	199,997,050	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2 Unit	199,997,050	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS	100 %		0 %	99,75 %		31,545,618,085							99,75 %	33,278,857,337	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI sederajat	100 %		0 %	70 %		20,909,125,141							70 %	21,036,815,238	
1	1	2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						0 Unit	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	0 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	425,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	25 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang	11,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	11,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang	20,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	2,036,200,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	2,036,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	40,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	90,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	9,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	9,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	7,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	7,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 Unit	7,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	7,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	25 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	25 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket	111,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	122,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	25 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4762 Peserta Didik	10,556,009,690	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	4762 Peserta Didik	10,661,569,787	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	1,003,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Paket	1,013,030,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	25 Satuan Pendidikan	205,700,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	25 Satuan Pendidikan	205,700,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	173,534,137	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	250 Peserta Didik	173,534,137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan	22,500,657		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	22,500,657	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	6,109,180,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Satuan Pendidikan	6,109,180,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25 Orang	20,000,657	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Orang	20,000,657	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	25 Ruang	36,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	36,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	17,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	25 Ruang	17,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs Sederajat	100 %						70 %	9,168,170,213	
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2033 Peserta Didik	8,667,990,310	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2033 Peserta Didik	8,754,670,213	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	2033 Peserta Didik	280,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	2033 Peserta Didik	280,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	90 Peserta Didik	99,999,692	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	90 Peserta Didik	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Alokasi Umum						
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	9 Satuan Pendidikan	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Satuan Pendidikan	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Satuan Pendidikan	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9 Orang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Orang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	9 Ruang	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	100 %	0 %	73 %	497,431,056			73 %	2,013,000,000	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	29,286,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	20 Unit	401,145,056	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	2,001,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Unit	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20 Paket	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	20 Paket	20,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	2,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	20 Paket	40,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Paket	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1634 Peserta Didik	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1634 Peserta Didik	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	20 Satuan Pendidikan	1,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Melek Huruf	100 %	0 %	75 %	1,060,571,886			75 %	1,060,871,886	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1634 Peserta Didik	205,510,425	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10_Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	1634 Peserta Didik	205,510,425	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				48 Orang	30,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	48 Orang	30,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	825,061,461	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Satuan Pendidikan	825,061,461	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33 %	0 %		33,33 %	24,992,000					33,33 %	24,992,000		
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase uji kompetensi guru	100 %	0 %		70 %	24,992,000					70 %	24,992,000		
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				3 Dokumen	24,992,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Dokumen	24,992,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan PTK pada satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	77,54 %	0 %		82,18 %	1,000,000					82,18 %	1,000,000		
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase uji kompetensi guru	100 %	0 %		75 %	1,000,000					75 %	1,000,000		
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	3 Dokumen	1,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,435,490,409							1,547,945,289	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	66,67 %	0 %		60,52 %	1,228,425,133						60,52 %	1,338,809,360	
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sanggar seni yang dibina	75 %	0 %		65 %	138,425,399						65 %	139,809,653	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	108,425,399	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	4 Objek	109,509,653	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				8 Orang	30,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	8 Orang	30,300,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek kemajuan tradisi budaya	85 %	0 %		65 %	1,089,999,734						65 %	1,198,999,707	
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	1,089,999,734	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	4 Objek	1,198,999,707	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase fasilitasi even/ekshibisi seni tradisional yang dilaksanakan	25 %	0 %		19,13 %	150,000,000					19,13 %	151,500,000		
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	80 %	0 %		65 %	150,000,000					65 %	151,500,000		
2	22	3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				127 Lembaga	150,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	127 Lembaga	151,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64 %	0 %		10,64 %	57,065,276					10,64 %	57,635,929		
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs yang terawat	75 %	0 %		65 %	57,065,276					65 %	57,635,929		
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				120 Objek	57,065,276	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	0	120 Objek	57,635,929	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2						51,024,883,618							173,305,187,113	
1	2	1					26,286,326,015						100 %	32,037,231,928	
1	2	1	2.01				12,629,118						65 Poin	16,124,813	
1	2	1	2.01	1				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	3 Dokumen	3,846,838	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.01	2				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Dokumen	3,849,896	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.01	6				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Laporan	2,199,137	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.01	7				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Laporan	6,228,942	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.02				21,720,455,016						100 %	23,894,219,517	
1	2	1	2.02	1				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	183 Orang/bulan	23,887,594,517	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.02	5				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Laporan	3,625,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.02	6				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Dokumen	3,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.06				238,131,847						100 %	796,285,224	
1	2	1	2.06	1				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Paket	46,699,576	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.06	2				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Paket	261,543,776	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.06	5				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Paket	356,546,922	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.06	6				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		4 Dokumen	7,726,950	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.06	9				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	123,768,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.08				3,934,224,350							6,468,941,710	
1	2	1	2.08	1				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		6000 Laporan	9,379,975	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.08	2				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	928,225,633	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.08	3				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		3 Laporan	65,945,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.08	4				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Laporan	5,465,391,102	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2.09				380,885,684						100 %	861,660,664	
1	2	1	2.09	2				Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	0 Unit	274,965,277	Rumah Sakit Umum Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit		Sukakarya, Kuta Ateuh	(PAD)	Layanan Kesehatan	Sabang	13 Unit		Daerah		
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81,450,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	1 Unit	471,085,772	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	74,330,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	ASN dan Non ASN RSUD Kota Sabang	10 Unit	115,609,615	Rumah Sakit Umum Daerah	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6728 %						0,6698 %	141,167,955,185		
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kategori Sarana dan Prasarana kerja kesehatan yang memenuhi standar	100 %						100 %	112,826,685,222		
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3,561,430,230	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	17,199,943,739	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	2,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	0 Unit	90,500,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	4 Unit	199,999,761	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	4 Unit	309,893,124	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	506,015,871	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	556,617,458	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	696,929,845	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	2,131,986,978	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	48 Unit	83,212,025	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	48 Unit	104,970,206	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1,563,504,600	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Paket	1,880,302,458	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	9 Unit	120,786,042	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	9 Unit	142,971,259	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	100 %						100 %	28,243,369,963		
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	12,904,900	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Dokumen	14,195,390	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	465,743,159	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Dokumen	600,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	17,200,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Dokumen	27,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	136,031,195	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	masyarakat	1 Unit	629,174,573	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penerapan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100 %						100 %	97,900,000		
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	89,999,975	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1 Dokumen	97,900,000	Rumah Sakit Umum Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28 Unit		0 Unit	25 Unit	250,000,000					25 Unit	275,000,000			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	250,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	25 Unit	275,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6728 %		0 %	0,6698 %	9,701,559,088					0,6698 %	9,981,200,005			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %		0 %	100 %	1,176,000,000					100 %	918,200,000			
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	1,099,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	0 Unit	800,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit		Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit	20,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Unit	20,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				18 Unit	15,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	18 Unit	20,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Unit	15,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	10,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Unit	15,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				6 Unit	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Unit	5,500,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				6 Paket	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Paket	15,000,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				6 Paket	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Paket	5,500,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Unit	1,100,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				6 Paket	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Paket	1,100,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100 %		0 %	100 %	8,461,479,088					100 %	8,993,400,005			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		Dinkes dan KB Kota Sabang	81 Orang	5,500,000		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	80 Orang	5,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	82 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	90 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	70 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	79 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12 Orang	529,080,096	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Orang	570,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	0 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78 Orang							78 Orang		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2773 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2773 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	144 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	144 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	20 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	20 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	253 Dokumen	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	253 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen	4,257,739,608	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	16 Dokumen	4,400,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Dokumen	2,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	210,659,384		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	220,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23 Dokumen	300,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	23 Dokumen	330,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	29 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	29 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				52 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	52 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				5 Dokumen	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	3,000,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	3,300,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				5 Dokumen 0 Orang	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	5 Dokumen 0 Orang	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	50,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	100 Dokumen	52,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	10,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit	12,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Unit	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						2,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang		2,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100 %		0 %	100 %	10,000,000						100 %	10,400,000	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				16 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	16 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				16 Dokumen	5,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	16 Dokumen	5,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes yang terakreditasi / jumlah keseluruhan faskes	%		%	100 %	54,080,000						100 %	59,200,000	
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Unit	2,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				4 Unit	52,080,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	4 Unit	57,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100 %		0 %	100 %	2,500,000						100 %	2,600,000	
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 %		0 %	100 %	2,500,000						100 %	2,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6 Orang	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	6 Orang	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh izin kelaikan	100 %	0 %	100 %	7,500,000			100 %	7,800,000	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	0 %	100 %	2,500,000			100 %	2,600,000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	0 %	100 %	2,500,000			100 %	2,600,000	
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	0 %	100 %	2,500,000			100 %	2,600,000	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase gampong sehat	95 %	0 %	50 %	5,000,000			50 %	5,200,000	
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 %	0 %	100 %	5,000,000			100 %	5,200,000	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Dokumen	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.02	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	35 Keluarga	2,500,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	35 Keluarga	2,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					58,000,000				63,050,000	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					7,000,000				7,700,000	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					2,000,000				2,200,000	
2	14	2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bogoras, KBKBC)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		1 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	14	2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase regulasi kependudukan yang tersedia	%	%				100 %	5,500,000		
2	14	2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	2 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	2 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	9	Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	3 Dokumen	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	3 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	12 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	14	Pembiinan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembiinan dan Pengawasan	1 Laporan	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Dinkes dan KB Kota Sabang	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	67,54 %	0 %				56,23 %	34,000,000	36,800,000	
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rasio Akseptor KB	100 %	0 %				100 %	7,000,000	7,700,000	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9 Organisasi	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	9 Organisasi	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	1 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	1 Dokumen	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	3 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	3 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Dinkes dan Kb Kota Sabang	3 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	100 %	0 %				100 %	4,000,000	4,400,000	
2	14	3	2.02	1	Pembiinan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembiinan IMP dan Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	18 Organisasi	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinkes dan Kb Kota Sabang	18 Organisasi	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	1,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinkes dan Kb Kota Sabang	10 Unit	1,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Paket	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Paket	16,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	13,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	30 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	314 Laporan	0 Laporan		294 Laporan	542,000,000						294 Laporan	623,500,000		
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	15 Laporan	6,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	4 Laporan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	10 Laporan	17,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	38 Unit	0 Unit		33 Unit	225,000,000						33 Unit	300,000,000		
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	17 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	3 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	%		36.67 %	1,972,000,000						36.67 %	1,975,000,000		
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	%		36.67 %	1,972,000,000						36.67 %	1,975,000,000		
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Anoe Itam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Kota Sabang	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	2	2.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Kota Sabang	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.1 KM	100,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Batee Shoek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			Kota Sabang	0.1 KM	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.4 KM	1,292,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Kota Sabang	0.4 KM	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	2	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.3 KM	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	0.3 KM	125,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.1 KM	110,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Krueng Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	0.1 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	95,22 %	0 %	92,25 %		550,000,000						92,25 %	200,000,000	
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60 Liter/Detik	0 Liter/Detik	50 Liter/Detik		550,000,000						50 Liter/Detik	200,000,000	
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun			20 Liter/Detik		550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	20 Liter/Detik	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100 %	0 %	96,55 %		870,000,000						96,55 %	800,000,000	
1	3	5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	55 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	47 Rumah Tangga		870,000,000						47 Rumah Tangga	800,000,000	
1	3	5	2.01	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			50 Rumah Tangga		700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus			Masyarakat Kota Sabang	50 Rumah Tangga	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			50 Rumah Tangga		170,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Barat	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan			Masyarakat Kota Sabang	50 Rumah Tangga	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	77,68 %	0 %	74,17 %		1,595,000,000						74,17 %	500,000,000	
1	3	6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2160 Meter	0 Meter	1998 Meter		1,595,000,000						1998 Meter	500,000,000	
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun			1000 M		1,595,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	1000 M	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Wilayah Strategis	%	%	5,96 %		150,000,000						5,96 %	200,000,000	
1	3	7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Prasana Permukiman	Sistem Jaringan	Sistem Jaringan	3 Sistem Jaringan		150,000,000						3 Sistem Jaringan	200,000,000	
1	3	7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			2 Sistem Jaringan		150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Kota Sabang	2 Sistem Jaringan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber IMB	0,32 point	0 point	0,3 point		180,000,000						0,3 point	150,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.8.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Penataan Bangunan Gedung	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	180,000,000						3 Dokumen	150,000,000	
1.3.8.2.01.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				5 Dokumen	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat Kota Sabang	5 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	%		%	93.08 %	2,424,000,000						93.08 %	3,000,000,000	
1.3.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	%		%	93.08 %	2,424,000,000						93.08 %	3,000,000,000	
1.3.10.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				2 Dokumen	299,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	2 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.10.2.01.4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2 KM	1,600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	2 KM	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				2 KM	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kota Sabang	2 KM	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	65 %		0 %	30 %	200,000,000						30 %	400,000,000	
1.3.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	150 Orang		0 Orang	150 Orang	100,000,000						150 Orang	200,000,000	
1.3.11.2.01.4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	50 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Informasi Jasa Konstruksi	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000						3 Dokumen	100,000,000	
1.3.11.2.02.7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan Jasa Konstruksi	1 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	50,000,000						2 Laporan	100,000,000	
1.3.11.2.04.1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7 %		0 %	65,7 %	300,000,000						65,7 %	500,000,000	
1.3.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kota Sabang	1 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	140,000,000						2 Dokumen	200,000,000	
1.3.12.2.01.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.3.12.2.01.3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	3	12	2.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000					1 Dokumen	200,000,000		
1	3	12	2.02	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	3	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000					4 Dokumen	100,000,000		
1	3	12	2.04	4		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas PUPR Kota Sabang	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	4					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							14,645,000,000		6,100,000,000				
1	4	2				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	0,139 point	0 point	0,139 point	100,000,000						0,139 point	200,000,000	
1	4	2	2.01			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana	Unit Rumah	Unit Rumah	10 Unit Rumah	100,000,000					10 Unit Rumah	200,000,000		
1	4	2	2.01	1		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	4	3				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	1 point	0 point	0,75 point	1,800,000,000						0,75 point	1,500,000,000	
1	4	3	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 Unit Rumah	0 Unit Rumah	100 Unit Rumah	1,800,000,000					100 Unit Rumah	1,500,000,000		
1	4	3	2.03	8		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun			10 Unit	1,800,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Paya Seunara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus			Masyarakat PUPR Kota Sabang	10 Unit	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	4	4				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	0 %	0 %	24,74 %	1,780,000,000						24,74 %	400,000,000	
1	4	4	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh	60 Unit Rumah	0 Unit Rumah	60 Unit Rumah	1,780,000,000					60 Unit Rumah	400,000,000		
1	4	4	2.01	1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			10 Unit Rumah	1,780,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Sabang	10 Unit Rumah	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	4	5				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Utilitas	88,89 %	0 %	72,22 %	10,965,000,000						72,22 %	4,000,000,000	
1	4	5	2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	12 Lokasi	0 Lokasi	12 Lokasi	10,965,000,000					12 Lokasi	4,000,000,000		
1	4	5	2.01	2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			18 Lokasi	10,965,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar		Masyarakat Kota Sabang	18 Lokasi	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5,570,245,496		17,815,832				
1	5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	100 %	4,570,245,496						100 %	7,815,832	
1	5	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	12,499,106						100 %	124,99	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Dokumen	34,996	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Dokumen	34,996	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	19,999	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	34,999	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan	100 %		0 %	100 %	4,058,697,030				100 %	4,076,692	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	80 Orang	4,056,697	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Laporan	19,995	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	179,356,318				100 %	417,221	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3,999,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	8 Paket	39,993	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	14,222,782		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	40 Paket	142,227	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2,999,533		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Paket	29,995	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Dokumen	52,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	152,926,623		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	30 Laporan	152,926	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	93,721,425						100 %	937,213	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	674,36		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	120 Laporan	6,743	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	83,298,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	36 Laporan	832,982	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Laporan	4,972,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	36 Laporan	49,725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				375 Laporan	4,776,325		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	375 Laporan	47,763	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %	100 %	225,971,617						100 %	2,259,716	
1.5.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	222,731,617		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pemenuhan Serta Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Sesuai Kebutuhan	21 Unit	2,227,316	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	2,160,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH Kota Sabang	1 Laporan	2,376,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	3,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Satpol PP dan WH Kota Sabang	1 Laporan	3,850,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	83 Org/Bln		0 Org/Bln	83 Org/Bln	7,112,189,845								83 Org/Bln	7,823,408,829	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	7,110,029,845	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH Kota Sabang	83 Orang/bulan	7,821,032,829	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,160,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH Kota Sabang	1 Laporan	2,376,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	83 Org		0 Org	2 Org	15,000,000								2 Org	16,500,000	
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	15,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH	2 Orang	16,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kewajaran laporan administrasi umum	100 %		0 %	100 %	269,521,674								100 %	296,473,840	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,130,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten /Kota	1 Paket	6,743,957	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	57,639,939	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten /Kota	1 Paket	63,403,932	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,173,760	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten /Kota	1 Paket	23,291,136	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,500,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten /Kota	1 Dokumen	4,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	180,077,105	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten /Kota	1 Laporan	198,084,815	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						144,631,870									159,095,057	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,850,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	2,035,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	100,998,920	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	111,098,812	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	34,787,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	38,265,700	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	6,995,950	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	7,695,545	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah		
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						276,640,000									304,304,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	4,600,000,000							5,005,029,998	
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	0 %		0 %	100 %	1,454,520,156							1,545,002,170	
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1,203,081,577	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Dokumen	1,323,389,734	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	194,739,019	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Dokumen	214,212,920	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	2	2.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	6,699,560	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Dokumen	7,399,516	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	50,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %		0 %	35 %	2,379,870,429							2,617,857,472	
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1 Laporan	2,379,870,429	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota Sabang	1 Laporan	2,617,857,472	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS Aktif	100 %		0 %	40 %	75,000,000							82,500,000	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Beneakan Perda dan Perkada				1 Laporan	75,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN Satpol PP dan WH Kota Sabang	1 Laporan	82,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1	5	2	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	Persentase kasus pelanggaran syariat islam yang tertangani	100 %		0 %	100 %	690,609,415							759,670,356	
1	5	2	7.04	3	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam				1 Laporan	690,609,415	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Dalam Wilayah Kota sabang	1 Laporan	759,670,356	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	6	1									8,981,268,137							9,144,039,294	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,170,353,007							5,134,689,490	
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,000,000							22,000,000	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		3 Dokumen	5,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.6.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		1500 Laporan	1,300,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				8 Laporan	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		8 Laporan	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Laporan	7,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	85,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		3 Laporan	95,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						219,163,517						212,500,000		
1.6.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	57,163,517		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		18 Unit	60,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Unit	150,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Unit	2,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						25,000,000						26,000,000		
1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000						26,000,000		
1.6.2.2.03.5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan		1 Sertifikat	26,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						760,000,000						885,000,000		
1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial						170,000,000						190,000,000		
1.6.4.2.01.2	Danarhian Sarulann	Jumlah Orang yang Menerima Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	5. Penurunan Angka		0 Orang	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang			Umum Dana Alokasi Umum		Kemiskinan			Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	10 Orang	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	30 Orang	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	200 Orang	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			590,000,000						695,000,000	
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	15 Orang	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	65 Orang	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	500,000,000		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		5. Penurunan Angka Kemiskinan	200 Orang	600,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2,330,915,130						2,338,349,804	
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2,330,915,130						2,338,349,804	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	20008 Orang	182,565,326		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	20008 Orang	190,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20008 Keluarga	2,148,349,804		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh		5. Penurunan Angka Kemiskinan	20008 Keluarga	2,148,349,804	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			695,000,000						760,000,000	
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			500,000,000						550,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.6.2.01.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	200 Orang	550,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						195,000,000						210,000,000		
1.6.6.2.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	195,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	100 Orang	210,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.8.2							450,603,000							468,000,000	
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						53,020,000							55,000,000	
2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						53,020,000							55,000,000	
2.8.2.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.2.2.01.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				52 Perangkat Daerah	34,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	52 Perangkat Daerah	35,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						217,278,000							225,000,000	
2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						40,000,000							45,000,000	
2.8.3.2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Perangkat Daerah	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	4 Perangkat Daerah	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						177,278,000							180,000,000	
2.8.3.2.03.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	177,278,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8.4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						66,750,000							70,000,000	
2.8.4.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						66,750,000							70,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			17,350,000					18,000,000		
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17,350,000					18,000,000		
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Dokumen	17,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen 0 Dokumen	18,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			73,205,000					75,000,000		
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			73,205,000					75,000,000		
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	73,205,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			23,000,000					25,000,000		
2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			23,000,000					25,000,000		
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Perangkat Daerah	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen 0 Perangkat Daerah	25,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			501,000,000					518,000,000		
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			274,000,000					286,000,000		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			274,000,000					286,000,000		
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	71,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	18 Orang	26,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Dokumen	135,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									232,000,000		
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									232,000,000		
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Laporan	192,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Penurunan Angka Kemiskinan	1 Laporan	40,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									9,735,070,092	10,670,775,440	
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %				9,105,070,092	9,984,775,440	
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		0 %	100 %				27,500,000	30,000,000	
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian dan Pangan	2 Dokumen	5,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	5,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	13,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	9	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	8,377,806,426					100 %	9,215,887,068	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		83 Orang/bulan	8,370,806,426	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	83 Orang/bulan	9,207,887,068	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Laporan	4,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	3,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	65,155,000					100 %	68,412,750	
2	9	1	2.05	2	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	65,155,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	1 Paket	68,412,750	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	238,600,000					100 %	255,400,000	
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5,600,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	6,600,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	55,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	60,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	18,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Paket	19,800,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1 Dokumen	10,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	150,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	157,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	225,669,562					100 %	240,736,518	
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	4,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	5,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	90,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	94,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	25,669,562	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	28,236,518	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	106,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	113,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0 %	100 %	170,339,104					100 %	174,339,104	
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25 Unit	95,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	25 Unit	95,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	55,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	8 Unit	57,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 Unit	20,339,104	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	20 Unit	21,339,104	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	skor pola pangan harapan (PPH)	85 poin	0 poin	82,7 poin	545,200,000					82,7 poin	597,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah ketersediaan pangan utama	81 kg/kap		0 kg/kap	74 kg/kap	45,200,000					74 kg/kap	47,200,000	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	13,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat Kota Sabang	1 Laporan	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	32,200,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat Kota Sabang	1 Laporan	33,200,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	jumlah produksi bahan pangan lokal pertahun	ton/tahun		tor/tahun	200 ton/tahun	500,000,000					200 ton/tahun	550,000,000	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	500,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh	13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	550,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	16,67 %		0 %	27,78 %	61,000,000					27,78 %	64,000,000	
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah dokumen kerawanan pangan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	13,000,000					1 dokumen	14,000,000	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	13,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah gampong penanganan kerawanan pangan	3 gampong		0 gampong	5 gampong	48,000,000					5 gampong	50,000,000	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	13,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	14,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	36,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pengawasan keamanan pangan (%)	66,7 %		0 %	44,4 %	23,800,000					44,4 %	24,800,000	
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sektor bahan pangan yang diawasi	6 jenis		0 jenis	4 jenis	23,800,000					4 jenis	24,800,000	
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	23,800,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	24,800,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,546,000,000						741,600,000	
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,71		0	6,44	388,000,000					6,44	208,250,000	
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah sarana pendukung untuk pertanian	60 unit		0 unit	60 unit	261,000,000					60 unit	75,000,000	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	261,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	0	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah penangkar bibit/bibit	2 bibit		0 bibit	2 bibit	55,000,000					2 bibit	57,000,000	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	55,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	57,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan peredaran bibit dan benih ternak	1 laporan		0 laporan	1 laporan	56,750,000					1 laporan	59,750,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Unit	229,250,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	13. Kemandirian Pangan	0	25 Unit	230,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan		
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	46,200,000	Kota Sabang, Sukakarya, Paya Seunara Kota Sabang, Sukajaya, Balohan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	13. Kemandirian Pangan	0	2 Unit	47,400,000	Dinas Pertanian dan Pangan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													0
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	100 %	3,000,985,298				100 %		0		
2	10	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	19,001,425				100 %		0		
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,000,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Dokumen		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Dokumen		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Laporan		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5,000,045	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Laporan		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat laporan keuangan perangkat daerah	100 %	0 %	100 %	2,609,544,678				100 %		0		
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,607,044,628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	25 Orang/bulan		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,500,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Laporan		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum	100 %	0 %	100 %	164,539,445				100 %		0		
2	10	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,929,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Paket		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	74,887,945	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	6 Paket		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Paket		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Dokumen		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	70,962,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	44 Laporan		0	Dinas Pertanahan		
2	10	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	0 %	100 %	110,134,010				100 %		0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
2	10	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	10 Laporan		0	Dinas Pertanahan
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Laporan		0	Dinas Pertanahan
2	10	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Laporan		0	Dinas Pertanahan
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	3 Laporan		0	Dinas Pertanahan
2	10	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %		0 %	100 %	97,765,740					100 %		0	
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Unit		0	Dinas Pertanahan
2	10	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	1 Unit		0	Dinas Pertanahan
2	10	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	8 Unit		0	Dinas Pertanahan
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	40 %		0 %	20 %	103,000,000					20 %		0	
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	40 %		0 %	20 %	63,000,000					20 %		0	
2	10	12	7.01	1	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah				2 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Laporan		0	Dinas Pertanahan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	40 %		0 %	20 %	40,000,000					20 %		0	
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	Persentase Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	40 %		0 %	20 %						20 %		0	
2	10	12	7.02	1	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin				2 Laporan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Laporan		0	Dinas Pertanahan
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM yang dibina	100 %		0 %	50 %	65,000,000					50 %		0	
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten	Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan	100 %		0 %	50 %	30,000,000					50 %		0	
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten	Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan	100 %		0 %	67 %						67 %		0	
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanian Kabupaten	Persentase Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan	100 %		0 %	50 %						50 %		0	
2	10	14	7.01	2	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian				4 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	4 Dokumen		0	Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	10	14	7.02	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan	peningkatan dan pembinaan SDM pertanahan digampong	100 %		0 %	100 %	35,000,000				100 %	0			
					Persentase peningkatan dan pembinaan SDM pertanahan digampong	0 %	0 %	100 %	100 %									
2	10	14	7.02	1	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan			25 Orang	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	25 Orang	0	Dinas Pertanahan	
2	10	16			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	59 %	0 %	29 %	103,000,000					29 %	0		
2	10	16	7.01	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	100 %		0 %	100 %	103,000,000				100 %	0			
					Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	100 %	0 %	100 %	100 %									
2	10	16	7.01	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			4 Dokumen	103,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	4 Dokumen	0	Dinas Pertanahan	
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	100 %	0 %	50 %	38,000,000					50 %	0		
2	10	17	7.01		fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	100 %	0 %	50 %	38,000,000					50 %	0		
2	10	17	7.01	1	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2 Dokumen	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	Dinas Pertanahan Kota Sabang	2 Dokumen	0	Dinas Pertanahan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						16,407,582,449						17,663,340,691	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	100 %	7,957,582,450					100 %	8,753,340,695		
2	11	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	15,000,000					3 Dokumen	16,500,000		
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	2,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	2,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	2,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD			1 Dokumen	2,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	2,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	2,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Laporan	2,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	92 Orang	0 Orang	92 Orang	7,527,273,450					92 Orang	8,280,000,795		
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			92 Orang/bulan	7,523,154,944	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	92 Orang/bulan	8,275,470,439	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,118,506	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	2,330,356	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Dokumen	2,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket	10 Paket		0 Paket	8 Paket	161,809,000						8 Paket	177,989,900	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,300,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Paket	4,730,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	35,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Paket	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	4 Paket	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Dokumen	4,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	108,509,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	30 Laporan	119,359,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	100 %		0 %	100 %	142,500,000						100 %	156,750,000	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28 Laporan	1,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	28 Laporan	1,650,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	67,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Laporan	73,700,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	64,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	1 Laporan	70,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional dan gedung kantor yang dipelihara	49 Unit		0 Unit	49 Unit	111,000,000						49 Unit	122,100,000	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	70,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Unit	77,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	35,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Unit	38,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	DLHK KOTA SABANG	3 Unit	6,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase dokumen perencanaan	50 %		0 %	50 %	258,799,228						50 %	284,679,150	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase penghargaan lingkungan hidup	66,67 %	0 %	33,33 %	196,708,240										
2	11	9	2.01		Memberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan	3 Penghargaan	0 Penghargaan	1 Penghargaan	196,708,240										
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			3 Entitas	196,708,240	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	3 Entitas	216,379,064		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan	100 %	0 %	100 %	19,067,235										
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan	1 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	19,067,235										
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			1 Dokumen	19,067,235	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1 Dokumen	20,973,958		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase Timbulan sampah yang tertangani	83,50 %	0 %	82,50 %	6,963,467,367										
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Tertangani	95 %	0 %	85 %	6,963,467,367										
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan			1 Dokumen	29,999,740	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	1 Dokumen	32,999,714		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	11	2.01	3	Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			6000 Ton	6,433,467,627	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	6000 Ton	6,746,814,389		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2	11	11	2.01	4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			3 Kelompok	500,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Aceh	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	12. Pengelolaan Lingkungan Hidup	KOTA SABANG	3 Kelompok	550,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	100 %	2,763,515,924										
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	15,667,294										
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	3,643,612	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Dokumen	4,007,973		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	3,881,004	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Dokumen	4,269,104		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	3,603,394	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	3,963,733		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	4,539,284	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	4,993,212		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 %	100 %	2,448,951,360										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						22 Orang/bulan	2,446,738,784	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	22 Orang/bulan	2,691,412,662	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan	2,212,576	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	2,433,834	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		0 %			100 %	148,382,770							100 %	163,221,047	
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	3,892,950	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Paket	4,282,249	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	30,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Paket	33,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	9,999,820	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Paket	10,999,802	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan						1 Dokumen	4,490,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Dokumen	4,939,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10 Laporan	100,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	10 Laporan	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		0 %			100 %	50,000,000							100 %	55,000,000	
2	12	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	50,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Unit	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		0 %			100 %	100,514,500							100 %	110,565,950	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	514,5	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	565,99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	50,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	50,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang	1 Laporan	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	cakupan dokumen kependudukan	100 %		0 %			100 %	125,000,000							100 %	137,500,000	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk Ber KTP-el Persatuan Penduduk	100 %		0 %			100 %	125,000,000							100 %	137,500,000	
2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk						13000 Orang	125,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Sabang	13000 Orang	137,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100 %		0 %			100 %	125,000,000							100 %	137,500,000	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil	100 %		0 %			100 %	125,000,000							100 %	137,500,000	
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan						6 Layanan	125,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Masyarakat Kota Sabang	6 Layanan	137,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %		0 %			100 %	229,891,032							100 %	252,880,135	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan									0 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pelayanan kantor	5 Laporan		0 Laporan	5 Laporan	423,000,000				5 Laporan	0	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									3 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas	20 Unit		0 Unit	20 Unit	370,000,000				20 Unit	0	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									11 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	"Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar"	87 %		0 %	80 %	1,808,000,000				80 %	0	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Perhubungan Sesuai Standar	80 %		0 %	80 %	88,000,000				80 %	0	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia									70 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	80 %		0 %	80 %	25,000,000				80 %	0	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara									1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dana Untuk Operasional Angkutan Sekolah	11 Unit		0 Unit	11 Unit	1,695,000,000				11 Unit	0	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia									11 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									12 Laporan	0	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	15	3															
2	15	3	2.07														
2	15	3	2.07	2													
2	15	4															
2	15	4	2.01														
2	15	4	2.01	1													
2																	
2	16																
2	16	1															
2	16	1	2.01														
2	16	1	2.01	1													
2	16	1	2.01	2													
2	16	1	2.01	6													
2	16	1	2.01	7													
2	16	1	2.02														
2	16	1	2.02	1													
2	16	1	2.02	5													
2	16	1	2.06														
2	16	1	2.06	1													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				20000 Paket	11,999,620						20000 Paket	13,199,582	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				6 Dokumen	7,200,000						6 Dokumen	7,920,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	86,964,000						50 Laporan	95,660,400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						235,306,931							248,937,624	
2.16.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	500						120 Laporan	550	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	110,000,000						3 Laporan	111,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4,994,600						4 Laporan	5,494,060	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	119,812,331						5 Laporan	131,793,564	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135,986,607							149,585,268	
2.16.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	35,986,607						4 Unit	39,585,268	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100,000,000						2 Unit	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1,145,000,000							1,321,000,000	
2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1,145,000,000							1,321,000,000	
2.16.2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	650,000,000						1 Dokumen	650,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				2 Dokumen 2 Dokumen	171,000,000				11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		2 Dokumen 2 Dokumen	171,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Orang	104,000,000						1 Orang	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.2.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	220,000,000				11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	16	3					510,000,000							698,000,000		
2	16	3	2.02				510,000,000							698,000,000		
2	16	3	2.02	3										1 Unit	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	3	2.02	4										1 Dokumen	66,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	3	2.02	7										0 Unit	120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	3	2.02	9							11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif			1 Dokumen	212,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	20						110,000,000								111,100,000	
2	20	2					110,000,000								111,100,000	
2	20	2	2.01				110,000,000								111,100,000	
2	20	2	2.01	1										2 Dokumen	111,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	21						80,000,000								88,000,000	
2	21	2					80,000,000								88,000,000	
2	21	2	2.01				80,000,000								88,000,000	
2	21	2	2.01	3										12 Laporan	88,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2																
2	17						5,484,660,225								0	
2	17	1					4,144,869,997								0	
2	17	1	2.01				27,000,000								0	
2	17	1	2.01	1										1 Dokumen	4,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	2										1 Dokumen	3,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif														
										Nasional	Daerah																	
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											1 Dokumen	3,000,000							1 Dokumen		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											1 Dokumen	4,500,000							1 Dokumen		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD											1 Dokumen	4,500,000							1 Dokumen		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											1 Laporan	4,000,000							1 Laporan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1 Laporan	4,000,000							1 Laporan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,519,739,821									0	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											35 Orang/bulan	3,513,739,821							35 Orang/bulan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											3 Laporan	3,500,000							3 Laporan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											12 Laporan	2,500,000							12 Laporan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													2,500,000									0	
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											1 Laporan	2,500,000							1 Laporan		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													208,500,000									0	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											1 Paket	10,000,000							1 Paket		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											2 Paket	12,500,000							2 Paket		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													0
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													0
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													0
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													0
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian												Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													0	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota													0	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota												40 Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													0	
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													0	
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro												30 Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM													0	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil													0	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi												50 Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													0	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN													0	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan													0	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan												5 Unit	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100 %	0 %	100 %	4,398,434,632				100 %	4,502,500,000			
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			43 Orang/bulan	4,396,434,632	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	43 Orang/bulan	4,500,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	2,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	1 Laporan	2,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	100 %	0 %	100 %	182,040,000					100 %	266,400,000		
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	4,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	5 Paket	9,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	16,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	2 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	10,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	3 Paket	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Paket	2,040,000	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	DPMPTSP dan NAKER	2 Paket	2,400,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		DPMPTSP dan NAKER	20 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346,300,000						400,500,000		
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	500	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	166,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	180,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	18	1	2.09				72,102,547						107,500,000		
2	18	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Unit	85,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	16,102,547		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Unit	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	2,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		23,004,932						35,000,000	
2	18	2	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		23,004,932						35,000,000	
2	18	2	2.01	2		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha	23,004,932		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		1 Kegiatan Usaha	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	3				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		66,796,342						100,000,000	
2	18	3	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		66,796,342						100,000,000	
2	18	3	2.01	2		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	66,796,342		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	4				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		237,002,633						310,000,000	
2	18	4	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		237,002,633						310,000,000	
2	18	4	2.01	1		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	68,930,654		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif		1000 Pelaku Usaha	85,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	4	2.01	2		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha	22,071,079		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Kegiatan Usaha	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	4	2.01	3		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1372 Orang	146,000,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1372 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	18	5					28,198,726							40,000,000					
2	18	5	2.01				28,198,726							40,000,000					
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	7 Pelaku Usaha	28,198,726		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Pelaku Usaha	40,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja			
2	18	6					26,998,270							30,000,000					
2	18	6	2.01				26,998,270							30,000,000					
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	26,998,270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						5,801,342,602				6,332,051,576				
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %		0 %	100 %	3,101,342,368				100 %	3,362,051,320			
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai saku perangkat daerah	100 %		0 %	80 %	14,998,930				80 %	16,498,823			
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2,999,810	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	3 Dokumen	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2,999,810	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	2 Dokumen	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2,999,690	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	2 Dokumen	3,299,659	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,999,810	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	1 Laporan	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,999,810	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	1 Laporan	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	2,545,716,340					100 %	2,750,862,690		
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang	2,539,716,920	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dispora	27 Orang	2,744,263,328	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2,999,810	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	2 Laporan	3,299,791	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2,999,610	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Dispora	2 Dokumen	3,299,571	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	1.937.967,165	Sukajaya, le Meulee			7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Kota Sabang	100 Orang	1.937.967,165	Olahraga	
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	10 Orang	197,638,861	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Wirausaha Muda Kota Sabang	10 Orang	217,402,747	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	100 %	0 %	100 %	209,999,928			100 %	230,999,920		
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	4 Dokumen	209,999,928	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Penerima Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4 Dokumen	230,999,920	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Peringkat daerah)	2 %	0 %	4 %	1,937,967,165			4 %	2,131,763,881		
2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan atlet muda	11.16 %	0 %	11.16 %	732,570,070			11.16 %	805,827,077		
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	732,570,070	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Masyarakat Kota Sabang	6 Unit	805,827,077	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase cabang olah raga yang berprestasi	66.67 %	0 %	50 %	281,334,090			50 %	309,467,499		
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	138 Orang	281,334,090	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Altet Binaan Kota Sabang	138 Orang	309,467,499	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan organisasi Olahraga	29.27 %	0 %	29.27 %	800,000,000			29.27 %	880,000,000		
2	19	3	2.04	1	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	39 Dokumen	800,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Cabor KONI Kota Sabang	39 Dokumen	880,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan pengembangan olahraga rekreasi	57.89 %	0 %	26.23 %	124,063,005			26.23 %	136,469,305		
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	124,063,005	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Masyarakat Kota Sabang	1 Dokumen	136,469,305	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	cakupan Gugus Depan yang aktif	100 %	0 %	41,67 %	200,000,000			41,67 %	220,000,000		
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	persentase gugus depan yang mendapat pembinaan	100 %	0 %	41,67 %	200,000,000			41,67 %	220,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 19 4 2.01 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				36 Sekolah	200,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Seluruh Sekolah Kota Sabang	36 Sekolah	220,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
2 22 7	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)						573,440,624						580,478,896		
2 22 7 7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat						128,000,432						130,540,000		
2 22 7 7.01 3	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat				100 Orang	115,000,432	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		100 Orang	116,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2 22 7 7.01 6	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan				11 Dokumen	13,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		11 Dokumen	14,040,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2 22 7 7.02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat						45,001,296						49,500,000		
2 22 7 7.02 1	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat				25 Orang	15,000,432	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		25 Orang	16,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2 22 7 7.02 2	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)				4 Dokumen	15,000,432	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		4 Dokumen	16,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2 22 7 7.02 4	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat				25 Orang	15,000,432	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		25 Orang	16,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2 22 7 7.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat						400,438,896						400,438,896		
2 22 7 7.03 1	Pembinaan Kapasitas MAA	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan				18 Orang	385,438,464	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		18 Orang	385,438,464	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
2 22 7 7.03 3	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA				1 Dokumen	15,000,432	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 Dokumen	15,000,432	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9 1	KEKHUSUSAN ACEH						1,077,619,188						1,077,619,188		
9 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,077,619,188						1,077,619,188		
9 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,499,203						12,499,203		
9 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,000,328	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		2 Dokumen	5,000,328	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,499,625	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 Dokumen	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9 1 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,499,625	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 Laporan	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,499,625	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 Laporan	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						775,915,189						775,915,189		
9 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6 Orang/bulan	773,415,564	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		6 Orang/bulan	773,415,564	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,499,625	Kota Sabang, Sukakarya, Kuta Ateuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan		1 Laporan	2,499,625	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
9 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106,002,740						106,002,740		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	23	1	2.09															
2	23	1	2.09	2														
2	23	1	2.09	9														
2	23	1	2.09	11														
2	23	2																
2	23	2	2.01															
2	23	2	2.01	2														
2	23	2	2.01	9														
2	23	2	2.02															
2	23	2	2.02	2														
2	24																	
2	24	2																
2	24	2	2.01															
2	24	2	2.01	1														
2	24	2	2.01	2														
2	24	2	2.02															
2	24	2	2.02	2														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	24	2	2.03															
2	24	2	2.03	1														
2	24	2	2.03	2														
2	24	3																
2	24	3	2.03															
2	24	3	2.03	3														
3																		
3	25																	
3	25	1																
3	25	1	2.01															
3	25	1	2.01	1														
3	25	1	2.01	2														
3	25	1	2.01	6														
3	25	1	2.01	7														
3	25	1	2.02															
3	25	1	2.02	1														
3	25	1	2.02	6														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	1,999,195	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	2,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %		0 %	100 %	40,000,000						100 %	52,000,000	
3 25 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	20,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang	26,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang	26,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		0 %	100 %	190,196,623						100 %	281,500,000	
3 25 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,998,175	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		0	1 Paket	6,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	56,559,448	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13,200,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	17,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7 Dokumen	5,999,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Dokumen	7,800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	109,440,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Laporan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penunjang sarana aparatur	100 %		0 %	100 %	202,401,635						100 %	263,000,000	
3 25 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	160,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	208,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,998,680	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	38,402,955	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		0 %	100 %	152,941,129						100 %	199,000,000	
3 25 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	84,999,779	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	110,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49,999,500	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,941,850	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	23,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	18 %		0 %	15 %	4,687,571,174						15 %	1,616,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
3	25	3	2.01																
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	25,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	32,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				15 Unit	4,328,660,087	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	1,150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	82 %			0 %	55 %						55 %	117,000,000	
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				12 Kelompok	90,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13. Kemandirian Pangan	0	12 Kelompok	117,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						213,911,087							278,100,000	
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	213,911,087	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	1 Layanan	278,100,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	3	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30,000,000							39,000,000	
3	25	3	2.04	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	39,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya (%)	0,80 %			0 %	0,31 %						0,31 %	117,000,000	
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						208,447,529							117,000,000	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	9,230,362	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat/kelempok pembudidaya	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	169,217,167	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat/kelempok pembudidaya	3 Unit	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	4	2.04	5	Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				15 Orang	30,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	Masyarakat/kelempok pembudidaya	15 Orang	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33 %			0 %	33,33 %						33,33 %	195,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3	25	5	2.01				149,999,654						195,000,000			
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	149,999,654	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 Dokumen	195,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (kg/kap)	109,50 kg/kap	0 kg/kap	109,50 kg/kap	341,354,616			109,50 kg/kap	313,900,000		
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok Pengolahan Ikan	20 Kelompok	0 Kelompok	11 Kelompok	14,999,980			11 Kelompok	19,500,000		
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	14,999,980	Kota Sabang, Sukajaya, Ie Meulee	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13. Kemandirian Pangan	0	1 Dokumen	19,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Rumah Tangga Pelaku (RTP) produk pengolahan perikanan	48 rumah tangg	0 rumah tangg	38 rumah tangg	326,354,636			38 rumah tangg	294,400,000		
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.25 Ton	191,102,820	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	1.25 Ton	118,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	135,251,816	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13. Kemandirian Pangan	0	2 Pelaku Usaha	175,900,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					9,592,181,361				5,185,614,404		
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	100 %	4,224,777,480			100 %	4,704,614,404		
3	26	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian yang berorientasi pada PAD Sektor Pariwisata	100	0	100	18,588,285			100	20,447,115		
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,562,779		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	0	2 Dokumen	5,019,058	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,753,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	0	1 Dokumen	5,228,819	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,378,755		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	0	1 Laporan	4,816,631	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	4,893,279		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	0	0 Laporan	5,382,607	Dinas Pariwisata	
3	26	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 %	0 %	100 %	3,546,459,047			100 %	3,960,364,126		
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3,544,259,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	35 Orang/bulan	3,957,944,162	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	2,890,356,720		Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	6 Lokasi	0	Dinas Pariwisata	
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	884,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar	5 Laporan	33,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			920,050,000					0		
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			920,050,000					0		
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	585,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata	
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	144,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemasaran Pariwisata	1 Laporan	0	Dinas Pariwisata	
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata	
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Dokumen	0	Dinas Pariwisata	
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			307,353,881					248,000,000		
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			307,353,881					248,000,000		
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	25 Orang	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	120,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	0 Orang	19,583,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang	22,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	0 Orang	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 Orang	7,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	97,353,881		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 Orang	13,000,000	Dinas Pariwisata	
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	82,416,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 Orang	86,000,000	Dinas Pariwisata	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			35,000,000					38,500,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
3	29	5															
3	29	5	2.01														
3	29	5	2.01	3													
4																	
4	1																
4	1	1															
4	1	1	2.01														
4	1	1	2.01	1													
4	1	1	2.01	2													
4	1	1	2.01	4													
4	1	1	2.01	5													
4	1	1	2.01	6													
4	1	1	2.01	7													
4	1	1	2.02														
4	1	1	2.02	1													
4	1	1	2.02	5													
4	1	1	2.05														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Birokrasi	Birokrasi														
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	20,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	34 Dokumen	85,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan			8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	34 Dokumen	93,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100 %	0 %	100 %	1,655,000,000				100 %	1,820,500,000	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	55,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Laporan	60,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	200,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	12 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	1,400,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	12 Laporan	1,540,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	0 %	100 %	2,419,600,000				100 %	2,661,560,000	
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	0 %	100 %	475,000,000				100 %	522,500,000	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	200,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	5 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	3 Dokumen	137,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	150,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	4 Dokumen	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100 %	0 %	100 %	1,564,600,000				100 %	1,721,060,000	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	740,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	814,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	324,600,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	357,060,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
										Nasional					Daerah				
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Limmas													
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum	100 %		0 %	100 %	325,000,000						100 %	357,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				740 Dokumen	100,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	740 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				6 Kasus	175,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	6 Kasus	192,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				50 Dokumen	50,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	50 Dokumen	55,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah	100 %		0 %	100 %	55,000,000						100 %	60,500,000	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	35,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	38,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	20,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	22,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	cakupan rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100 %		0 %	100 %	1,619,012,560						100 %	1,781,913,816	
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Laju Inflasi	100 %		0 %	100 %	555,000,000						100 %	610,500,000	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	200,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	2 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	200,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	155,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	170,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan tertib administrasi pembangunan Kota Sabang	100 %		0 %	100 %	359,018,150						100 %	395,919,965	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	95,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Dokumen	104,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	65,000,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	4 Laporan	72,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	199,018,150	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	0	1 Laporan	218,919,965	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa berdasarkan value for money	100 %		0 %	100 %	549,994,410						100 %	604,993,851	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Operasional atau Lapangan	yang Disediakan						Sukajaya, Cot Ba U	Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah				
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	50,430,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		15 Unit	55,473,000	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,159,411,787	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1000 Laporan	19,250,000	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	462,087,424	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			36 Laporan	508,296,166	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	10,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		5 Laporan	11,000,000	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4500 Laporan	564,423,292	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		4500 Laporan	620,865,621	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									725,910,898	
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	462,081,800	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		24 Unit	508,289,980	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	52,425,376	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Unit	57,667,914	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	22,877,605		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		15 Unit	159,953,004	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									9,592,200,972	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	8,501,852,076	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Orang/Bulan	9,352,037,284	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	28,246,625	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		21 Paket	31,071,288	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	190,084,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20 Orang	209,092,400	Sekretariat DPRK
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD									222,832,271	
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	74,441,792	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Dokumen	81,885,971	Sekretariat DPRK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	23 Laporan	90,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	23 Laporan	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah OPD terasistensi	7 OPD	0 OPD						7 OPD	300,000,000	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	113,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Perekonomian dan SDA	1 Dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah OPD terasistensi	4 OPD	0 OPD						4 OPD	1,050,000,000	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	113,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik yang Inklusif	Perangkat Daerah Yang Membidangi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	700,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Yang Membidangi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										260,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbitangan (%)	96 %	0 %						90 %	260,000,000	
5	5	2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	70 %	0 %						40 %	200,000,000	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	157,868,084	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terlaksananya inovasi perangkat daerah	50 %	0 %						29.41 %	60,000,000	
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	29,065,577	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	2				KEUANGAN										72,595,398,655	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,791,175,570	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										18,191,815	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,999,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD		3 Dokumen	4,999,370	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,004,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14. Optimalisasi PAD		1 Dokumen	5,004,880	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5	2	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Laporan	32,465,878	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	1 Perwal	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kota Sabang	34 SKPK	53,186,715	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100 %		0 %	100 %	55,976,708,350				100 %	61,574,379,185	
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kota Sabang	0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan	61,574,379,185	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						280,000,000					295,500,000	
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						280,000,000					295,500,000	
5	2	3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14. Optimalisasi PAD		1 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14. Optimalisasi PAD		1 Laporan	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14. Optimalisasi PAD		1 Laporan	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14. Optimalisasi PAD		3 Dokumen	170,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						280,000,000					299,000,000	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						280,000,000					299,000,000	
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14. Optimalisasi PAD		1 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14. Optimalisasi PAD		1 Laporan	209,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14. Optimalisasi PAD		1 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah							14. Optimalisasi PAD		2 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	3				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	3				KEPEGAWAIAN						14,306,684,620					27,714,280,775	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5	3	1					12,957,994,149						23,117,996,123		
5	3	1	2.01				24,728,323						33,000,000		
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,728,323		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6,000,000					3 Laporan	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Laporan	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,468,556,123						22,471,556,123	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	12,462,556,123			Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		280 Orang/bulan	22,462,556,123	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Laporan	9,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			204,274,853						290,000,000	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,997,738		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Paket	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,277,115		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Paket	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	70 Laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			182,495,000						218,440,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,495,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Laporan	3,440,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	5 Laporan	170,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77,939,850						105,000,000		
5 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	4 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	2 Unit	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20,939,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	2 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,348,690,471						4,596,284,652		
5 3 2 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						223,285,157						995,055,686		
5 3 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	2 Dokumen	382,559,857	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.01 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	292,447		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Dokumen	279,999,442	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.01 5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	63,779,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Dokumen	104,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Lembaga	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2 2.01 9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	87,433,801		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Dokumen	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5	3	2	2.03	9	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN											Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 4							581,205						250,000,000		
5 4 2							581,205						250,000,000		
5 4 2 2.02							581,205						250,000,000		
5 4 2 2.02 6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	581,205		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6															
6 1							5,978,334,857							0	
6 1 1														0	
6 1 1 2.01														0	
6 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	3 Dokumen	0	Inspektorat
6 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,500,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inspektorat	1 Dokumen	0	Inspektorat
6 1 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Laporan	0	Inspektorat
6 1 1 2.02							4,303,500,000							0	
6 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	35 Orang/bulan	0	Inspektorat
6 1 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Laporan	0	Inspektorat
6 1 1 2.06							222,000,000							0	
6 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	12 Paket	0	Inspektorat
6 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	45 Paket	0	Inspektorat
6 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				270 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	270 Paket	0	Inspektorat
6 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2555 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	2555 Paket	0	Inspektorat
6 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				23 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	23 Dokumen	0	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	27 Laporan	0	Inspektorat
6.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	129,000,000						100 %	0	
6.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				80 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	80 Laporan	0	Inspektorat
6.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	36 Laporan	0	Inspektorat
6.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				800 Laporan	28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	800 Laporan	0	Inspektorat
6.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		0 %	100 %	348,000,000						100 %	0	
6.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	10 Unit	0	Inspektorat
6.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	250,000,000				8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	3 Unit	0	Inspektorat
6.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	25 Unit	0	Inspektorat
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan	100 %		0 %	100 %	639,091,780						100 %	0	
6.1.2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota	100 %		0 %	100 %	580,000,000						100 %	0	
6.1.2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				10 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	10 Laporan	0	Inspektorat
6.1.2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				80 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	80 Laporan	0	Inspektorat
6.1.2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				7 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	7 Laporan	0	Inspektorat
6.1.2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	4 Laporan	0	Inspektorat
6.1.2.2.01.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				18 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	18 Laporan	0	Inspektorat
6.1.2.2.01.6	KERJA Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				11 Kesepakatan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	11 Kesepakatan	0	Inspektorat
6.1.2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	4 Dokumen	0	Inspektorat
6.1.2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %		0 %	100 %	59,091,780						100 %	0	
6.1.2.2.02.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	59,091,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Inspektorat	5 Laporan	0	Inspektorat
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %		0 %	100 %	324,243,077						100 %	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
6	1	3	2.01															
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun												
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun												
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	100 %											
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah												
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persen											
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakup Perangkat Daerah	Point											
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%											
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%											
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan													
						1 Dokumen	10,750,287	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						4 Laporan	98,625,136	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	4 Laporan	105,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	3	7.04		Pemberdayaan Mukim	Persentase Pemberdayaan Mukim	%	%	100 %	156,002,928			100 %	170,000,000					
7	1	3	7.04	1	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim													
						2 Dokumen	156,002,928	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	2 Dokumen	170,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	%	100 %	13,849,988			100 %	15,000,000					
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	%	100 %	13,849,988			100 %	15,000,000					
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						1 Laporan	13,849,988	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan di gampong	%	%	100 %	189,460,465			100 %	206,000,000					
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan Kecamatan	%	%	100 %	189,460,465			100 %	206,000,000					
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
						100 Orang	66,036,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	100 Orang	70,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
						500 Orang	68,424,775	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	500 Orang	76,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
						1 Dokumen	54,999,690	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Gampong	%	%	100 %	58,925,515			100 %	22,000,000					
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	%	100 %	58,925,515			100 %	22,000,000					
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						1 Dokumen	39,805,000	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Dokumen	0	Kecamatan Sukakarya				
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya													
						1 Laporan	19,120,515	Kota Sabang, Sukakarya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kecamatan Sukakarya Kota Sabang	1 Laporan	22,000,000	Kecamatan Sukakarya				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN					4,686,216,310				1,535,996,887					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,538,500	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	19,648,000	Kecamatan Sukajaya
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	41,866,215	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	41,866,215	Kecamatan Sukajaya
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	0 %	100 %	95,555,138			100 %	121,328,356	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45,524,894	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Unit	50,628,222	Kecamatan Sukajaya
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	34,934,800	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	10 Unit	45,747,740	Kecamatan Sukajaya
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,008,394	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Unit	18,952,394	Kecamatan Sukajaya
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,087,050	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Sukajaya	1 Unit	6,000,000	Kecamatan Sukajaya
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %	0 %	100 %	76,293,940			100 %	86,293,940	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Masyarakat	100 %	0 %	100 %	76,293,940			100 %	86,293,940	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	76,293,940	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah 8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	1 Laporan	86,293,940	Kecamatan Sukajaya
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %	0 %	100 %	469,167,419			100 %	507,264,396	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100 %	0 %	100 %	212,661,997			100 %	252,661,997	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Masyarakat	79,616,941	Kota Sabang, Sukajaya, Semua Kelurahan		7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan 7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	Gampong dalam Wilayah Kecamatan Sukajaya	7 Lembaga Masyarakat	99,616,941	Kecamatan Sukajaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7	1	6															
7	1	6	2.01														
7	1	6	2.01	6													
7	1	6	2.01	17													
7																	
7	1																
7	1	1															
7	1	1	2.01														
7	1	1	2.01	1													
7	1	1	2.01	2													
7	1	1	2.01	6													
7	1	1	2.01	7													
7	1	1	2.02														
7	1	1	2.02	1													
7	1	1	2.02	5													
7	1	1	2.06														
7	1	1	2.06	1													
7	1	1	2.06	2													
7	1	1	2.06	5													
7	1	1	2.06	9													
7	1	1	2.08														
7	1	1	2.08	1													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	57,198,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	61,202,448	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	1,986,622		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Laporan	2,125,685	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	20,047,125		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	21,450,423	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49,960,575						53,457,814		
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	29,961,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	32,058,858	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	19,999,025		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	21,398,956	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						25,000,000						27,000,000		
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						25,000,000						27,000,000		
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		1 Laporan	27,000,000	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						335,999,114						359,519,506		
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						185,999,114						199,019,506		
7 1 3 2.01 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						69,999,794		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				74,899,779	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 3 2.01 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	15,999,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	17,119,727	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah		4 Laporan	107,000,000	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 3 7.04	Pemberdayaan Mukim						150,000,000						160,500,000		
7 1 3 7.04 1	Penyelenggaraan Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				2 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	160,500,000	Kecamatan Sukamakmue	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14,979,900						16,028,493		
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						14,979,900						16,028,493		
7 1 4 2.01 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	14,979,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	16,028,493	Kecamatan Sukamakmue	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	5					209,998,985						223,600,000			
7	1	5	2.01				209,998,985						223,600,000			
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50 Orang	107,000,000	Kecamatan Sukamakmue	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500 Orang	85,600,000	Kecamatan Sukamakmue	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	29,998,985		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	31,000,000	Kecamatan Sukamakmue	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			64,022,001					67,404,627			
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			64,022,001					67,404,627			
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	34,023,016		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Dokumen	36,404,627	Kecamatan Sukamakmue	
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	29,998,985		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 Laporan	31,000,000	Kecamatan Sukamakmue	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14,203,982,337					15,076,674,224			
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	0 %	100 %	4,481,484,802			100 %	4,705,559,042		
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21,500,000					22,575,000			
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	2 Dokumen	4,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	2 Dokumen	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	2 Dokumen	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, Cot Ba U	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sabang	1 Laporan	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8	1	3	2.01				7,656,303,215							8,039,118,376	
8	1	3	2.01	1			1 Dokumen	1,409,976		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	1 Dokumen	1,480,475	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	2			1 Dokumen	1,791,724		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	1 Dokumen	1,881,310	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	3			150 Orang	7,464,132,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	150 Orang	7,837,339,314	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	4			125 Orang	170,834,371		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	125 Orang	179,376,090	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5			1 Laporan	18,134,464		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	1 Laporan	19,041,187	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4						243,277,146						255,441,004	
8	1	4	2.01					243,277,146						255,441,004	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	1 Dokumen	1,261,970	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	1 Dokumen	3,322,342	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	90 Orang	177,189,537	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	55 Orang	64,468,382	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024	1 Laporan	9,198,773	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									210,022,255	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									210,022,255	
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	1 Dokumen	1,394,488	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	4 Dokumen	1,585,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	130 Orang	64,620,816	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembinaan Pemuda, Perempuan, dan Kelompok Rentan	126 Orang	137,176,280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
9	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	1,156,981,853				100 %	1,256,981,853	
9	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	11 Orang/bulan	1,254,481,853	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	1 Laporan	2,500,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		0 %	100 %	25,000,000				100 %	25,000,000	
9	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Orang	25,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	171,050,600				100 %	175,702,600	
9	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	5 Paket	2,102,600	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Paket	30,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	7 Paket	20,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	2 Dokumen	3,600,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	30 Laporan	120,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	55,278,895				100 %	55,278,895	
9	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Laporan	36,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	3 Laporan	6,592,200	Sekretariat Baitul Mal

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9 1 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12,686,695		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	1 Laporan	12,686,695	Sekretariat Baitul Mal
9 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kewajaran Laporan Administrasi Umum	100 %		0 %	100 %	29,853,010						100 %	39,853,010	
9 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	29,853,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	ASN	9 Unit	39,853,010	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4	PROGRAM BAITUL MAL	Persentase pertumbuhan zis	9,44 %		0 %	2,36 %	6,906,869,495						2,36 %	6,954,918,622	
9 1 4 7.01	Pengelolaan ZISWAF	Persentase Potensi ZIS yang Terkelola	100 %		0 %	100 %	49,999,424						100 %	60,000,000	
9 1 4 7.01 1	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun				1 Dokumen	49,999,424		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Muzakki	1 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.02	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Komisioner Baitul Mal	100 %		0 %	100 %	771,951,449						100 %	810,000,000	
9 1 4 7.02 1	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf				100 Orang	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Komisioner Baitul Mal	100 Orang	60,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.02 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM				12 Dokumen	661,951,449		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Komisioner Baitul Mal	12 Dokumen	700,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.02 4	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Penurunan Angka Kemiskinan	Komisioner Baitul Mal	1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Persentase Penyaluran Ziswaf	100 %		0 %	100 %	6,084,918,622						100 %	6,084,918,622	
9 1 4 7.03 1	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				2719 Orang	950,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	2719 Orang	950,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03 2	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin				13927 Orang	1,250,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	13927 Orang	1,250,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03 3	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil				25 Orang	250,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	25 Orang	250,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03 4	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf				25 Orang	75,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	25 Orang	75,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03 5	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin				5 Orang	50,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	5 Orang	50,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03 6	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah				200 Orang	250,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	200 Orang	250,000,000	Sekretariat Baitul Mal
9 1 4 7.03 7	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir				600 Orang	600,000,000		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	600 Orang	600,000,000	Sekretariat Baitul Mal

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9.1.4.7.03.8	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq				1250 Orang	2,659,918,622		Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Penurunan Angka Kemiskinan	Mustahik	1250 Orang	2,659,918,622	Sekretariat Baitul Mal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.1.7	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH														
1.1.7.7.01	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Persentase jumlah dayah yang dibina	88.89 %		0 %	77.78 %	8,536,900,142						77.78 %	7,300,000,000	
1.1.7.7.01.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun				1 Unit	1,850,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1.1.7.7.01.2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	250,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	2 Unit	0	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1.1.7.7.01.4	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan				1599 Peserta Didik	5,334,900,142	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1599 Peserta Didik	5,000,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
1.1.7.7.01.13	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				3 Satuan Pendidikan	1,102,000,000	Kota Sabang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Pengembangan Kualitas Pendidikan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	3 Satuan Pendidikan	1,300,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9	UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN														
9.1	KEKHUSUSAN ACEH														
9.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
9.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	16,000,000						5 Dokumen	16,000,000	
9.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9.1.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9.1.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	2,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3,500,000	Kota Sabang, Sukajaya, le Meulee	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Penataan Organisasi Tata Kerja dan Fungsi Perangkat Daerah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang	1 Laporan	3,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
9.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3,982,000,000						1 Laporan	3,982,000,000	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Kota Sabang Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023
1	Pertumbuhan PDRB	%	2,8
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,73
3	Persentase Penduduk Miskin	%	14,96
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,50
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	31,09
6	Indeks Gini	Poin	0,270

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	INDIKATOR	TARGET 2023	
		Volume	Satuan
1	Persentase penurunan pelanggaran syariat	7,50	%
2	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	22	kasus/10.000 pddk
3	Angka pelanggaran Perda (Kasus)	77	kasus
4	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,24	Tahun
5	Angka harapan hidup (Tahun)	70,66	tahun
6	Prevalansi stunting balita (%)	11,6	%
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	2,30	poin
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,70	poin
9	Pola pangan harapan (poin)	86,0	poin
10	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,270	Poin
11	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	2,8	%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50	%
13	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	0,915	Poin

No.	INDIKATOR	TARGET 2023	
		Volume	Satuan
14	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,69	poin
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	74,0	poin
16	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	2,77	Poin
17	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	66,23	poin

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
-1-	-2-	-3-
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
I.A.	<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
I.A.1.1.	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi	2,80
I.A.1.2.	Laju Inflasi	2,50
I.A.1.3.	PDRB Perkapita (juta)	38,50
I.A.1.4.	Indeks Gini	0,270
I.A.1.5.	Tingkat Kemiskinan	14,96
I.A.1.6.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	22,00
I.B.	<i>Fokus Kesejahteraan Sosial</i>	
I.B.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,73
I.B.2.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta rupiah/tahun)	11,30
I.B.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,53
I.B.4.	Rasio penduduk yang bekerja	0,97
I.B.5.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,85
I.B.6.	Jumlah angkatan kerja (orang)	27.756,00
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM	
II.A	<i>Pelayanan Urusan Wajib</i>	
A.1.	Pendidikan	
A.1.1.	APS (SPM)	99,75
A.1.1.1	APS SD (SPM)	99,99

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
A.1.1.2	APS SMP (SPM)	99,50
A.1.1.3	APS PAUD (SPM)	85,18
A.1.2.	APK (%)	94,77
A.1.2.1	APK SD (SDGs)	110,63
A.1.2.2	APK SMP (SDGs)	104,73
A.1.2.3	APK PAUD (SDGs)	68,96
A.1.2.4	APK Non Formal (SPM)	12,57
A.1.3.	APM (%)	95,98
A.1.3.1	APM SD (SDGs)	100,00
A.1.3.2	APM SMP (SDGs)	91,96
A.1.3.3	APM PAUD	63,94
A.1.4.	SD/MI terakreditasi minimal B (SDGs)	60,56
A.1.5.	SMP/MTs terakreditasi minimal B (SDGs)	92,56
A.1.6.	Persentase Guru SD/MI Bersertifikasi (SDGs)	61,60
A.1.7.	Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikasi (SDGs)	70,56
A.1.8.	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33
A.1.9.	Cakupan PTK pada satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	82,18
A.1.10.	Persentase Dayah yang Terakreditasi	55,56
A.1.11.	Persentase penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	60,00
A.2.	Kesehatan	
A.2.1.	IPKM	0,6698
A.2.1.1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	97,00
A.2.1.2	Persentase ibu hamil yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan (SPM)	100,00
A.2.1.3	Persentase bayi baru lahir (umur 0 - 28 hari) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) (SDGs)	100,00
A.2.1.4	Persentase Balita (umur 0 – 59 bulan) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100,00
A.2.1.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100,00
A.2.1.6	Persentase penduduk usia produktif (orang berusia 15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	43,56
A.2.1.7	Persentase penduduk usia lanjut (orang berusia lebih dari 60 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	50,62

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
A.2.1.8	Persentase penduduk penderita hipertensi (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	20,56
A.2.1.9	Persentase penduduk penderita Diabetes Mellitus (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	13,71
A.2.1.10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa (Orang dengan gangguan Jiwa (ODG)) berat yang terlayani kesehatan (SPM)	100,00
A.2.1.11	Persentase penduduk terduga Tuberculosis (TBC) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) (SDGs)	12,56
A.2.1.12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) (SDGs)	100,00
A.2.1.13	Prevalensi stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (SDGs)	11,6
A.2.1.14	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang medapatkan ASI eksklusif (SDGs)	42,56
A.2.1.15	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SDSs)	0,00
A.2.1.16	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	1,46
A.2.1.17	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (SDGs)	7,31
A.2.1.18	Jumlah Kasus Hepatitis B (SDGs)	0,00
A.2.2.	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100,00
A.2.3.	cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan	100,00
A.2.4.	Persentase gampong sehat	50,00
A.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
A.3.1.	Pekerjaan Umum	
A.3.1.1.	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air	36,67%
A.3.1.2.	Persentase penduduk berakses air minum	92,25%
A.3.1.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	92,56
A.3.1.4.	Persentase drainase dalam kondisi baik	9,62

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
A.3.1.5.	persentase pengembangan wilayah strategis	5,96
A.3.1.6.	Rasio bangunan ber IMB	0,3
A.3.1.7.	Persentase permukiman yang tertata	93
A.3.1.8.	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,08
A.3.1.9.	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	30
A.3.2.	Penataan Ruang	
A.3.2.1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7
A.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
A.4.1.	Rasio rumah layak huni	0,139
A.4.2.	Rasio pemukiman layak huni	0,75
A.4.3.	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	24,74
A.4.4.	Persentase Utilitas	72,22
A.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
A.5.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100,00
A.5.2.	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	75,00
A.5.3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	60,00
A.6.	Sosial	
A.6.1.	Cakupan PSKS Aktif	100,00
A.6.2.	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	65,00
A.6.2.1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100,00
A.6.2.2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100,00
A.6.2.3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100,00
A.6.2.4	Persentase penduduk gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
A.6.2.5	Persentase penduduk korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00
A.6.3.	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100,00
A.6.3.1	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%) (SDGs)	
A.6.4.	Cakupan penanggulangan Bencana (sosial)	100,00
B.	Urusan Wajib Non Dasar	
B.1.	Tenaga Kerja	
B.1.1.	Persentase tenaga kerja terampil	6,90
B.1.2.	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38,58
B.1.3.	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undangan Ketenagakerjaan	45,00
B.1.4.	Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	45,00
B.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	
B.2.1.	Rasio Pengarustamaan Gender di Daerah	60,00
B.2.2.	Persentase KDRT yang tertangani (SDG's)	90,00
B.2.3.	persentase keluarga yang memenuhi pilar pembangunan keluarga	80,00
B.2.4.	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	60,00
B.2.5.	Penilaian Kota Layak Anak	Pratama
B.2.6.	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100,00
B.3.	Pangan	
B.3.1	skor pola pangan harapan (PPH)	82,70
B.3.2	persentase pengawasan keamanan pangan	44,44
B.3.3	Persentase penanganan kerawanan pangan	27,78
B.4.	Pertanahan	
B.4.1.	Persentase Penyelesaian sengketa Tanah garapan	50,00
B.4.2.	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	50,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
B.4.3.	Cakupan redistribusi tanah, serta ganti rugi kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	20,00
B.4.4.	Persentase luas lahan bersertifikat	60,00
B.4.5.	Cangkupan pengurusan hak-hak atas tanah	20,00
B.4.6.	Persentase SDM yang dibina	50,00
B.4.7.	Persentase pengaturan pertanahan di wilayah pesisir	40,00
B.4.8.	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	29,00
B.4.9.	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	50,00
B.5.	Lingkungan Hidup	
B.5.1.	persentase dokumen perencanaan	50,00
B.5.2.	persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	62,50
B.5.3.	Persentase pengelolaan RTH	35,29
B.5.4.	persentase limbah tertangani	58,14
B.5.5.	persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	10,00
B.5.6.	persentase penghargaan lingkungan hidup	33,33
B.5.7.	persentase penanganan pengaduan	100,00
B.5.8.	persentase Timbulan sampah yang tertangani	82,50
B.5.9.	Persentase penyelenggaraan penyuluhan lingkungan	46,51
B.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
B.6.1.	cakupan dokumen kependudukan	100,00
B.6.2.	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100,00
B.6.3.	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100,00
B.6.4.	Tingkat validitas data kependudukan	100,00
B.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
B.7.1.	Cakupan Penataan Desa	100,00
B.7.2.	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	11,11
B.7.3.	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	94,44
B.7.4.	Cakupan perencanaan dan penganggaran gampong	100,00
B.7.5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
B.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
B.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,70
B.8.2.	Rasio Akseptor KB	56,23
B.8.3.	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	90,00
B.9.	Perhubungan	
B.9.1.	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	80,00
B.9.2.	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	80,00
B.9.3.	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	70
B.10.	Komunikasi dan Informatika	
B.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	70,00
B.10.2.	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	62,50
B.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
B.11.1.	Persentase koperasi yang sudah RAT	51,06
B.11.2.	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	86,27
B.11.3.	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	9,30
B.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	22,00
B.11.5.	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	20,41
B.12.	Penanaman Modal	
B.12.1.	Persentase Investor yang menanam Modal	45,00
B.12.2.	Presentase Promosi Penanaman Modal	55,00
B.12.3.	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100,00
B.12.4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	28,00
B.12.5.	Presentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100,00
B.13.	Kepemudaan dan Olah Raga	
B.13.1.	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	43,75
B.13.2.	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Peringkat daerah)	20,00
B.13.3.	cakupan Gugus Depan yang aktif	41,60

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
B.14.	Statistik	
B.14.1.	persentase komponen data statistik sektoral	30,00
B.15.	Persandian	
B.15.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18,18
B.16.	Kebudayaan	
B.16.1.	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	60,52
B.16.2.	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	19,13
B.16.3.	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,34
B.16.4.	Persentase penyelenggaraan Adat Istiadat	100,00
B.17.	Perpustakaan	
B.17.1.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	100,00
B.18.	Kearsipan	
B.18.1.	persentase naskah kuno/koleksi budaya yang dilestarikan	100,00
B.18.2.	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	100,00
C.	<i>Pelayanan Urusan Pilihan</i>	
C.1.	Kelautan dan Perikanan	
C.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	15,00
C.1.2.	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,31
C.1.3.	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,00
C.1.4.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	109,50
C.2.	Pariwisata	
C.2.1.	persentase pengembangan daya tarik wisata	23,44
C.2.2.	persentase promosi pariwisata	55,28
C.2.3.	persentase SDM terlatih	34,40
C.2.4.	Persentase hak paten yang difasilitasi	20,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
C.3.	Pertanian	
C.3.1.	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,44
C.3.2.	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	62,50
C.3.3.	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	87,00
C.3.4.	persentase penanganan bencana pertanian	17,50
C.3.5.	persentase penyuluhan pertanian	27,80
C.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	
C.4.1.	Persentase pengelolaan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan	100,00
C.5.	Perdagangan	
C.5.1.	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	27,78
C.5.2.	Persentase pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan strategis	100,00
C.5.3.	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan	4,00
C.5.4.	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera	100,00
C.5.5.	Persentase Pedagang yang memasarkan barang produk dalam negeri	100,00
C.6.	Perindustrian	
C.6.1.	Persentase Bina Pelaku IKM	100,00
D.	Pendukung Urusan	
D.1.	Sekretariat Daerah	
D.1.1.	Cakupan layanan administrasi umum KDH/WKDH	100,00
D.1.2.	Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00
D.1.3.	capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100,00
D.2.	Sekretariat Dewan	
D.2.1.	Cakupan layanan administrasi umum Sekretariat DPRD	100,00
D.2.2.	Persentase fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRK	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
E.	Penunjang Urusan	
E.1.	Perencanaan	
E.1.1.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100,00
E.1.2.	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00
E.2.	Keuangan	
E.2.1.	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	93,35
E.2.2.	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	92,32
E.2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	9,66
E.3.	Kepagawaian	
E.3.1.	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100,00
E.4.	Pendidikan dan Pelatihan	
E.4.1.	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	4,20
E.5.	Penelitian dan Pengembangan	
E.5.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90,00
E.6.	Pengelolaan Perbatasan	
E.6.1.	Cakupan pengelolaan wilayah perbatasan	100,00
F.	Pengawasan	
F.1.	Inspektorat Daerah	
F.1.1.	Tingkat Maturitas SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) Kota	Level 3
F.1.2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
G.	Kewilayahan	
G.1.	Kecamatan	
G.1.1.	Cakupan Pelayanan Masyarakat	100,00
G.1.2.	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00
G.1.3.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
G.1.4.	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00
G.1.5.	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100,00
H.	Kesatuan Bangsa dan Politik	
H.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	
H.1.1.	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	85,00
H.1.2.	Persentase partisipasi partai politi dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik	100,00
H.1.3.	Persentase ormas, yang mendapatkan pembinaan	100,00
H.1.4.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	25,00
H.1.5.	Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	66,60
I.	Kekhususan	
I.1.	Kekhususan Aceh	
I.1.1.	Persentase koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam	100,00
I.1.2.	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	100,00
I.1.3.	Persentase Pertumbuhan ZIS	2,36
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH	
	Kemampuan Ekonomi Daerah	
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	PDRB per kapita (ADHK) (juta rupiah)	31,09
	PDRB per kapita (ADHB) (juta rupiah)	38,50
	Pertumbuhan Jumlah Penganggur (%)	-6,74
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
1.	Perhubungan	
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	814.405,00
2.	Penataan Ruang	
2.1.	Kataatan Terhadap Tata Ruang (%)	65,43
2.2.	Persentase Luas Wilayah Produktif	70,83

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Capaian Tahun 2023
2.3.	Persentase Luas Wilayah Industri	0,03
	Fokus Iklim Investasi	
1.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	21,69
2.	Perizinan	
2.1.	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan (izin)	1.440,60
2.2.	Lama proses perizinan (hari)	1,00
	Fokus Sumber Daya Manusia	
1.	Ketenagakerjaan	
1.1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	615,00

Sumber: RPK Kota Sabang 2023-2026 dan Hasil Analisis

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan RKPK Sabang Tahun 2023 mengacu pada RPK Sabang Tahun 2023–2026. Visi dan Misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027, tujuan dan sasaran, serta prioritas Kota Sabang yang harus capai sehingga harus dituangkan dalam RKPK Sabang Tahun 2023.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPK Kota Sabang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. RKPK menjadi pedoman bagi Perangkat daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. RKPK menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Sabang Tahun 2023 yang didahului dengan penjabaran RKPK ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK (PPAS) Tahun Anggaran 2023.
3. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPK, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPK tahun 2023 ke dalam Renja PD, KUA dan PPAS, dan RKA PD Tahun Anggaran 2023, serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan RKPK Tahun 2023 sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
4. Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPK Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Seluruh *stakeholders* pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan tahun 2023. Masyarakat dapat berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
6. RKPK Tahun 2023 mencakup target kinerja tahun 2023 dengan tidak sesuai dengan target kinerja RPK Sabang Tahun 2023-2026.
7. Perubahan RKPK dan Perubahan Renja PD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas kota;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2022 harus digunakan untuk tahun 2023;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPK Kota Sabang tahun 2023 yang telah ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBK Tahun Anggaran 2023 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan Kota Sabang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Sabang Tahun 2007-2027 dapat terwujud yaitu **“Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan yang Baik Dan Berwibawa”**.

WALI KOTA SABANG

dto.

NAZARUDDIN